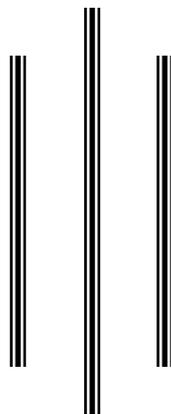




BUPATI KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009



**DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA DPRD
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG 2010**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	7
C. Kondisi Perekonomian	12
BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH	
A. Visi dan Misi	36
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	37
C. Prioritas Pembangunan Daerah	44
BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah	53
B. Belanja dan Pembiayaan Daerah	56
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah	62
BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
I. URUSAN WAJIB	68
i PENDIDIKAN	68
ii KESEHATAN	84
iii LINGKUNGAN HIDUP	93
iv PEKERJAAN UMUM	97
v PENATAAN RUANG	147
vi PERENCANAAN PEMBANGUNAN	148
vii PERUMAHAN	156
viii KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	158
ix PENANAMAN MODAL	162
x KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	165
xi KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	167
xii KETENAGAKERJAAN	169
xiii KETAHANAN PANGAN	173
xiv PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	177
xv KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	179
xvi PERHUBUNGAN	181
xvii KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	186
xviii PERTANAHAN	188

xix	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	195
xx	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	202
xxi	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	253
xxii	SOSIAL	259
xxiii	KEBUDAYAAN	267
xxiv	STATISTIK	269
xxv	ARSIP	269
xxvi	PERPUSTAKAAN	271
II. URUSAN PILIHAN		272
i	KELAUTAN DAN PERIKANAN	272
ii	PERTANIAN	279
iii	KEHUTANAN	290
iv	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	294
v	PARIWISATA	298
vi	INDUSTRI	301
vii	PERDAGANGAN	303
viii	KETRANSMIGRASIAN	306
BAB V. PENYELENGARAAN TUGAS PEMBANTUAN		
A.1.	Dasar Hukum	310
A.2.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	311
A.3.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	312
A.4.	Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya	312
A.5.	Sumber Dan Jumlah Anggaran	315
A.6.	Permasalahan Dan Solusi	316
BAB VI. PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN		
A.	Kerjasama Antar Daerah	319
A.1.	Kebijakan dan Kegiatan	319
A.2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	319
B.	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	320
B.1.	Kebijakan dan Kegiatan	320
B.2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	
B.3.	Permasalahan dan Solusi	324

C.	Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	324
		324
C.1.	Kebijakan dan Kegiatan	325
C.2	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	
D.	Pembinaan Batas Wilayah	326
D.1.	Kebijakan dan Kegiatan	326
D.2.	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	328
D.3.	Permasalahan dan Solusi	337
D.4.	Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi..	337
D.5.	Stuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah	338
E.	Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	338
E.1.	Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya	338
E.2.	Sumber dan Jumlah Anggaran	339
E.3.	Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	339
E.4.	Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi	340
E.5.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana	340
E.6.	Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana	340
F.	Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	340
F.1.	Gangguan Yang Tejadi konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya	341
F.2.	Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	341
F.3.	Sumber Dan Jumlah Anggaran	341
F.4.	Penaggulangan dan Kendalanya	342
F.5.	Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	343
BAB VII	PENUTUP	346

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Jenis, Luas, Produktifitas dan Produksi Palawija Tahun 2009	14
Tabel 1.2. Jenis, Jumlah Panen dan Jumlah Produksi Hortikultura tahun 2009	14
Tabel 1.3. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2009	24
Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)	26
Tabel 1.5. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)	28
Tabel 1.6. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)	30
Tabel 1.7. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2009	32
Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009	55
Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009	60
Tabel 3.3. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009	63
Tabel 5.1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009	316

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Literatur sejarah menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 1863 Kerajaan Kutai Kertanegara mulai menjadi daerah Swapraja sebagai bagian dari Kerajaan Hindia Belanda. Sementara pada masa penjajahan Jepang tahun 1942 daerah Swapraja Kutai Kertanegara mendapat pengaturan tersendiri dan mempunyai kedudukan istimewa.

Pada tahun 1945 berhasil diduduki kembali oleh Belanda dan pada tahun 1947 Kalimantan Timur dibentuk menjadi Federasi dengan status Satuan Kertanegaraan yang berdiri sendiri dan terdiri atas daerah-daerah Kesultanan Kutai, Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan sebutan Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 1949 masuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pada tanggal 10 April 1950 Federasi Kalimantan Timur masuk dalam Republik Indonesia (yang beribukota di Yogyakarta).

Kemudian pada tanggal 7 Januari 1953 berdasarkan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 maka daerah Swapraja Kutai Kertanegara diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom atau daerah istimewa tingkat Kabupaten. Sementara pada tahun 1959 status daerah istimewa tersebut dihapus melalui Undang-Undang nomor 27 tahun 1959 dan dibagi menjadi Daerah Swatantra yang meliputi : Kotapraja Balikpapan, Kotapraja Samarinda dan Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, pada tahun 1995/1996 Kabupaten Dati II Kutai menjadi salah satu Daerah

percontohan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 3 daerah kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2001, maka nama Kabupaten Kutai berubah menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selama Pemerintahan Orde Baru, kekayaan budaya dan kemajemukan Indonesia terasa sangat diseragamkan untuk memudahkan Pemerintah Pusat mengontrol dan menguasai daerah hingga sumber daya alamnya. Ketika pemerintahan itu digantikan oleh pemerintahan baru, muncul tuntutan otonomi dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumber daya alam di daerah. Dalam situasi dan kondisi yang demikian sangatlah arif jika daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dirinya sendiri.

Kemudian diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang pada dasarnya menekankan pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, atau dengan kata lain menekankan pada desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dilaksanakan ternyata kedua undang-undang tersebut dinilai banyak mengalami hambatan yang bersumber dari kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya. Hamnatan-hambatan tersebut dalam implementasinya sering menimbulkan konflik kepentingan, terutama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Karena kondisi tersebut , kemudian muncul tuntutan

revisi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 untuk mencegah situasi yang tidak terkendali.

Tutupan revisi UU 22/99 akhirnya dipenuhi oleh pemerintah yang bersama-sama DPR-RI beberapa bulan menggodok berbagai masukan yang diperoleh dari masyarakat, dan akhirnya pada tanggal 29 September 2004 DPR-RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah pengganti UU 22/99 untuk dijadikan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru dan pada tanggal 5 Oktober 2004 ditanda tangani oleh Presiden dengan sebutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan lebih sederhana dan cepat.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar (*checks and balances*), artinya tidak saling mendominasi.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini telah menempatkan posisi yang setara antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang tercermin antara lain di dalam membuat kebijakan daerah

berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga dapat membangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung, bukan menjadi lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing. Begitu pula dalam penetapan anggaran dilakukan bersama-sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Nuansa demokrasi yang berkembang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadikan pihak eksekutif tidak sendirian dalam menyikapi dan menanggapi kritik, saran dan harapan yang telah mampu memberikan sinergi terhadap pemecahan permasalahan maupun persoalan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat kompleks agar pijakan moral atas mandat peningkatan kesejahteraan masyarakat terpanuhi.

Sebagai bahan yang tidak terpisahkan dalam proses kebersamaan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari proses penyelenggaraan pemerintahan akan menjadikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atas kekurangan maupun keberhasilan serta pemetaan langkah langkah kedepan untuk perbaikan dan sekaligus sebagai peletakan pondasi yang kokoh dalam membangun Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan.

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tercermin pula dari adanya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban dimaksud adalah merupakan salah satu kewajiban Kepala daerah sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Implementasi pasal 27 ayat 2 tersebut kemudian diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Secara rinci landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2006 meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK. 210.a/2005 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2010.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
15. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009.

Selain peraturan perundangan tersebut, penyelenggaraan Laporan pertanggung jawaban tersebut juga mengacu kepada beberapa dokumen perencanaan jangka panjang lain yang menjadi produk hukum. Dengan demikian, laporan keterangan pertanggungjawaban juga meliputi beberapa tolok ukur yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai “political will” atas keinginan untuk menilai kinerja secara komprehensif, dengan tetap mendasarkan pada peraturan daerah yang lain seperti Arah Kebijakan Umum APBD.

Pencapaian kinerja yang dimaksud telah didukung dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.180.856.255.259,33 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2009, yang merupakan unsur input untuk pencapaian *outcome* pada masing-masing program yang telah dicanangkan dalam Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah dituangkan dalam kesepakatan kinerja antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan anggaran tahun 20089

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan sebesar 27.263,10 Km², dan luas perairan ± 4.097 Km², yang secara administratif terbagi menjadi 18 kecamatan dan 227 desa/kelurahan, secara geografis terletak pada posisi antara 115°26'28” - 117°36'43” Bujur Timur dan 1°28'21” Lintang Utara sampai 1°08'06” Lintang Selatan dengan batas administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Malinau

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kutai Barat

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat dari fisiografinya dapat dikelompokkan kedalam 9 satuan fisiografi yaitu daerah wara pasang surut (tidal swamp), daerah dataran alluvial (alluvial plain), daerah jalur kelokan sungai (meander belt), daerah rawa (swamp), daerah lembah alluvial (alluvial valley), daerah teras (terrain), daerah dataran (plain), daerah perbukitan (hill) dan daerah pegunungan (mountain)

Jenis tanah yang terdapat didaerah ini digolongkan kedalam tanah yang bereaksi asam. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Soil Taxonomi USDA tergolong ke dalam jenis tanah : *Ultisol*, *Entisol*, *Histosol*, *Incepticol* dan *Mallisol* atau bila menurut lembaga penelitian di Bogor terdiri dari jenis tanah : *Podsolik*, *Andosol*, *Renzina* dan *Alluvial*.

Topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7-25 m dpl terdapat dibeberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam. Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibedakan menjadi 6 kelas wilayah ketinggian.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinya yakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26⁰ C, dimana perbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5⁰ - 7⁰ C.

Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000-4.000 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 - 2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayah pedalaman atau kearah barat.

2. Gambaran Umum Demografis

Menurut hasil Suseda 2009 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 579.596 orang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 304.699 orang (52,57 persen) dan penduduk perempuan sebesar 274.897 orang (47,43 persen). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (*sex ratio*) sebesar 110,8. Artinya setiap 1.000 perempuan berbanding dengan 1.108 laki-laki. Peningkatan jumlah penduduk ini disebabkan adanya pertumbuhan alami dan faktor migrasi *netto* yang positif yang berarti migran masuk (*in migration*) ke Kabupaten Kutai Kartanegara lebih besar dibandingkan migran yang keluar (*out migration*).

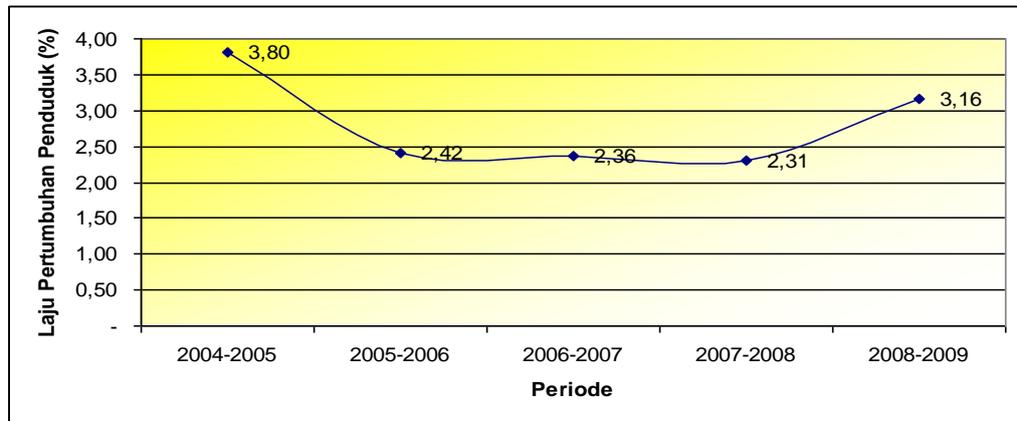
Seberapa besar jumlah migran masuk ke Kabupaten Kutai Kartanegara untuk saat ini baru bisa diperoleh dari kegiatan Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali atau dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan di pertengahan tahun antara dua Sensus Penduduk. Jumlah penduduk yang terus meningkat harus diantisipasi dengan baik dan dilakukan secara komprehensif. Pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan intansi terkait lainnya perlu melakukan upaya penanganan jumlah penduduk secara terpadu dan berkelanjutan agar laju pertumbuhan penduduk tetap terkendali. Upaya ini perlu dibarengi dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil Suseda 2009, jumlah penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin (saat ini berstatus kawin, cerai hidup, dan cerai mati) mencapai sebanyak 151.282 orang (69,46 persen), sebesar 12,07 persen di antara mereka melakukan perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati. Persentase cerai hidup sebesar 2,21 persen sedangkan cerai mati mencapai sebesar 6,05 persen. Faktor yang menyebabkan perceraian diduga bisa karena akibat kesulitan ekonomi sehingga sering terjadi pertengkaran keluarga maupun faktor lain seperti belum siapnya fisik maupun mental karena perkawinan dilaksanakan saat usia muda. Perkawinan usia muda berakibat pada panjangnya umur reproduksi sehingga peluang memperoleh anak semakin besar. Dampaknya adalah meningkatnya angka kelahiran.

Selama 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan angka proyeksi, laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun relatif menurun. Pada periode 2004-2005, LPP Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 3,80 persen menurun menjadi 2,42 persen pada periode berikutnya (tahun 2005-2006). Pada periode tahun 2006-2007 menjadi hanya sekitar 2,36 persen dan di periode tahun 2007-2008 LPP-nya mengalami penurunan menjadi 2,31 persen. Namun LPP periode 2008-2009 sedikit meningkat disbanding periode sebelumnya menjadi 3,16 persen.

Gambar 1.1.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Di Kabupaten Kutai Kartanegara Selama Kurun Waktu 2004-2009



Sumber: BPS, Proyeksi penduduk, dan Suseda 2009

Secara rata-rata (dalam rentang waktu lima tahun) pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara (LPP) dari tahun 2004-2009 adalah 2,05 per tahun. Pada tahun 2004 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 523.791 orang dan lima tahun kemudian menjadi 579.596 orang tahun 2009. Trend pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik dan perlu terus dipertahankan oleh berbagai pihak utamanya kinerja dinas instansi terkait mengingat ancaman pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang tinggi akan berdampak pada penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta penyediaan lapangan pekerjaan dan ketersediaan pangan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi bisa berdampak pada kerawanan sosial.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun keatas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-

64 tahun) tahun 2006 mencapai sebesar 54,97. Pada tahun 2007 angka beban ketergantungan sebesar 54,36 dan turun menjadi 53,55 pada tahun 2009. Artinya bahwa pada tahun 2009, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara menanggung sekitar 54 penduduk usia belum/tidak produktif

Indikator angka ketergantungan merupakan indikator yang kurang sensitif. Faktanya masih ada diantara penduduk yang usianya kurang dari 15 tahun yang terpaksa sudah harus bekerja dan sebagian penduduk usia 65 tahun ke atas yang masih melakukan aktifitas ekonomi. Naik turunnya angka beban ketergantungan tidak bisa secara langsung diartikan sebagai naik turunnya tanggungan ekonomi penduduk usia produktif terhadap usia belum/tidak produktif

C. Kondisi Perekonomian

a. Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial untuk dikembangkan terdiri dari pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan serta perikanan dan kelautan serta kehutanan. Dimana potensi ini dimasa mendatang akan menjadi andalan Kabupaten Kutai Kartanegara karena berperan dalam menggantikan peran dari pertambangan yang bersifat *non renewable resources* yang potensinya akan semakin menipis dan bahkan habis. Adapun keunggulan-keunggulan dari potensi tersebut meliputi;

1. Pertanian tanaman pangan

Potensi lahan pertanian diperkirakan seluas 2.726.310 ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 67.877 ha, lahan kering 2.262.581 ha dan lahan lainnya 395.852 ha. Dari potensi yang ada untuk sementara lahan sawah baru dimanfaatkan 25.659 ha (37.80%), sedangkan untuk lahan kering sekitar 106.306 ha (4,70%) dan lahan lainnya 40.582 ha (10.25%), sehingga masih banyak lahan potensial yang bisa digunakan untuk pengembangan pertanian dalam arti luas. Selain itu Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai Sungai Mahakam yang hampir tidak pernah kering, sehingga cukup potensial sebagai sumber pengairan untuk pengembangan komoditi padi sawah. Potensi yang lain adalah banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sehingga dengan beberapa potensi tersebut merupakan modal dasar dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain tanaman padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang yang diusahakan oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten Kutai Kartanegara terdapat pula tanaman Holtikultura, Sayur dan Palawija yang tersebar di 18 Kecamatan.

Pada Tahun 2009 total produksi padi adalah 207.140 ton yang terdiri dari produksi padi Sawah sebanyak 190.691ton dengan Produktifitas produksi sebanyak 50,67 Kw dan luas Panen 37.634 Ha.sedangkan untuk Padi Ladang produksi sebanyak 16.449 ton dengan Produktifitas Produksi sebanyak 31,51 Kw dan luas panen sebesar 5.220 Ha.

Sedangkan untuk jenis tanaman palawija, beberapa jenis tanaman utama dengan produksi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jenis, Luas, Produktifitas dan Produksi Palawija Tahun 2009

Jenis	Luas/Ha	Produktifitas/Kw	Produksi Ton/Thn
Jagung	2.759	31,21	5.425
Kedelai	473	13,49	484
Ubi Kayu	1.762	138	22.936
Ubi Jalar	925	32	2.686

Sedangkan untuk tanaman jenis hortikultura yang menjadi unggulan pada sektor pertanian adalah :

Tabel 1. 2. Jenis, Jumlah Panen dan Jumlah Produksi Hortikultura tahun 2009

Jenis	Jumlah Panen/Ha	Jumlah Produksi
Durian	1.074	37.533
Nanas	796	39.426
Pisang	1.003	62.039
Rambutan	7.330	26.896

2. Peternakan

Komoditi unggulan pada bidang peternakan terdiri dari Sapi, Kerbau, Kambing, dan Ayam. Pengadaan ternak pada tahun 2009 yang tersebar di 18 kecamatan Kutai Kartanegara terdiri dari ternak Sapi sebanyak 18.444 ekor, Kerbau 2.799 ekor, Kambing 15.323 ekor, Babi 5.116 ekor, ayam buras 464.715 ekor, ayam ras petelur 113.241 ekor dan populasi itik 70.811 ekor. Secara keseluruhan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 adalah 12.866 ton dan produksi telur 1.599 ton.

Dengan makin berkembangnya kegiatan peternakan di Kabupaten Kutai Kartanegara ini maka akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 17.366 orang dari target 25.428 orang.

Untuk sektor peternakan penetapan kawasan zona peternakan ditetapkan berdasarkan potensi dan kondisi yang ada, terdiri dari :

- a. Pengembangan Sapi Potong : Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana, Muara Badak, Marangkayu dan Sanga - Sanga.
- b. Pengembangan Ternak Kerbau : Kecamatan Muara Muntai, Kenohan, Muara Wis dan Kota Bangun.
- c. Pengembangan Ternak Kambing : Kecamatan Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman dan Kota Bangun.
- d. Pengembangan Ternak Babi: Kecamatan Tenggarong (Jahab), Tabang dan Loa Janan.
- e. Pengembangan Ayam Buras : Kecamatan Loa Kulu, Samboja, Loa Janan, Tenggarong, Kenohan, Tenggarong Seberang dan Kota Bangun.
- f. Pengembangan Ayam Petelur : Kecamatan Anggana dan Loa Kulu.
- g. Ternak Ayam Ras : Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Kota Bangun dan Samboja.
- h. Ternak Itik : Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Kota Bangun, Loa Kulu, Muara Kaman dan Sebulu.

3. Perikanan

Potensi pengembangan usaha perikanan dan kelautan baik berupa penangkapan maupun budidaya di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup besar. Hal ini ditunjang dengan keberadaan

pantai sepanjang 187,5 km, perairan laut kurang lebih 1.312,5 km persegi dan perairan umum kurang lebih 79.228,15 ha (Danau 19,217 ha, sungai 22.302,15 ha, Rawa 37.661 ha, waduk 48 ha dan embung 175 ha (lahan galian eks batu bara) dan Mina padi (INMINDI).

Dalam pengembangan usaha budidaya telah dikembangkan suatu kawasan sentra produksi yaitu:

1. Kawasan sentra produksi di wilayah hulu meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kembang Janggut dan Muara Kaman dengan komoditas unggulan patin, jelawat dan betutu.
2. Kawasan sentra produksi di wilayah tengah dengan komoditas unggulan nila dan ikan mas meliputi kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan.
3. Kawasan sentra produksi di wilayah pesisir dengan komoditas unggulan udang windu, bandeng dan kepiting meliputi kecamatan Anggana, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak, Marang Kayu.

Sedangkan untuk kawasan sentra produksi penangkapan di wilayah pesisir dan wilayah perairan umum, meliputi:

1. Wilayah perairan umum meliputi kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, kenohan, muara kaman dan kembang janggut.
2. Wilayah pesisir meliputi kecamatan anggana, muara Jawa, samboja, muara badak, marang kayu dan sanga-sanga.

Perkembangan produksi perikanan tahun 2009 untuk jenis perikanan Penangkapan sebanyak 52.045 ton. Perikanan budidaya sebanyak 41.440 ton.

Adapun jenis produk unggulan perikanan darat terdiri :

1. Perikanan Sungai / Rawa dan Danau untuk Tahun 2009 sebanyak 25.810 ton.
2. Budi Daya terdiri dari :
 - Kolam pada tahun 2009 sebanyak 308 ton
 - Keramba pada tahun 2009 sebanyak 29.832 ton

Sedangkan untuk tenaga kerja nelayan dalam rumah tangga petani (RTP), untuk kegiatan penangkapan ikan tahun 2009 sebanyak 20.531org. Budi Daya Tambak ,Sungai sebanyak 7.272 org. Kolam pada tahun 2009 sebanyak 799 org, sedangkan untuk jenis keramba tahun 2009 sebanyak 41.353 org.

Adapun Sarana dan Prasarana untuk produksi bibit ikan yang tersedia saat ini adalah Balai Benih Tirta Mina yang terletak di desa Perjiwa Kecamatan Tenggarong Seberang dengan kapasitas produksi sebanyak 752.400 ribu ekor pada periode tahun 2009 dan Balai Benih Tirta Jaya yang terletak di kecamatan Sanga - Sanga belum bisa produksi karena masih dalam tahap perbaikan.

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009, bidang tangkap 20.689 jiwa, bidang budidaya 68.628 jiwa dan bidang pengolahan 1.428 jiwa. Konsumsi masyarakat Kabupaten akan ikan pada tahun 2009 adalah sebesar 71 kg/Perkapita/tahun.

4. Perkebunan

Pengembangan perkebunan mempunyai peranan penting baik dalam pembangunan ekonomi, social maupun ekologi karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam tanpa atau relative tidak tergantung pada komponen impor. Adapun Pola dan kegiatan yang dilaksanakan melalui:

1. Perkebunan Rakyat (PR) dengan Pola UUP Pola Swadaya/Persial murni dan berbantuan.
2. Perkebunan Besar Swasta (PBS) yaitu Pola Kemitraan dan PBS Murni.
3. Perkebunan Besar Negara (PBN)-PTPN pola PIR (inti - Plasma).

Untuk pola pengembangan PBN-PTPN kegiatannya hanya terbatas pada komoditi karet dan saat ini sudah tidak dilaksanakan lagi.

Salah satu indikator tingkat perkembangan dan keberhasilan dalam pengembangan perkebunan dapat dilihat dari Areal dan Produksi sampai dengan tahun 2009 mencapai 155.571,75 Ha dengan jumlah Produksi mencapai 272.461,95 Ton, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 orang yang tersebar di 18 Kecamatan 226 desa/kelurahan.

Untuk jenis komoditi perkebunan rakyat sampai dengan saat ini mencapai luas areal 52.295,05 Ha dengan produksi mencapai 28.176,95 Ton/Tahun yang terdiri dari Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, Kakao, Kopi, Kapuk, Cengkeh, Panili, Kayu Manis, Kemiri, Pala, Jambu Mete, Pinang, Aren, Jahe, jarak Pagar, dengan jumlah petani sebanyak 38.310 kk.

Perkembangan perkebunan Besar Swasta (PBS) sampai tahun 2009 berjumlah 20 PBS, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dengan luasan arel tanam 101.160,70 Ha dengan produksi mencapai 244.145 ton.

Perkebunan Besar Negara (PBN) di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari PTP Nusantara XIII dengan Pola PIR khusus I Tanjung Santan Kecamatan Marang Kayu dengan komoditi Karet seluas 301.00 ha dan produksi 296 ton, dan kebun dinas Perkebunan dengan komoditi kelapa sawit seluas 326,00 Ha dengan produksi mencapai 140 ton.

Perkebunan PIR swadaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di kec Kembang Janggut, Kec Marang Kayu dan Kec Samboja dengan komoditi kelapa sawit , hingga tahun 2009 luas arelnya mencapai 1.790 ha dan produksi 5.950 ton.

5. Kehutanan

Secara umum areal hutan masih merupakan jenis penggunaan lahan yang dominan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu seluas 2.637.657 Ha (83,31% dari luas wilayah). Perinciaan jenis hutan yang ada meliputi: (1) hutan lindung (239.816 Ha); hutan produksi (1.325.198 Ha); hutan suaka alam (68.884 Ha); hutan penelitian pendidikan (14.099 Ha); dan hutan konversi (989.960 Ha).

Pada subsektor kehutanan, luas dan fungsi kawasan hutan berdasarkan penunjukan dari Menteri Kehutanan pada tahun 2006 adalah:

1. Kawasan Budidaya Kehutanan (K-BK) seluas 1.647.622 Ha:
 - a) Hutan Lindung / *Protection Are Forest* seluas 231.959 Ha
 - b) Hutan Suaka Alam dan Wisata / *Park and Reserve Forest* seluas 11.621 Ha.
 - c) Taman Nasional / *National Park* seluas 53.286 Ha
 - d) Hutan Produksi Terbatas / *Limited Production Forest* seluas 61.380 Ha
 - e) Hutan Produksi Tetap / *Non Convertible Forest* seluas 507.614 Ha
 - f) Hutan Fungsi Khusus / *Special Function Forest* seluas 781.762 Ha
2. Kawasan Hutan Non Budidaya Kehutanan (KBNK) seluas 1.073.009 Ha.

Komoditas dari subsektor kehutanan yang potensial dan memiliki prospek yang cerah antara lain hutan rakyat, rotan, ulat sutra dan sarang burung. Hutan rakyat mulai banyak dilakukan secara tradisional oleh masyarakat, dan belum ada usaha intensif dan ekstensif untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan. Hasil hutan berupa kayu diantaranya adalah mahoni, albasia, pinus, akasia dan leusanea. Rotan merupakan hasil ikutan dari hasil hutan. Rotan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya masih diusahakan secara tradisional sehingga masih perlu untuk diusahakan lebih modern mengingat adanya kenaikan permintaan rotan jadi, setengah jadi dan batangan di pasar internasional yang terus meningkat, sementara itu dilihat dari sisi produktivitas rotan alam dari

tahun ke tahun mengalami penurunan. Ulat sutra merupakan bahan baku kain yang berkualitas dan harganya sangat tinggi. Berdasar uji coba yang dilakukan Dinas Kehutanan, ulat sutra cocok dibudidayakan di Kalimantan Timur, termasuk media penanaman murbay sebagai pakan ulat sutra. Sarang Burung merupakan komoditas andalan yang cukup penting. Selama ini sarang burung diperoleh dari habitat alam.

6. Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pewaris kerajaan Hindu tertua (Abad ke IV) di Indonesia merupakan anugrah dan kebanggaan sejarah bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, Situs Sejarah, Keraton Lama, Musium Mulawarman merupakan warisan seni budaya keindahan alam saat ini yang merupakan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Kutai. Beberapa objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan pada saat ini yang tersebar di 18 Kecamatan adalah :

- 1) Hutan Bukit Suharto (Wisata Alam, Hutan pendidikan)
- 2) Bukit Bengkirai, (Wisata Alam , hutan pendidikan)
- 3) Pantai Tanjung Harapan Samboja (Wisata Alam)
- 4) Danau Melintang (Wisata Alam)
- 5) Museum Mulawarman dan makam para raja-raja (Wisata budaya, Peninggalan Sejarah)
- 6) Taman Rekreasi Pulau Kumala.
- 7) Planetarium
- 8) Air Terjun Perjiwa, Air Terjun Loa Duri, Air Terjun Bukit Biru, Air Terjun Kedang Ipil.
- 9) Rumah Adat Lamin dan Budaya Dayak Kenyah merupakan wisata Budaya yang terdapat di Kecamatan Tabang desa Ritan Baru.

- 10) Peninggalan Sejarah Bekas Kerajaan Hindu yang terdapat di kecamatan Muara Kaman yang merupakan wisata budaya.
- 11) Situs Kerajaan Kutai Mulawarman yang merupakan peninggalan sejarah yang terletak di Kecamatan Muara Kaman
- 12) Lamin Adat dan Seni Budaya Dayak Punan yang merupakan wisata sejarah dan purbakala terdapat di Kecamatan Loa kulu.
- 13) Peninggalan Belanda, Jepang dan Sumur Minyak Tua yaitu Tempat Wisata Historis/bersejarah yang terdapat di Kecamatan Sanga-sanga.
- 14) Taman Anggrek alam di Pulau Nusa Dua Kecamatan Muara Muntai dan Kecamatan Kahala.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Sebagai salah satu daerah penghasil migas, Kabupaten Kutai Kartanegara masih mampu menciptakan nilai tambah yang cukup tinggi setiap tahunnya. Peningkatan produksi dan harga barang dan jasa merupakan faktor penyebab utama kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Kutai Kartanegara mulai tahun 2001 hingga tahun 2009.

Pasca otonomi daerah yaitu tahun 2001 terlihat bahwa total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas dasar harga berlaku dengan migas sebesar 26,361 triliun rupiah. Sejak tahun 2005 nilai PDRB sudah berada diatas 50 trilion rupiah yaitu sebesar 59,181 triliun rupiah. Nilai ini meningkat terus di tahun 2006 menjadi 66,354 triliun rupiah, kemudian tahun 2007 mencapai nilai 72,112 triliun rupiah. Lalu pada tahun 2008 mencapai angka 99,559 trilion rupiah.

Terakhir pada tahun 2009 nilai tambah yang mampu dihasilkan oleh Kabupaten Kutai kartanegara sebanyak 91,571 triliun rupiah. Kondisi ini memang disebabkan melemahnya produksi migas dibandingkan dengan produksi migas tahun 2008. Apabila kita bandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2009, yang besaran nilai tambah sub sektor pertambangan migasnya sebesar 68,279 triliun rupiah, maka 97,81 persen berasal dari pertambangan migas Kutai kartanegara yang nilainya mencapai 66,784 triliun rupiah.

Lain halnya bila PDRB diamati atas dasar harga konstan 2000, yang hanya berada di kisaran dibawah 30 triliun rupiah. Lihat saja pada tahun 2001 nilai PDRB dengan migas sebesar 25,262 triliun rupiah dan pada tahun 2005 meningkat menjadi 28,008 triliun rupiah. Sayangnya pada tahun 2006 nilainya turun menjadi 27.299 triliun rupiah atau terjadi penurunan sebesar - 2,53 persen. Demikian juga pada tahun 2007, masih terjadi penurunan nilai tambah menjadi 26,203 triliun rupuah atau penurunan sebesar -4,02 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang telah terjadi penurunan produksi migas pada periode tahun 2006 hingga tahun 2007. Pada tahun 2008 seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa harga migas dunia yang melambung tinggi mampu memacu produksi migas yang berimbas pada peningkatan nilai PDRB menjadi 27,346 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2009 masih mampu menghasilkan nilai PDRB sebesar 28,108 triliun rupiah.

Pekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara terlihat lebih riil apabila kita melihat dari sisi PDRB tanpa migas. Pada tahun 2001, PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas mencapai angka 6,009 Triliun Rupiah, sementara tahun 2007 sudah mencapai angka 17,542

triliun rupiah. Sejak tahun tahun 2005 capaian nilai PDRB sudah berada diatas 10 triliun rupiah, yaitu tahun 2005 mencapai 11,610 triliun rupiah, tahun 2006 mencapai 14,302 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2008 sudah mampu mencapai nilai 22,045 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2009 menghasilkan nilai sebesar 24.786 triliun rupiah.

Sementara itu PDRB tanpa migas atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan bahwa tahun 2009 mencapai nilai 9,112 triliun rupiah atau ada kenaikan sebesar 5,34 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008 yang nilainya sebesar 8,596 triliun rupiah atau ada kenaikan sebesar 5,34 persen. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2001 hingga tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3. Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2001-2009

Tahun	PDRB ADH Berlaku (Juta Rupiah)		PDRB ADH Konstan 2000 (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	26.361.802	6.009.398	25.262.051	5.010.617	7,94	5,26
2002	26.837.948	6.956.958	26.697.543	5.245.098	5,68	4,68
2003	33.548.764	7.882.728	26.754.490	5.602.802	0,21	6,82
2004	42.409.272	8.682.805	27.279.521	5.960.847	1,96	6,39
2005	59.234.845	11.636.105	28.008.486	6.650.958	2,67	11,58
2006	66.354.536	14.302.874	27.299.950	7.437.449	-2,53	11,83
2007	72.112.720	17.542.150	26.203.625	8.148.612	-4,02	9,56
2008	99.559.220	22.045.057	27.346.014	8.596.411	4,36	5,50
2009	91.571.294	24.786.622	28.109.265	9.112.167	2,79	6,00

Untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode tahun 2000 hingga tahun 2009 ini, dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan tingkat pertumbuhan produksi barang dan jasa, walaupun masih bersifat makro.

Karena Kutai Kartanegara sangat bergantung pada sektor migas yang produksinya turun pada 2006 dan 2007 lalu, maka pertumbuhan ekonomi tahun-tahun tersebut juga menurun yaitu masing-masing sebesar -2,53 persen dan -4,02 persen. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian sebesar -4,23 persen pada tahun 2006 dan -6,22 persen pada tahun 2007. Tetapi dengan adanya peningkatan produksi migas tahun 2008, maka sektor pertambangan dan penggalian bisa mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 3,92 persen. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara hingga mencapai 4,36 persen. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhannya melemah menjadi hanya sekitar 2,79 persen.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 ini sangat didukung oleh pertumbuhan dari semua sektor pembentuk PDRB. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah sektor Jasa-jasa yang tumbuh sebesar 26,96 persen, lalu sektor Listrik, Gas dan Air minum yang tumbuh sebesar 9,74 persen. Kemudian disusul oleh sektor bangunan yang menempati urutan berikutnya yaitu sebesar 6,84 persen. Setelah itu sektor Perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 4,88 persen.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 3,89 persen, kemudian disusul sektor Pengangkutan dan

komunikasi yang mampu tumbuh sebesar 3,80 persen. Sektor Industri pengolahan tahun 2009 ini tumbuh sebesar 2,92 persen dan Sektor Pertambangan dan penggalian pertumbuhannya masih masih mampu tumbuh yaitu sebesar 2,34 persen. lalu setelah itu sektor pertanian dalam arti luas yang pertumbuhannya menurun yaitu - 1,05 persen. Penyebab menurunnya pertumbuhan sektor ini adalah dengan menurunnya pertumbuhan sub sektor kehutanan yang besarnya mencapai -7,01 persen, sehingga secara kumulatif sektor ini mengalami penurunan pertumbuhannya.

Tabel 1.4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	-3,13	7,88	-2,25	4,80	0,45	0,40	0,03	-1,05
Pertambangan & Penggalian	5,67	-1,28	1,36	1,81	-4,23	-6,22	3,92	2,34
Industri Pengolahan	6,13	5,24	5,68	4,41	4,32	5,77	1,67	2,92
Listrik, Gas, & Air Bersih	12,43	8,37	10,47	5,77	9,00	9,02	9,44	9,74
Bangunan	39,93	13,85	21,19	15,36	5,96	6,82	14,97	6,84
Perdagangan, Hotel, & Restoran	10,94	8,72	9,83	6,75	14,50	10,46	8,94	4,88
Pengangkutan & Komunikasi	4,94	5,86	3,63	4,68	7,66	6,37	6,86	3,80
Keuangan, Persewaan & jasa Perush.	3,95	6,25	6,02	-0,07	-1,76	2,59	3,51	3,89
Jasa-jasa	4,29	4,90	3,15	5,97	13,59	12,93	13,20	26,96
Total PDRB	5,68	0,21	1,96	2,67	-2,53	-4,02	4,36	2,79
Total PDRB (Tanpa Migas)	4,68	6,82	6,39	11,58	11,83	9,56	5,50	6,00

c. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih di dominasi oleh sektor primer yaitu sektor yang berbasis pada sumber daya alam seperti sektor minyak dan gas bumi dan

sektor pertanian. Pada tahun 2009 relatif tidak mengalami pergeseran dibanding tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya yaitu dominasi sektor Pertambangan dan Penggalian. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sekitar 85,84 persen. Hal ini berarti lebih dari 80 persen ekonomi Kutai Kartanegara berasal dari kegiatan ekonomi yang basisnya adalah sumber dayam alam. Sehingga mengakibatkan sangat tergantungnya pertumbuhan ekonomi dari sektor migas ini. Sementara sektor lain hanya sisanya yaitu sekitar 14,23 persen saja.

Bila dilihat dari besaran PDRB, maka Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009, bisa dikatakan sebagai daerah yang kaya. Namun perlu diingat bahwa pendapatan ini merupakan pendapatan yang semu dan bukan merupakan pendapatan yang riil yang diterima masyarakat. Hal ini disebabkan karena penyumbang terbesar adalah sektor migas yang kita semua mengetahuinya bahwa hasil dari migas ini merupakan devisa negara, yang berarti masuk dahulu ke kas negara, baru kemudian dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana perimbangan.

Untuk sektor lainnya hanya disisakan peluang sebesar 14,23 persen saja. Porsi ini diisi oleh sektor Pertanian dalam arti luas, sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 5,43 persen, kemudian disusul oleh sektor bangunan yang menyumbang sebesar 3,15 persen serta sektor perdagangan menyumbang sebesar 2,56 persen. Sektor Industri Pengolahan masih mampu menempati urutan lima dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 yaitu sebesar 1,24 persen.

Sementara sektor lainnya secara berurutan yaitu Sektor Jasa-Jasa, sektor Pengangkutan dan Telekomunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan, serta sektor Listrik, Gas dan Air Bersih hanya mampu menyumbang dibawah 1 persen.

Tabel 1.5. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pertanian	9,28	8,18	6,39	5,37	5,42	5,75	4,47	5,43
Pertambangan & Penggalian	79,40	81,48	84,03	86,68	86,54	85,65	88,05	85,84
Industri Pengolahan	2,12	1,88	1,71	1,33	1,31	1,36	1,09	1,24
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,04	0,05
Bangunan	3,64	3,42	3,36	2,90	2,83	2,99	2,62	3,15
Perdagangan, Hotel, & Restoran	2,90	2,69	2,44	2,08	2,23	2,50	2,00	2,56
Pengangkutan & Komunikasi	0,62	0,55	0,48	0,39	0,42	0,43	0,34	0,39
Keuangan, Persewaan & jasa Persh	0,73	0,64	0,56	0,43	0,40	0,39	0,31	0,35
Jasa-jasa	1,25	1,11	0,98	0,79	0,82	0,89	0,77	0,99
J U M L A H	100	100	100	100	100	100	100	100

Struktur perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 tanpa migas berbeda distribusinya dibanding dengan migas. Struktur perekonomian tanpa migas ini telah terjadi pergeseran antara sektor pertanian dengan sektor pertambangan. Pada tahun 2000 hingga tahun 2009, peranan sektor pertanian cenderung berkurang atau menurun sedangkan sektor pertambangan dan penggalian malah sebaliknya yaitu menunjukkan trend yang meningkat.

Namun hal ini bisa dipastikan tidak akan bertahan lama, karena sektor pertambangan dan penggalian adalah merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan (*unrenewable*). Apabila potensinya sudah habis, maka kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak ada. Hal ini sudah semestinya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mulai menggali sumber-sumber potensi perekonomian lainnya sebagai pengganti sektor pertambangan dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2000 sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan mampu berperan sebesar 40,56 persen terhadap total PDRB tanpa Migas, namun pada tahun 2009 ini hanya mampu menyumbang sebesar 20,06 persen. Padahal tahun sebelumnya, sektor ini masih bisa berkontribusi sebesar 21,56 persen. Sementara itu pertambangan non migas dan penggalian yang pada tahun 2000 hanya sebesar 16,93 persen namun pada tahun 2008 ini meningkat pesat menjadi 47,69 persen. Sehingga menjadikan sektor ini menjadi sektor yang terbesar kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan pada tahun 2008 lalu, sektor pertambangan non migas dan penggalian berkontribusi sebesar 46,05 persen.

Sektor Bangunan menempati urutan yang sama dengan tahun lalu yaitu urutan ketiga setelah sektor pertambangan dan sektor pertanian dalam kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa migas yaitu sebesar 11,62 persen. Kemudian disusul sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran juga cukup besar peranannya dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 9,45persen.

Sektor Industri Pengolahan mampu menyumbang sebesar 4,58 persen pada tahun 2009 dan angka ini melemah sedikit bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 4,94 persen. Sektor jasa-jasa tahun 2009 ini menyumbang sebesar 3,65 persen dalam pembentukan PDRB tanpa migas. Namun sektor lainnya seperti sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor listrik, gas dan air bersih, hanya mampu memberikan kontribusi dibawah 2 persen, yaitu masing-masing sebesar 1,46 persen, 1,31 persen dan 0,18 persen.

Tabel 1.6. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2001-2009 (%)

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(2)
Pertanian	35,79	34,81	31,22	27,24	25,15	23,64	21,56	20,06
Pertambangan & Penggalian	20,52	21,16	22,00	32,29	37,54	40,99	46,05	47,69
Industri Pengolahan	8,16	7,99	8,36	6,76	6,08	5,58	4,94	4,58
Listrik, Gas, & Air Bersih	0,23	0,23	0,24	0,19	0,20	0,19	0,17	0,18
Bangunan	14,04	14,55	16,41	14,76	13,14	12,28	11,82	11,62
Perdagangan, Hotel, & Restoran	11,20	1,14	11,92	10,63	10,34	10,26	9,05	9,45
Pengangkutan & Komunikasi	2,40	2,35	2,34	2,00	1,93	1,78	1,56	1,46
Keuangan, Persewaan & jasa Persh	2,82	2,74	2,74	2,16	1,84	1,60	1,39	1,31
Jasa-jasa	4,84	4,73	4,78	3,81	3,79	3,68	3,46	3,65
J U M L A H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

d. PDRB Perkapitan dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang banyak dimanfaatkan untuk melihat perkembangan perekonomian, juga sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir, perkembangan nilai PDRB perkapita dan pendapatan perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu meningkat baik itu dengan migas maupun tanpa migas.

Seperti sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa pengaruh sektor migas sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian juga halnya dengan PDRB perkapita dan pendapatan perkapita, juga terlihat sangat dominan. Hal ini dapat dilihat dari selisih antara PDRB perkapita dengan migas dan non migas.

Pada tahun 2001 dimana baru dimulainya pelaksanaan otonomi daerah, nilai PDRB perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara mencapai nilai 57,291 Juta Rupiah, sedangkan PDRB perkapita tanpa migas sebesar 13,060 Juta Rupiah. PDRB perkapita tanpa migas hanya 22,79 persen dari PDRB dengan migas. Hal yang sama juga terjadi dengan pendapatan perkapitanya yaitu pendapatan perkapita dengan migas mencapai 52,905 juta rupiah, sementara tanpa migas hanya 13,293 juta rupiah. Terjadi selisih sebesar 38,430 juta rupiah, atau pendapatan perkapita tanpa migas hanya 25,70 persen dari pendapatan perkapita dengan migas.

Trend PDRB perkapita dan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun selalu meningkat dan mulai tahun 2005 hingga 2008, PDRB dengan Migas sudah berada diatas 100 juta rupiah dan pendapatan perkapita sudah berada diatas 20 juta rupiah. Tahun 2009 telah tercipta PDRB dengan migas sebesar 91,571 triliun rupiah dan

apabila dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka didapat PDRB perkapita dengan migas sebesar 171.681.476 rupiah. Demikian juga halnya dengan PDRB tanpa migas yang secara total sebanyak 24,786 triliun rupiah, apabila dibagi dengan jumlah penduduk, maka didapat PDRB perkapita sebesar 46.470.937 rupiah. PDRB perkapita tanpa migas tahun 2009 hanya 27,07 persen saja dari nilai PDRB perkapita dengan migas.

Tabel 1.7. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2001-2009

Tahun	PDRB Perkapita (Rupiah)		Pendapatan Regional Perkapita (Rupiah)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	57.291.701	13.060.133	52.905.554	11.754.119
2002	56.981.023	14.770.676	51.724.468	13.293.608
2003	69.585.920	16.350.138	64.289.948	14.715.124
2004	87.082.694	17.829.169	81.773.949	16.046.253
2005	120.264.763	23.572.046	114.018.385	21.207.617
2006	131.296.323	28.301.226	124.478.084	25.466.012
2007	136.940.481	33.312.160	128.295.802	30.905.127
2008	188.533.421	41.746.309	177.673.733	38.278.795
2009	171.681.476	46.470.937	158.995.334	41.641.491

Pendapatan perkapita dengan migas di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2001 sebesar 52,905 juta rupiah dan tanpa migas sebesar 11,754 juta rupiah atau pendapatan perkapita dengan migas sebesar 4,50 kali lebih besar dari pendapatan perkapita tanpa migas. Sedangkan pada tahun 2005 pendapatan perkapita dengan migas 5,36 kali lebih besar dari pendapatan perkapita tanpa migas.

Pendapatan perkapita dengan migas di Kutai Kartanegara tahun 2009 sebesar 158,995 juta rupiah sedangkan pendapatan perkapita tanpa migas sebesar 41,641 juta rupiah. Terlihat adanya selisih yang sangat besar yaitu sekitar 117,353 juta rupiah atau capaian pendapatan perkapita tanpa migas hanya 26,19 persen dari pendapatan perkapita dengan migas atau 3,82 kali lebih besar pendapatan perkapita dengan migas daripada pendapatan perkapita tanpa migas.

Hal ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi antara pendapatan yang dinikmati oleh penduduk yang bekerja pada sektor minyak dan gas bumi dibandingkan dengan penduduk yang bekerja pada sektor-sektor lainnya.

BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah ke depan masih mengalami kendala yang tidak kecil. Sistem pemerintahan daerah dipengaruhi bermacam-macam masalah otonomi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan melihat pengalaman pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah sebelumnya, maka diperlukan antisipasi kedepan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Belajar dari pengalaman keberhasilan (*Success Story*) dan proses pembelajaran (*Lessons Learned*) pada pelaksanaan pembangunan Gerbang Dayaku periode 1999 - 2004 yang lalu, maka setelah melalui proses Pilkada langsung yang pertama di Indonesia tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian mencanangkan kembali program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam konsep Gerbang Dayaku yang telah *divitalisasi* dan *diaktualisasi*. Dengan demikian, prosesnya menjadi lebih sistematis sekaligus terkoordinasi.

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010 merupakan Visi dan Misi dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara terpilih dalam Pilkada Langsung.

Visi merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan amanat publik, yang digali dari nilai-nilai luhur yang mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki menuju apa

yang ingin diwujudkan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan suatu Visi yaitu :

“Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera”

visi daerah ini adalah gambaran Kutai Kartanegara di masa depan, namun signifikansi visual pencapaiannya dapat ditelusuri melalui beberapa aspek argumentasi yaitu :

Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih : Tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara profesional, akuntabel, dan transparan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat

Berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi : Pemerintahan yang menjalankan peraturan dan perundangan secara konsisten dan bertanggung jawab, didukung oleh pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui proses penataan, penyuluhan, pembinaan, dan pentaatan (tidak sepihak)

Masyarakat yang berkualitas, maju : Kualitas bermakna mampu menghilangkan sekat-sekat sosial yang ada, mampu membangun komunikasi dalam dan antar masyarakat secara arif, dan mampu menciptakan *social capital*. Maju berarti mampu untuk mengawal seluruh dinamika perubahan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk menghasilkan nilai tambah optimal sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Masyarakat yang mandiri dan sejahtera: Masyarakat yang sadar, tahu, dan mampu mengakomodasi kebutuhan mereka sendiri, serta dapat saling mengisi di dalam memperbaiki tingkat hidup mereka pada tataran pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sejahtera terutama diukur dari pemenuhan kebutuhan dasar di seluruh lapisan masyarakat

Guna mewujudkan visi tersebut maka telah ditetapkan 3 (tiga) **Misi** yang harus ditempuh sbb :

1. Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (*eksekutif dan legislatif*) dan penegakan supremasi hukum.
2. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Kondisi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kebanyakan terdiri dari daerah rawa dan pasang surut, ditambah dengan luasan wilayahnya merupakan salah satu kendala tersendiri bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur, terutama sekali infrastruktur jaringan jalan. Akses antar wilayah masih sangat terbatas, terutama sekali pada daerah pedalaman seperti di Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis dan Muara Muntai. Peningkatan pembangunan kewilayahan (teritorial), baik di perkotaan dan terutama sekali wilayah pedalaman serta pedesaan sangat membutuhkan perhatian khusus untuk pengembangan wilayah.

Masalah dan tantangan di atas mengharuskan pemerintah mengubah paradigma dalam mewujudkan setiap kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Melalui perwujudan *good governance*, di mana salah satu karakteristiknya adalah mendorong partisipasi dan kemitraan dengan masyarakat, maka pembangunan harus melibatkan masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, tidak akan ada strategi yang mampu bertahan lama. Peran masyarakat harus dipandang sebagai hal yang dinamis dan memberikan suatu peluang bagi pemerintah yang bermaksud membangun kredibilitas negara (*good governance*) melalui potensinya dalam membangun koalisi dan aksi kolektif.

Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan tumbuh dan berkembang bersama dengan bidang kehidupan lain dalam masyarakat secara simultan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi terwujudnya pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi; menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera. Untuk kesemua itu pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan yang menjadi landasan untuk pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

Strategi 1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui strategi peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, maka kebijakan yang dilaksanakan:

1. Meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yg partisipatif, transparan dan akuntable, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - 1.1. Peningkatan disiplin dan pengawasan, pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penghargaan sesuai prestasi
 - 1.2. Peningkatan pelayanan publik (pelayanan prima)
 - 1.3. Efisiensi dan efektifitas struktur organisasi pemerintahan daerah sesuai Tupoksi
 - 1.4. Perancangan dan implementasi program pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan untuk mencapai kemandirian daerah
 - 1.5. Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah
2. Konsolidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintahan yang baik di masa depan
 - 2.1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah
 - 2.2. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
 - 2.3. Pembinaan dan Kaderisasi Aparatur Pemerintahan
 - 2.4. Konsolidasi kelembagaan Pemerintahan
3. Penyempurnaan dan penegakan peraturan dan perundangan secara tegas
 - 3.1. Penyusunan Peraturan Perundangan dan penegakan hukum
4. Perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang secara konsisten

- 4.1. Penyelenggaraan Penataan Ruang secara konsisten dan sistematis
- 4.2. Penyelesaian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Detail Tata Ruang Khusus Delta Mahakam
- 4.3. Menyusun Rencana teknik Kawasan tertentu berdasarkan skala prioritas (kawasan bandara, Kawasan Industri Pendingin, Kawasan Kekambang, Kawasan Wisata Pulau kumala, Pusat-Pusat perbelanjaan)
- 4.4. Tapal Batas antar wilayah di dalam Kabupaten dan Antar wilayah Kabupaten-Kota
5. Meningkatkan mutu dan jumlah sarana serta prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - 5.1. Peningkatan mutu dan jumlah sarana/prasarana sesuai kebutuhan dan kemajuan teknologi

Strategi 2. Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi

Dalam upaya mewujudkan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran atas dasar keadilan sosial maka kebijakan yang dilaksanakan :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal
 - 1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi wilayah
 - 1.2. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan kelompok usaha di pedesaan dan perkotaan
2. Penataan pemerintah yang wirausaha (*entrepreneurial Government*) serta meningkatkan peran pemerintah sebagai katalisator bagi pengusaha kecil, menengah dan besar.

- 2.1. Mengelola aset dengan seksama agar setiap investasi yang sudah ada dapat memberikan keuntungan yang lebih besar
- 2.2. Peningkatan kreatifitas dalam menentukan peluang investasi baru yang menentukan keuntungan lebih cepat (*quick yielding ventures*)
- 2.3. Mengembangkan agro-industri untuk mengolah lebih lanjut hasil produksi/panen/petik masyarakat
- 2.4. Peningkatan peran aktif pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam pembangunan
3. Meningkatkan investasi bagi penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi
 - 3.1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha
 - 3.2. Peningkatan dan Pemerataan Investasi
 - 3.3. Pengembangan Bisnis Daerah
 - 3.4. Peningkatan dan Efektivitas dan efisiensi regulasi investasi
4. Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan menghadapi peluang dan tantangan globalisasi
 - 4.1. Peningkatan daya saing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif
5. Mendorong usaha yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarui (*unrenewable resources*) kepada sumber daya alam yang terbarui (*renewable resources*)
 - 5.1. Mengarahkan investasi pada usaha-usaha non ekstraktif, penciptaan lapangan usaha baru yang melibatkan rakyat kecil
 - 5.2. Meningkatkan produksi dan ekspor komoditi non ekstraktif
 - 5.3. Memelihara komitmen untuk konsisten dalam pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*)

Strategi 3. Meningkatkan pembangunan teritorial

Strategi ini mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada wilayah teritorial; perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini diharapkan mampu mengembangkan pemberdayaan masyarakat perdesaan dan perkotaan sehingga memberikan efek percepatan dan pemerataan pembangunan yang berfungsi sebagai pemicu untuk mempercepat gerak roda pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Untuk strategi meningkatkan pembangunan teritorial melalui kebijakan:

I. Kebijakan Pembangunan Pedesaan

1. Meningkatkan keberpihakan pada Rakyat Kecil melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah pedesaan
 - 1.1. Membuka lapangan kerja dan peluang usaha bidang agribisnis
 - 1.2. Membuka lapangan kerja dan peluang usaha dibidang agroindustri
 - 1.3. Menyediakan sumber energi yang terjangkau masyarakat
 - 1.4. Integrasi Program pengembangan/pemberdayaan masyarakat oleh pihak swasta (*corporate Community Develompentl corporate social responsibility*) dilaksanakan melalui sistem yang telah ada sehingga tercapai tujuan pemberdayaannya secara riil tanpa pemanjaan terhadap masyarakat
2. Melanjutkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
 - 2.1. Meningkatkan kualitas belajar mengajar
 - 2.2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di pedesaan
 - 2.3. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan
3. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi dan kebutuhan desa

- 3.1. Memelihara dan meningkatkan jalan dan jembatan yang sudah ada
 - 3.2. Membangun jalan baru untuk membuka isolasi dan membuka akses jalan yang menghubungkan sentra-sentra ke pusat desa, kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten
 - 3.3. Meningkatkan pembangunan bidang pengairan untuk menunjang mekanisasi pertanian
 - 3.4. Pemenuhan keperluan listrik, air bersih, telekomunikasi di perdesaan secara bertahap
 - 3.5. Melanjutkan pembangunan sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perkantoran berdasarkan skala prioritas
4. Melestarikan dan mengaktualisasi nilai-nilai luhur warisan budaya lokal
 - 4.1. Memelihara dan mengemas nilai-nilai luhur warisan budaya lokal untuk meningkatkan kualitas obyek wisata daerah
 5. Memberdayakan seluruh komponen desa dalam memperbaiki dan melestarikan Lingkungan Hidup
 - 5.1. Mengarahkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
 - 5.2. Meningkatkan pengawasan lingkungan hidup oleh masyarakat

II. Kebijakan Pembangunan Perkotaan

1. Meningkatkan infrastruktur kota sebagai sarana pelayanan publik
 - 1.1. Memelihara infrastruktur yang sudah ada dan membangun infrastruktur baru sesuai keperluan
2. Menjadikan kota sebagai pusat perkembangan usaha jasa, perdagangan dan industri

- 2.1. Membangun sentra-sentra industri jasa dan perdagangan
3. Melanjutkan upaya menjadikan kota sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya
 - 3.1. Mengembangkan pusat-pusat pendidikan
 - 3.2. Pengembangan Kepariwisata daerah
 - 3.3. Melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
 - 4.1. Penguatan sistem pendidikan agama, moral, sikap, etika dan pengetahuan umum
 - 4.2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat
 - 4.3. Pemberdayaan wanita dan anti diskriminasi gender
 - 4.4. Pengembangan Pemuda dan Olah Raga
5. Memberdayakan seluruh komponen kota dalam memperbaiki dan melestarikan Lingkungan Hidup
 - 5.1. Menata Pembangunan Kota yang berwawasan lingkungan

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah sesungguhnya merupakan cerminan atas performa penyelenggaraan pemerintahan, begitu sebaliknya. Oleh karena itu kedepan kita perlu melakukan langkah-langkah konsolidasi terhadap cara berfikir seperti ini dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Tujuannya adalah agar kita tidak salah kaprah dalam mewujudkan visi pembangunan dalam kerangka otonomi daerah.

Konsepsi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2005-2010 menggambarkan bahwa kejayaan Kutai Kartanegara ke depan dapat tercapai melalui transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) kepada sumber daya yang dapat diperbaharui, dikembangkan, ditingkatkan (*renewable resources*)

Seiring dengan konsepsi Gerbang Dayaku, sebagai paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu berdasarkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan, yaitu:

- 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia**
- 2. Pengembangan Agrikultur dalam arti luas**
- 3. Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata**

Mendaras pada konsepsi Gerbang Dayaku yang telah divitalisasi dan diaktualisasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2006 juga memprioritaskan pembangunan pada tiga bidang pengembangan diatas, yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia; Pengembangan Agrikultur dalam arti luas serta Pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pendekatan pembangunan yang lebih menandalkan peranan SDA tidak tepat lagi, karena ketersediaannya semakin terbatas dan menipis, terutama SDA yang tidak bisa diperbaharui. Maka, pembangunan harus lebih mengandalakan Kekuatan SDM. *Thesis* bahwa SDM memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat *aksiomatik*. Berbagai kajian akademis dan emperis telah membuktikan keabsahan itu.

Upaya Kutai Kartanegara di dalam meningkatkan SDM didorong kesadaran, bahwa pembangunan yang bertumpu pada SDA yang tidak bisa diperbaharui yang bertumpu pada SDA yang tidak bisa diperbaharui, pada suatu saat akan menemui permasalahan. Sebaliknya dengan mengembang SDM seperti dilakukan negara maju, masa depan Kutai Kartanegara akan bersinar.

Dalam konteks ini, arah peningkatan SDM Kutai Kartanegara akan terus dikembangkan berbagai potensi pendidikan, antara lain penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun dan penerapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA), termasuk pembebasan biaya pendidikan mulai SD sampai SLTA (Negeri dan Swasta), insentif dan fasilitas guru, rehabilitas sarana fisik gedung sekolah, membangun sekolah unggulan dan juga mendirikan Politeknik Migas dan Pertanian dan banyak lagi. Dalam hal ini, Pemkab Kutai Kartanegara mengalokasi anggaran pendidikan pendidikan antara 20 - 25 persen dari total APBD.

Semua itu bertujuan agar sumberdaya manusia makin berkualitas, dan Kutai Kartanegara akan mampu mengelola sekaligus mempertahankan sumberdaya alam migas, mineral pertambangan dengan baik. Sejalan dengan itu, sumber daya yang bisa diperbaharui seperti agrikultur dan pariwisata juga bisa berkembang pesat karena dikelola oleh sumberdaya manusia yang cerdas. Harapannya adalah agar terjadi pergeseran ketergantungan pembangunan dari sumberdaya alam yang tak terbaharui menjadi ke yang bisa diperbaharui”.

2. Pengembangan Agrikultur dalam Arti Luas

Pembangunan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak terlepas dari pembangunan sektor agrikultur yang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian masyarakat. Apalagi Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki cakup luas dan potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian.

Usaha pengembangan lahan potensial tersebut telah banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, baik melalui program intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pangan maupun penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat petani di wilayahnya.

Salah satu upaya yang cukup penting dilakukan adalah bagaimana hasil-hasil pertanian itu dapat bernilai agribisnis sehingga hasil-hasil produksi pertanian dapat lebih meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani. Dengan melihat agribisnis sebagai sistem,

maka agribisnis mencakup agroindustri, yakni industri yang mengolah produksi hasil-hasil pertanian, yang meliputi sub sektor perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan hortikultura kehutanan. Dengan demikian, agribisnis meliputi sektor pertanian dan industri.

Dalam konteks ini, arah pembangunan agrikultur dalam arti luas, ditujukan untuk meningkatkan potensi yang ada seperti pembangunan agribisnis, dan agroindustri termasuk pembentukan perkebunan rakyat di seluruh Kutai Kartanegara untuk industri kelapa sawit.

Adapun tujuan dari pengembangan agrikultur dalam arti luas adalah untuk mewujudkan kondisi pembangunan pertanian yang tangguh, maju efisien serta mandiri menuju terciptanya usaha tani yang berorientasi pada agribisnis dan agroindustri. Dengan sasaran membuka kesempatan bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Langkah strategis dalam arah pengembangan agrikultur dalam arti luas adalah dalam upaya meningkatkan pembangunan pertanian dan diserasikan dengan kondisi global yang terus menerus berkembang secara dinamis merupakan suatu langkah yang telah dikaji secara cermat. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam revitalisasi pertanian, yakniantisipasi dengan cara mencari alternatif komoditi unggulan pengganti dari sektor sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable resources*) dengan minipisnya deposit tambang dan bahan galian.

3. Pengembangan Industri Pariwisata

Bagi Kutai Kartanegara gelombang pariwisata adalah gelombang emas yang secara berkesinambungan akan terus dimanfaatkan sekuat tenaga. Segenap sumber daya sosial, budaya dan alam yang bernilai kepariwisataan akan dikembangkan secara serius. Oleh karena itu, berbagai langkah yang dapat meningkatkan daya saing industri pariwisata di Kutai Kartanegara akan terus digagas dan diupayakan perwujudan dalam berbagai bentuk.

Harus diakui secara jujur bahwa industri pariwisata di Kutai Kartanegara belum sanggup menjadi pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain, industri pariwisata di Kutai Kartanegara belum menjadi sektor unggulan. Namun, melihat potensi wisata yang dimiliki, Kutai Kartanegara menyimpan potensi besar bagi pengembangan industri pariwisata. Bagi Kutai Kartanegara prosepek pariwisata adalah masa depan yang cukup menjajikan, lantaran Kutai Kartanegara memiliki obyek-obyek wisata berupa wisata alam; laut, danau maupun sungai dan sektor lainnya seperti kehutanan yang jika dikelola dengan baik akan berkembang menjadi industri pariwisata.

Karena pariwisata sifatnya multisektoral dan memiliki dampak *multiplier effects* yang luas, maka arah pengembangan pariwisata sebagai sebuah industri adalah :

1. Penciptaan iklim bersaing yang sehat, yang mengarah pada penguatan industri dan citra kepariwisataan secara keseluruhan. Langkah ini dapat diwujudkan dengan mencitrakan daerah yang kondusif bagi kunjungan wisatawan dalam arti luas.

2. Menggalakan berbagai upaya untuk menarik masuknya investor (baik dalam maupun luar negeri) untuk masuk dalam usaha-usaha kepariwisataan di Kutai Kartanegara.
3. Pengembangan obyek dengan tema-tema khusus, selain untuk menciptakan alternatif pilihan baru bagi wisatawan, juga diharapkan mampu mendorong peluang-peluang usaha dan investasi baru bagi masyarakat.
4. Penciptaan jaringan informasi yang menghubungkan seluruh pelaku pariwisata dan wisatawan serta calon wisatawan secara elektronik, disamping faktor marketing.

Adapun yang menjadi tujuan dari arah pengembangan industri pariwisata di Kutai Karatenagara adalah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan industri pariwisata yang bertumpu pada ekonomi kerakayatan dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dan lingkungan alam.

Sedangkan sasarannya adalah peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesempatan kerja dan usaha serta pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pelestarian nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dalam kerangka “*nation dan charater building*”.

Dari kesadaran yang matang ini akan tumbuh kemampuan untuk menciptakan kesempatan dan kebijakan yang harus dilakukan agar industri pariwisata yang merupakan prioritas pembangunan di Kutai Kartanegara terwujud sukses. Dan potensi kepariwisataan yang memungkinkan harus terus digali dari bumi Kutai Kartanegara sehingga mampu bersaing secara nasional, intraregional dan internasional.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan ditujukan agar pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah mampu mendukung tujuan dan sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun dan ditetapkan setiap tahun merupakan bentuk perencanaan keuangan jangka pendek yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Penyusunan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2009, untuk mencapai kesesuaian antara prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, telah disusun

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Tahun 2009.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009 ditetapkan dengan nilai anggaran sebesar Rp. 4.998.066.115.912,09. melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009. Kemudian melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 16 Desember 2009 telah ditetapkan tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2009 sebesar Rp. 5.180.856.255.259,33. Nilai tersebut pada akhir tahun anggaran mencapai realisasi sebesar Rp. 4.621.078.196.808,87 atau sebesar 89,20%

Selanjutnya *assesment* pencapaian target pengelolaan keuangan daerah tahun 2009 diuraikan diuraikan sebagai berikut :

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang tahun 2009 diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah terutama sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

Pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2009, kebijakan pendapatan daerah lebih bertumpu kepada Dana Perimbangan yang mempunyai alokasi sebesar Rp. 3.406.278.959.801,- yaitu sebesar 94,10% dari nilai Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.619.706.171.801,-.

Berikutnya adalah komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan nilai sebesar Rp. 120.920.137.000,- atau sebesar 3,34%. Sedangkan komponen Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar Rp. 92.507.075.000,- atau 2,56%. Pada Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 3,53% yaitu menjadi sebesar Rp. 3.747.536.224.465,03.

Peningkatan pendapatan daerah ini ditargetkan melalui komponen Pendapatan Asli Daerah dari nilai sebesar Rp. 92.507.075.000,- menjadi Rp. 168.109.223.595,03 atau mengalami peningkatan sebesar 181,73%. Komponen lain yang ditingkatkan targetnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan 190,80% atau sebesar Rp. 230.718.962.692,- dari nilai Rp. 120.920.137.000,-.

Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah disumbang dari komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yaitu dari peningkatan pendapatan penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito serta Penerimaan Lain-lain. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah peningkatan target disumbangkan oleh Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah tahun 2009 menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum memenuhi target yang telah ditetapkan (Tabel 3.1.), disebabkan komponen Dana Perimbangan yang tidak mencapai target yang ditetapkan pada APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2009. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan lain-lain PAD yang sah realisasi mencapai Rp. 196,56 milyar melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,93%.

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009

Kode	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Pendapatan	3.747.536.224.465,03	3.242.718.252.697,78	86,53
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	168.109.223.595,03	196.567.389.225,78	116,93
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	7.077.500.000,00	13.589.546.867,25	192,01
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	39.255.575.000,00	25.360.868.099,17	64,60
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.484.210.057,67	11.464.210057,67	99,83
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.291.938.537,36	146.152.764.201,89	132,51
4.2.	Dana Perimbangan	3.348.708.038.178,00	2.768.412.790.730,00	82,67
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3.310.333.038.178,00	2.730.037.790.730,00	82,47
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	38.375.000.000,00	38.375.000.000,00	100
4.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	230.718.962.692,00	277.738.072.742,00	120,38
4.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.650.000.000,00	107.048.199.990,00	145,35
4.1.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	709.880.692,00	14.330.590.752,00	2.018,73
4.1.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	156.359.082.000,00	156.359.282.000,00	100

Dana Perimbangan mencakup pos Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum mencapai target yang ditetapkan dari nilai Rp. 3,34 trilyun atau hanya mencapai Rp. 2,76 trilyun (82,67%). Sementara untuk pos penerimaan dari sumber pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah dari target Rp. 230,72 miliar realisasi telah melampaui target sebesar Rp. 277,74 milyar atau 120,38%. Dengan demikian target Pendapatan Daerah sebesar Rp.3,74 Triliun hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3,24 trilyun atau mencapai 86,53%.

Struktur pendapatan tersebut menegaskan perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah 2010 adalah perlunya optimalisasi PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah dengan memperhatikan keberlanjutan fiskal dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan PAD tahun mendatang antara lain adalah perlunya percepatan pengembangan ekonomi daerah, pembenahan administrasi perpajakan dan perbaikan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pajak daerah. Selain itu, tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan PAD adalah meningkatkan pelayanan publik, mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, dan memberikan kemudahan perijinan usaha.

B. BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung. **Belanja langsung** adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan untuk belanja langsung ini adalah:

- a. Mengalokasikan belanja untuk pencapaian 8 prioritas pembangunan (*common goals*) pembangunan daerah tahun 2009 yang terdiri :
 - Penanggulangan kemiskinan
 - Percepatan pembangunan perdesaan
 - Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan
 - Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan pendidikan

- Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas serta peningkatan pendapatan petani
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dan ketersediaan energi
 - Konsolidasi organisasi dan aparatur
 - Meningkatkan pengembangan sektor kepariwisataan
- b. Dalam upaya pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen, maka pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memenuhi porsi 20 persen alokasi dana pendidikan dari total belanja APBD tahun 2009 setelah dikurangi dengan kegiatan lanjutan pada tahun berjalan. Sebagai pembanding dalam RAPBN tahun 2009 untuk anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 12,7 persen, sementara pada tahun anggaran 2008 Pemkab Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 16,0 persen.
- c. Belanja Pemeliharaan dan peningkatan digunakan untuk mempertahankan nilai dan fungsi aset yang sudah ada diarahkan pada :
- Prasarana pelayanan dasar seperti revitalisasi gedung dan fasilitas SD, SLTP, SLTA, Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), laboratorium kesehatan, sarana dan prasarana air bersih.
 - Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah, seperti jembatan dan jalan kabupaten, pasar umum dan pasar desa, fasilitas dan sarana perkotaan, sarana perhubungan.
 - Pemeliharaan dan peningkatan sarana pengairan/irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian, sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura, sarana produksi perkebunan, sarana produksi peternakan, sarana produksi perikanan

- Pemeliharaan dan peningkatan sarana penanggulangan bencana, seperti pemadam kebakaran, reklamasi lahan bekas tambang.
- Pemeliharaan dan peningkatan sarana pemerintahan, seperti gedung perkantoran, kendaraan dinas, dan peralatan kerja aparatur.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan untuk belanja ini adalah :

- Mengalokasikan belanja yang wajib/mengikat meliputi belanja pegawai (terdiri dari gaji dan tunjangan daerah PNS)
- Penganggaran belanja pegawai memperhitungkan kemungkinan kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke tiga belas.
- Mengalokasikan belanja untuk perusahaan daerah, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan melalui belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dengan mekanisme seleksi.
- Mengalokasikan belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintahan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Belanja Daerah pada APBD TA. 2009 sebesar Rp. 4.936 Triliun, dalam Perubahan APBD TA. 2009 mengalami perubahan menjadi Rp. 5,180 trilyun atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 244 milyar. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Komponen Belanja Tidak Langsung semula berjumlah Rp. 1,166 trilyun berubah menjadi Rp. 1,358 trilyun.
- Komponen Belanja Langsung semula berjumlah Rp. 3,769 trilyun berubah menjadi Rp. 3,607 trilyun.

- c. Jumlah komponen Belanja semula Rp. 4,936 trilyun berubah menjadi Rp. 5,022 trilyun.

Berkaitan dengan rincian diatas, untuk pengendalian belanja daerah agar tetap berada dalam batas-batas yang masih dapat ditoleransi maka dipandang perlu melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap APBD tahun 2009 yang diarahkan pada pengurangan, pergeseran dan penambahan belanja.

Penambahan alokasi belanja untuk selanjutnya akan di fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang penting dan mendesak yang belum teranggarkan pada tahun 2009 antara lain meliputi :

- a. Kekurangan Gaji, Tunjangan dan Insentif pegawai di 37 SKPD sebesar Rp. 135 Milyar.
- b. Tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 4 Milyar.
- c. Pembebasan lahan di beberapa Kecamatan yang merupakan kegiatan buku putih/Gerbang Dayaku yang belum terbayarkan dengan jumlah 30 kegiatan sebesar Rp. 57 Milyar.
- d. Persiapan pelaksanaan Pemilihan Bupati 2010, berupa pergeseran pagu dana Belanja Tidak Terduga ke dana Belanja Hibah kepada KPUD sebesar Rp. 9,262 Milyar dan pengalokasian kepada PANWASDA Rp. 2,5 Milyar
- e. Tambahan Penunjang PNPM Mandiri Kecamatan sebesar Rp. 7,250 Milyar.
- f. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 1,630 Milyar.
- g. Kegiatan yang belum teranggarkan tahun 2009 sebanyak 94 kegiatan dengan nilai sebesar Rp. 127 Milyar yang diinventarisir sebagai kewajiban yang harus dibayar Pemerintah Daerah yang ada di SKPD Dinas Pekerjaan Umum.
- h. Desk Pilkada sebesar Rp. 1,33 Milyar yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.

- i. Pemutakhiran data persiapan Pemilihan Bupati 2010 sebesar Rp. 750 Juta yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pengurangan alokasi belanja difokuskan kepada :

- a. SKPD yang mempunyai alokasi belanja besar yaitu Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 191 Milyar, Dinas Pendidikan sebesar 64 Milyar, Dinas Perhubungan sebesar Rp. 5,313 Milyar, dan Rumah Sakit Umum Daerah AM Parikesit berkurang sebesar Rp. 19 Milyar.
- b. Kegiatan yang sampai bulan Juli 2009 belum ditender dan kegiatan yang diprediksi tidak terealisasikan sampai akhir tahun anggaran 2009.
- c. Pergeseran belanja difokuskan pada perbaikan administrasi keuangan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2009

Kode	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Belanja	5.022.795.190.035,06	4.000.300.138.358,61	79,64
5.1.	Belanja Tidak langsung	1.415.781.111.251,79	1.309.898.319.263,61	92,52
5.1.1.	Belanja Pegawai	773.967.224.601,79	696.453.749.180,94	89,98
5.1.4.	Belanja Hibah	108.275.984.350,00	102.214.599.350,00	94,40
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	90.440.550.000,00	79.568.300.730,00	87,98
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	439.847.225.000,00	429.936.464.702,67	97,75
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.250.127.300,00	1.725.205.300,00	53,08
5.2.	Belanja Langsung	3.607.014.078.783,27	2.690.401.819.094,00	74,59
5.2.1.	Belanja Pegawai	409.009.606.237,00	241.611.230.477,00	59,07
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	995.206.210.424,46	640.367.749.397,42	64,35
5.2.3.	Belanja Modal	2.202.798.262.121,81	1.808.422.839.220,58	82,10

Realisasi belanja daerah pada tahun 2009 mencapai 79,64 persen dari rencana anggaran belanja daerah. Realiasi Belanja Langsung mencapai 74,59 persen dari rencana anggaran Belanja Langsung, sementara realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai 92,52 persen dari rencana anggaran Belanja Tidak Langsung. Struktur belanja daerah yang menunjukkan persentase Belanja Modal dengan nilai tertinggi dan realisasi sebesar 82,10 persen, lebih tinggi dibanding belanja Barang dan Jasa sebesar 64,35 persen dan berikut belanja Pegawai sebesar 59,07%. Komponen Belanja Tidak Langsung realisasi yang tertinggi adalah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar 97,75% dan Belanja Hibah 94,40%. Berikutnya Belanja Pegawai sebesar 89,98%, Belanja Bantuan Sosial realisasinya sebesar 87,98%, dan terakhir Belanja Tidak Terduga sebesar 53,08%.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Belanja Daerah antara lain adalah:

- a. Belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggunakan anggaran berbasis kinerja sebagai dasar penyusunan anggaran. Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan setiap SKPD dan ketidaktepatan dalam mengalokasikan belanja daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.
- b. Terbatasnya pemahaman aparatur terhadap teknis penyusunan anggaran dan pengalokasian dana terutama dalam penentuan prioritas belanja dengan mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja.
- c. Belum digunakannya standar pelayanan minimal sebagai acuan dalam mengalokasikan anggaran belanja daerah.

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan :

- a. Mengalokasikan pembiayaan penerimaan dari SiLPA tahun yang lalu untuk menutupi defisit.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang pada tahun anggaran 2009, sebagai berikut :
 - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan investasi jangka pendek berupa deposito berjangka pendek dengan memperhitungkan kemampuan dan likuiditas keuangan daerah.
 - Kebijakan umum dalam penganggaran investasi jangka panjang, bahwa penyertaan modal kepada BUMD mempertimbangkan kebutuhan, kualitas manajemen dan kemampuan dalam menghasilkan laba.
 - Kebijakan umum dalam penganggaran investasi non-permanen diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pinjaman modal bergulir (*revolving*).
 - Merevitalisasi dan merestrukturisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Pembiayaan Daerah tahun 2009 adalah sebesar Rp. 1.317 trilyun, dalam Perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar Rp. 38.747 milyar, sehingga pembiayaan daerah menjadi Rp. 1.355 trilyun. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan semula berjumlah Rp. 1,378 trilyun berubah menjadi Rp. 1,433 trilyun.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 61,302 milyar berubah menjadi Rp. 158,061 milyar.

Berkaitan dengan rincian tersebut di atas, untuk pembiayaan penerimaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.960 Milyar yang berasal dari komponen SiLPA. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan mengalami penambahan sebesar Rp. 96,759 milyar yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp. 50 milyar, Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp. 29.615 milyar dan Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 78,445 milyar.

Tabel 3.3. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2009

Kode	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.433.320.030.794,30	1.378.359.944.111,09	96,17
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.433.320.030.794,30	1.378.359.944.111,09	96,17
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	158.061.065.224,27	61.000.000.000,00	38,59
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	78.445.838.234,00	0,00	-
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100
6.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	29.615.226.990,27	11.000.000.000,00	37,14
	Pembiayaan Netto	1.275.258.965.570,03	1.317.359.944.111,09	-
	Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	(559.778.058.450,46)	-

Berdasarkan data-data realisasi baik itu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, maka realisasi APBD Kabupaten Kutai Kartanegara pada akhir TA. 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 3.242.718.252.697,98. Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 4.000.300.138.358,61. Terdapat Belanja Daerah sebesar Rp. 757.581.885.660,63 yang tidak dapat dibiayai oleh Pendapatan Daerah.
- b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yaitu komponen SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) adalah sebesar Rp. 1.378.359.944.111,09. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah Rp. 61.000.000.000,- sehingga Pembiayaan Netto diperoleh sebesar Rp. 1.317.359.944.111,09. Pembiayaan Netto ini digunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah sebesar Rp. 757.581.885.660,63. Sehingga terdapat SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan) sebesar Rp. 599.778.058.450,46 yang merupakan nilai APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2009 yang tidak terealisasi.
- c. Sehingga jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA. 2009 adalah sebesar Rp. 4.621.078.196.808,87 dari total APBD sebesar Rp. 5.180.856.255.259,33 atau terealisasi sebesar 89,20%.

BAB IV.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik dengan sederhana dan cepat.

Dalam RPJMD 2005-2010, melalui vitaliasi dan aktualisasi Gerbang Dayaku menitik beratkan pada tiga pilar pemberdayaan; (1) Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum, (2) Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi, (3) Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.

Ketiga pilar pemberdayaan tersebut, menitikberatkan pada optimalisasi pemberdayaan semua komponen; pemerintahan, masyarakat dan ekonomi yang bersinergi dalam membangun daerah. Melalui pemberdayaan ketiga komponen tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian sesuai dengan amanat rakyat. Untuk itu dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, pemerintah juga memberdayakan seluruh komponen pelaku ekonomi, baik masyarakat, pengusaha maupun para pemilik modal yang ingin menanamkan

modalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan demikian, sinergi antara ketiga komponen tersebut diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan berkualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut harus dilakukan perubahan terhadap cara-cara melaksanakan kegiatan pembangunan. Perubahan menuju Kutai Kartanegara yang lebih baik, yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut merupakan amanah reformasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan dijalankan bersama, serta merupakan ceminan suara dan harapan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2009 upaya pembangunan daerah sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2005-2010 dan kelanjutan pelaksanaan pembangunan tahun 2009, dengan tema **“MENGHASILKAN PEMERINTAHAN KABUPATEN YANG BAIK DAN BERSIH BERLANDASKAN ASAS KEADILAN, KESETARAAN, KERAGAMAN DAN DEMOKRASI MENUJU TERBENTUKNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA”**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal sebagaimana tertuang dalam *“Grand Strategy”* yang dikenal dengan Program Gerbang Dayaku, maka Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan ke dalam tiga bidang pengembangan yaitu : 1) peningkatan sumber daya manusia, 2) pengembangan agrikultur dan 3) pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.

Dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No. 3 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka pelaksanaan program - program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sbb :

I. URUSAN WAJIB

i. PENDIDIKAN ;

Perkembangan penduduk harus diikuti dengan kemampuan pendidikan, agar penduduk menjadi lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan SDM dari luar daerah. Sebagai cermin peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka-angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan penduduk dan angka melek huruf.

Partisipasi sekolah merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pemerintah dibidang Pendidikan. Semakin banyak anak usia sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor Pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak usia sekolah yang masih sekolah cenderung menurun maka program pemerintah dapat dinilai gagal.

1. Program dan Kegiatan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara maka pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencanangkan berbagai program yang berhubungan dengan pengembangan pendidikan antara lain melalui.

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah (Muara Muntai)
(Bantuan Keu. Prov. Ta. 2009)

- 2) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- 4) Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini
- 5) Pembangunan TK Dahlia Desa Sidomulyo
Kec.Tabang (Lanjutan)
- 6) Pengadaan Meubelair Sekolah (Bantuan Keuangan
Provinsi APBD TA. 2009)
- 7) Bantuan Tutor PAUD (Bantuan Keuangan Provinsi
APBD-P TA. 2009)

**b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan
dan Pemanfaatan Tanah**

- 1) Pembebasan (Ganti Rugi) Lokasi Bangunan SD
Bendang Raya Seluas $\pm 14.040 M^2$ di Kec. Muara
Badak kab. Kukar
- 2) Pembebasan Lahan Kec. Muara Muntai dan Loa
Janan
- 3) Pembebasan Lahan Kec. Muara Badak
- 4) Pengurukan Tanah di Madrasah Al-Idrus Kec.
Tenggarong
- 5) Pengadaan Lahan Lokasi Pembelajaran Lingkungan
Alam dan Education Center
- 6) Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Gedung
SMP 1 Fillial Rempanga Kec. Loa Kulu
- 7) Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk SD
Kec. Tenggarong dan Loa Janan

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- 1) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Kec. Kota Bangun, Kembang Janggut, Kenohan, Tabang.
- 2) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah (2 Sekolah) (Bantuan Keuangan Prov)
- 3) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Marang Kayu, Anggana, Muara Badak.
- 4) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (7 Sekolah) (Bantuan Keuangan Prov)
- 5) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 6) Pengadaan Meubelair Sekolah
- 7) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 8) Pengembangan Sekolah Satu Atap SD/SMP
- 9) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
- 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 11) Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- 12) Penyediaan Beasiswa Retrieval Untuk Anak Putus Sekolah
- 13) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Kota Bangun, Muara Muntai, Tenggarong, Tabang, Tenggarong Seberang
- 14) Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
- 15) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan Kit IPA Paket Interaktif untuk SD/MI) (13 Sekolah) (Bantuan Keuangan Prov)
- 16) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan Indeks Al-Qur'an Terjemah untuk SD/MI) (34 Sekolah) (Bantuan Keuangan Prov)

- 17) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pengadaan Kit IPS Paket Interaktif untuk SD/MI) (13 Sekolah) (Bantuan Keuangan Prov)
- 18) Pengadaan Marcing Band SDN 002 Unggulan (Gita Wibawa Dewantara) Tenggara
- 19) Penambahan ruang kelas sekolah Kec. Anggana, Tenggara Seberang, Loa Janan
- 20) Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk SD Kec. Tenggara dan Loa Janan
- 21) Penambahan ruang kelas sekolah Kec. Muara Badak, Muara Jawa, Loa Kulu.
- 22) Penambahan ruang kelas sekolah Kec. Kota Bangun, Muara Wis, Kembang Janggut, Muara Kaman
- 23) Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan kelengkapannya Kec. Samboja, Tenggara Seberang
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Kec. Tgr. Seberang, Anggana, Muara Jawa, Samboja, Muara Badak, Marang Kayu, Loa Kulu, Loa Janan.
- 25) Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah Kec. Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Kaman, Kenohan, Loa Janan, Tenggara.
- 26) Penambahan ruang kelas sekolah, Perpustakaan dan UKS Kec. Muara Wis, Muara Jawa, Samboja, Tenggara Seberang, Muara Kaman, Muara Badak.
- 27) Rehabilitasi sedang/berat (DAK) Tahun Anggaran 2009
- 28) Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir Kec. Tenggara Seberang, Loa

- Kulu, Muara Kaman, Anggana, Tabang, Loa Janan, Kembang Janggut, Kota Bangun, Muara Badak
- 29) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Tenggarong, Loa Kulu
 - 30) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Loa Janan, Muara Jawa, Anggana, Sanga-Sanga, Muara Badak, Samboja.
 - 31) Pembangunan Gedung Sekolah (Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun) Kabupaten Kutai Kartanegara (Pembangunan Gedung Sekolah SD Terpadu) Bantuan Keuangan Provinsi
 - 32) Rehabilitas Ringan / Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (Lanjutan)
 - 33) Pembangunan/ Rehabilitasi Total Gedung SD di 18 Kecamatan (Lanjutan)
 - 34) Pemb Kantor, Musholla dan WC SDN 005 Tenggarong (Lanjutan)
 - 35) Pembangunan/ Rehabilitasi Total Gedung Sekolah (SD/MI) (Lanjutan)
 - 36) Rehabilitasi Ringan Gedung Sekolah Dasar (Lanjutan)
 - 37) Pemb USB, RKB, IAB, RPL, Pagar dll TK, SD/MI, SMP/MTs (Lanjutan)
 - 38) Rehabilitas Total Gedung SDN No. 036 Kota Bangun, SDN No. 005 Loa Kulu, SDN No.015 Marangkayu & Pemb (Lanjutan)
 - 39) Pembangunan/Rehabilitasi Total SDN 001 Muara Wis (Lanjutan)
 - 40) Pembangunan/Rehabilitasi Total Gedung Sekolah Dasar (SD/MI) (Lanjutan)

- 41) Pembangunan USB, RKB, LAB, RPL, Pagar DII TK, SD/MI. SMP/MTS (Lanjutan)
- 42) Rehab SMPN 1 Muara Badak (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 43) Rehabilitasi Total Gedung Sekolah SDN 003 Bila Talang (Lanjutan Kegiatan TA. 2008)
- 44) Pembangunan Gedung SDN 002 Muara Muntai Ilir (Lanjutan Kegiatan TA. 2008)
- 45) Rehabilitasi Total Gedung SDN 001 Sanga Sanga (Lanjutan Kegiatan TA. 2008)
- 46) Pembangunan RKB SMPN 1 Sebulu (Lanjutan Kegiatan TA. 2008)
- 47) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung SDN 003 Kec. Tabang dan SDN 001 Kec. Sanga Sanga
- 48) Penambahan RKB Sekolah Kec. Samboja dan Kota Bangun
- 49) Pembangunan Ruang Kantor, Guru SMP YPK 1 Tenggarong (lanjutan)
- 50) Pembangunan SLTPN 2 Tenggarong (Tahap II) (lanjutan)
- 51) Pembangunan Ruang Belajar SDN 003 Kecamatan Muara Badak (lanjutan)

d. Program Pendidikan Menengah

- 1) Pembangunan Gedung Sekolah (SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang)
- 2) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Program Pendidikan Menengah) Pembangunan RKB SMKN 3 Tenggarong (Bantuan Keuangan Prov)

- 3) Pemb. Lab & R. Praktikum Sekolah (Program Pendidikan Menengah) Pembangunan Ruang Lab. Dan Praktikum (SMK YPK Tenggara) (Bantuan Keuangan Prov)
- 4) Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Program Pendidikan Menengah) SMAN 2 Tenggara (Bantuan Keuangan Prov)
- 5) Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Program Pendidikan Menengah) SMAN 2 Tenggara Seberang (Bantuan Keuangan Prov)
- 6) Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa
- 7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 8) Pengadaan Mebeluer Sekolah
- 9) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 10) Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah
- 11) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa I-Tutornet
- 12) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
- 13) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 14) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk SMK
- 15) Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 16) Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- 17) Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah Muara Muntai, Kota Bangun
- 18) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Kota Bangun, Samboja, Tabang, Muara Wis

- 19) Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan kelengkapannya Kec. Muara Wis
- 20) Pengadaan Alat Marching Band untuk SMKN 3 Tenggarong
- 21) Rehabilitasi Sedang/berat Bangunan Sekolah Kec. Muara Jawa
- 22) Pengadaan Alat Praktek Peraga Siswa (Lab. Bahasa Wireless)
- 23) Pembangunan Gedung Sekolah Kec. Muara Kaman, Tenggarong, Loa Janan, Kembang Janggut, Samboja, Loa Janan, Muara Badak
- 24) Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir Kec. Tenggarong Seberang dan Anggana
- 25) Pembebasan Lahan untuk SMA dan SMK Marang Kayu
- 26) Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) untuk SMA
- 27) Rehabilitasi Gedung SMA/MA (Lanjutan)
- 28) Pembangunan Aula, Pagar dan Rumah Guru SMUN Kembang Janggut (Lanjutan)
- 29) Pembangunan Lanjutan Gedung Sekolah SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 30) Pemb. USB, RKB, LAB, RPL, Pagar Dll SMA/MA/SMK (Lanjutan)
- 31) Pembangunan Gedung Sekolah SMAN 3 Unggulan (Luncuran)
- 32) Pembangunan SMK Duta Bangsa Samboja (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)

- 33) Penambahan RKB SMK Muhammadiyah Kec. Sanga Sanga (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 34) BOSDA SMA / SMK / MA (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 35) Pembebasan Lahan dan Halaman Jalan SMK Pesisir Sanipah Kec. Samboja
- 36) Lanjutan pembangunan SMA Filial Negeri 1 Samboja (lanjutan)
- 37) Pembangunan SMU 3 Tahap II Kota Bangun (lanjutan)
- 38) Pembangunan 4 RKB Laboratorium + Penambahan Ruang SMUN 1 Kec. Tenggarong (lanjutan)
- 39) Pembangunan Gedung Sekolah Pendidikan Menengah Tunas Etam Tgr. Seberang (lanjutan)
- 40) Pembangunan SMUN 2 Desa Tanjung Limau (lanjutan)
- 41) Rehab Gedung Sekolah (SLTPN 2, SMUN 1, SMUN 2) Tenggarong (Lanjutan)
- 42) Pembangunan Madrasah Ibtidaiyah (Hasaniah) Desa Bangun Rejo Tenggarong Seberang

e. Program Pendidikan Non Formal

- 1) Keaksaraan Fungsional (KF)
- 2) Operasional Planetarium Jagad Raya
- 3) Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD
- 4) Pendidikan Kesetaraan Paket B Setara SLTP
- 5) Pendidikan Kesetaraan Paket C Setara SMU
- 6) Keaksaraan Fungsional (KF) Mobilitas Mobil Pintar

- 7) Pengadaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKB Muara Jawa
- 8) Kecakapan Hidup Pelatihan Bordir Batik Kaltim SKB Muara Jawa
- 9) Kecakapan Hidup Pelatihan Salon Kecantikan SKB Muara Jawa
- 10) Kecakapan Hidup Pelatihan Multimedia SKB Muara Jawa
- 11) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKB Kota Bangun
- 12) Pelatihan Menjahit SKB Kota Bangun
- 13) Pelatihan Las SKB Kota Bangun
- 14) Pelatihan Pertanian SKB Kota Bangun
- 15) Kecakapan Hidup Pelatihan Bordir SKB Tenggara
- 16) Kecakapan Hidup Pelatihan Multimedia SKB Tenggara
- 17) Pengadaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKB Tenggara
- 18) Kecakapan Hidup Budi Daya Lebah Madu SKB Tenggara
- 19) Bantuan Tutor PAUD (Pendamping APBD-P Provinsi)
- 20) Workshop Penyelenggaraan Pengelola PAUD
- 21) Pembekalan Teknis PNFI Tutor Keaksaraan Fungsional
- 22) Pendampingan BOSDA SMA / MA / SMK
- 23) Workshop Manajemen Pengelolaan SMK se-Kab. Kukar
- 24) Monitoring Evaluasi dan Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C
- 25) Studi Orientasi Pemberantasan Buta Aksara

26) Monitoring dan Evaluasi Sistem Pendataan Pada 18 Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- 2) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
- 3) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (Mahasiswa Angkatan 2007)
- 4) Kegiatan Pemiihan Guru Dan Pengawas Berprestasi TK, SD, SLTP dan SLTA
- 5) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (TK,SD,SLTP dan SLTA)
- 6) Pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP/SMA
- 7) Rakor Pengawas SLTP/SLTA
- 8) Rakernis Pendidikan Kab. Kukar
- 9) Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (Mahasiswa Angkatan 2006)
- 10) PJI (Prestasi Junior Indonesia)
- 11) Program Quantum Learning
- 12) Training Da'i untuk Pelajar
- 13) Sistim Informasi Pendidikan Berbasis GIS Tahap II
- 14) Pembuatan Profil Pendidikan 18 Cabang dan Profil Pendidikan Kabupaten
- 15) Safe Guard untuk Tim BOS Kabupaten
- 16) Peningkatan Mutu Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Kab. Kukar

- 17) Pendataan dan Verifikasi NUPTK
- 18) Pendataan dan Verifikasi NISN
- 19) Fit and Proper Test dan Pendidikan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 1) Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- 1) Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan Di Bidang Pendidikan
- 2) Pengawasan Pelayanan Pendidikan Sekolah TK/SD
- 3) Pengawasan Pelayanan Pendidikan Sekolah SMP/SMA
- 4) Kegiatan Perencanaan, Pendataan, Pembinaan dan Penginformasian Pendidikan
- 5) Kegiatan Pengelolaan PAK Untuk Kenaikan Pangkat Guru TK/SD, SMP, SMA dan SMK
- 6) Pendataan Aset Pada 18 Cabang Dinas Pendidikan Dan Sekolah
- 7) Subsidi Penyelenggaraan Ujian Nasional Dan Ujian Sekolah Tahun 2008/2009
- 8) Subsidi Mobilitas Sekolah Dasar Negeri Se Kab.Kukar (Pengganti DPP-SDN)
- 9) Subsidi Pendidikan Untuk TK, SMA/MA/SMK Negeri Swasta Se Kab. Kukar

- 10) Subsidi Penyelenggaraan Semester SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK Negeri Swasta Se Kab. Kukar
- 11) Subsidi Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2008/2009
- 12) Subsidi Mobilitas TKN, SDN-LB, SDN, SMPN SATAP, SMPN, SMAN, dan SMK Negeri Se Kab. Kukar
- 13) Subsidi Mobilitas Pengembangan SMAN 3 Unggul Tenggara Seberang
- 14) Subsidi Mobilitas Pengembangan SMKN Agro Tenggara Seberang
- 15) Subsidi Mobilitas SD Kunjung
- 16) Pembangunan Gedung Baru Kampus Unikarta
- 17) Pembangunan Lanjutan Gedung Perkuliahan Yayasan Kudungga
- 18) Pendidikan Formal (Insentif : Certificate in Applied English Language and Teaching di Kecamatan Se Kukar
- 19) Pengadaan Buku Rapor
- 20) Sosialisasi Pembuatan SPJ dan RKA untuk Mobilitas Sekolah

i. Program Pendidikan Tinggi

- 1) Pembangunan Gedung Kampus Unikarta (Lanjutan)
- 2) Pembangunan RKB Perkuliahan D2 PGSD Kudungga (Lanjutan)

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2009 pada bidang Pendidikan dapat dilihat dari tingkat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan antara lain Indek Kinerja Kunci pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mencapai 97%, Penduduk usia 15 tahun melek huruf sebesar 73,47%, Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SD, SMP dan SMA masing-masing sebesar 78,36%, 81,34% dan 81,37%. Sementara untuk Angka Putus Sekolah (APS) pada tingkat SD, SMP dan SMA masing-masing dibawah 1%.

Disamping itu juga untuk Angka Kelulusan (AL) pada tingkat SD, SMP dan SMA mencapai rata-rata diatas 99 %, sedangkan banyaknya lulusan yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dari SD ke MSP mencapai 100 % serta dari SMP ke SMA mencapai 97 % dengan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai 50,87 %

Sedangkan apabila ditinjau dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

- a. **Program Pendidikan Anak Usia Dini** dengan Anggaran Sebesar Rp. 2.464.658.500,00 dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 1.754.111.500,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 710.547.000,00 yang meliputi Pembangunan Gedung Sekolah, Pengadaan Alat Praktik, Meubelair Sekolah, Kegiatan Sekolah dan Bantuan Biaya Sekolah
- b. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun** dengan Anggaran Sebesar Rp. 99.320.308.922,00

dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 85.294.534.153,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 14.025.774.769,00 yang meliputi Pembangunan Gedung Sekolah, Rehabilitasi Ringan/Sedang/Berat Gedung Sekolah, Pembangunan Laboratorium, Ruang Praktikum Sekolah, Perpustakaan Sekolah dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa, Pengadaan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa tidak mampu, Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dan Bantuan Biaya bagi Sekolah dan Tenaga Pendidik

- c. **Program Pendidikan Menengah** dengan Anggaran Sebesar Rp. 88.248.171.077,00 dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 65.580.330.160,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 22.667.840.917,00 yang meliputi Pembangunan Gedung Sekolah, Rehabilitasi Ringan / Sedang / Berat Gedung Sekolah, Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah, Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa, Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa, Pengadaan Meubelair Sekolah, Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik dan Bantuan bagi Sekolah dan Tenaga Pendidik
- d. **Program Pendidikan Non Formal** dengan Anggaran Sebesar Rp. 3.929.455.799,00 dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 3.199.325.936,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 730.129.863,00 yang meliputi Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C, Biaya Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Planetarium Jagad Raya, Pelatihan di

- bidang Non Formal seperti Menjahit, Salon Kecantikan, Las dan Bordir Batik, Mobilitas Mobil Pintar, Kegiatan yang bersifat Non Formal dan Bantuan Biaya bagi Sekolah SMK dan Tenaga Pendidik
- e. **Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan** dengan Anggaran Sebesar Rp. 12.990.200.000,00 dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 7.283.569.575,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 5.706.630.425,00 yang meliputi Sertifikasi Pendidik, Pendidikan Lanjutan bagi Tenaga Pendidik, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kegiatan yang berhubungan dengan Tenaga Pendidik, Kegiatan Siswa Sekolah Seperti Prestasi Junior Indonesia (PJI), Quantum Learning dan Training Da'i
 - f. **Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** dengan Anggaran Sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan Realisasi Per-Desember 2009 Sebesar Rp. 83.159.314,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 16.840.686,00 yang meliputi Kegiatan Pemasarakatan untuk Minat dan Kebiasaan Membaca Buku
 - g. **Program Manajemen Pelayanan Pendidikan** dengan Anggaran Sebesar Rp. 93.856.988.600,00 dengan Realisasi Anggaran Per-Desember 2009 Sebesar 80.083.628.058,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 13.773.360.542,00 yang meliputi Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pengelolaan PAK untuk Kenaikan Pangkat Guru, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Bantuan Biaya Bagi Sekolah di Kab. Kutai Kartanegara
 - h. **Program Pendidikan Tinggi** dengan Anggaran Sebesar Rp. 23.645.159.040,00 dengan Realisasi Anggaran Per-

Desember 2009 Sebesar Rp. 18.771.379.480,00 dan Sisa Anggaran Sebesar Rp. 4.873.779.560,00 yang meliputi Pembangunan Gedung Kampus dan Perkuliahan Yayasan di Kab Kutai Kartanegara

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada pada urusan pendidikan adalah kondisi bangunan sekolah banyak yang tidak layak, selain itu jumlah RKB tidak sesuai dengan rombongan belajar dan fasilitas penunjang (perpustakaan, Laboratorium, UKS, Ruang guru dan instalasi listrik) tidak memadai.

Solusinya perlu adanya pembangunan gedung sekolah baru, rehabilitasi berat / ringan dan pemasangan instalasi listrik pada beberapa gedung sekolah yang sudah ada namun masih kekurangan perlengkapan.

ii. KESEHATAN;

Untuk meningkatkan mutu serta jumlah sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, maka pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan dana untuk membiayai program dan kegiatan antara lain :

1. Program dan Kegiatan

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- 1) Pengadaan Obat-obatan
- 2) Pengadaan Alat Kesehatan

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
- 2) Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
- 3) Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
- 4) Perbaikan Gizi Masyarakat
- 5) Revitalisasi Sistem Kesehatan
- 6) Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 7) Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- 8) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana
- 9) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
- 10) Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
- 11) Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
- 12) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 13) Monitoring Kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 14) Pelatihan Pertemuan dan Kaji Banding Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 15) Operasional Pelaksanaan Akademi Kebidanan Kutai Husada
- 16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 17) Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 18) Pelayanan Kesehatan Khusus
- 19) Sistem Manajemen Mutu
- 20) Persiapan Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 21) Operasional Pelayanan Puskesmas 24 Jam

22) Kunjungan Dokter Spesialis / Perawat Ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit AM Parikesit

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- 1) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- 2) Peningkatan Imunisasi
- 3) Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
- 4) Peningkatan Imunisasi

d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- 1) Pengembangan Dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
- 2) Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

e. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

- 1) Pembangunan Puskesmas
- 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarna Pelayanan Kesehatan (DAK)
- 5) Pendamping Dana Alokasi Khusus Pengadaan Sarana dan Prasarna Pelayanan Kesehatan

- 6) Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Sarana Kesehatan (DAK)
 - 7) Pendamping Dana Alokasi Khusus Pembangunan, Renovasi dan Rehabilitasi Sarana Kesehatan
 - 8) Pengadaan Mesin Fooging di Kab. Kukar
- f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**
- 1) Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
 - 2) Kemitraan Peningkatan Pendidikan Lanjutan Paramedis
 - 3) Kemitraan ahli tehnologi kedokteran dan kesehatan
- g. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan**
- 1) Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restaurant
- h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**
- 1) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
- i. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin**
- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
 - 2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (ABT)

- 3) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin

j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- 1) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
- 2) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
- 3) Pengembangan Tipe Rumah Sakit
- 4) Pengadaan Alat-alat Medis RSUD Tenggarong (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 5) Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)
- 6) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
- 7) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
- 8) Pengadaan Alat Pengatur Tegangan Listrik (Stabilizer)
- 9) Pengembangan SIM-RS
- 10) Perencanaan Pembangunan Ruang Rawat Inap
- 11) Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Unit Transfusi Darah RS (UTDRS)
- 12) Pembangunan RSUD Kota Bangun (Lanjutan)
- 13) Pembangunan Rumah Sakit Umum Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 14) Persiapan Pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Desa Tanah Datar Kec. Muara badak

k. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit

I. Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Medis dan Non Medis

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan tahun 2009 pada urusan Kesehatan, tingkat pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal dengan capaian sebagai berikut :

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 5,4% atau sebanyak 526 dari 9.824 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas.
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 59,37% atau 7.743 ibu bersalin yang ditolong dari sasaran ibu bersalin sebanyak 13.041.
- Cakupan desa/kelurahan UCI dengan tingkat pencapaian 55,5% atau 126 desa/kelurahan dari total 227 desa/kel yang ada.
- Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 0,72% atau 15 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 2.096 kasus balita gizi buruk.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 2% atau 256 orang penderita TBC+ yang ditemukan dan diobati dari 12.171 penderita baru TBC BTA+.
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD sebesar 100 persen dari 771 penderita DBD yang ditemukan.

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 22,47% atau 2.320 KK masyarakat miskin yang berkunjung ke Puskesmas dari 10.325 KK masyarakat miskin yang ada.
- Cakupan kunjungan bayi sebesar 21% atau 1.733 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan dibanding jumlah kelahiran sebanyak 8.440 bayi.

Sementara apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.800.000.000,- dapat diserap sebesar Rp. 3.761.212.200,- dipergunakan untuk distribusi obat-obatan dan Alat-alat kedokteran untuk 28 Puskesmas di Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 30.851.659.963,- dapat terserap sebesar 90,21% atau Rp. 27.843.464.609,- dengan capaian indikator kinerja berupa pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin sebanyak 120.035 jiwa, Pemberian Gizi Tambahan 30 Balita, Revitalisasi Kesehatan terhadap 63 orang, Peningkatan pelayanan kesehatan di 28 Puskesmas, Penanganan Kesehatan bagi 16.000 org pengungsi korban bencana.
- c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan anggaran sebesar Rp. 3.311.197.400,- dapat dilaksanakan sebesar Rp. 3.145.444.600,- atau 98,73% yang dipergunakan untuk Supervisi Monitoring Penyakit di 28 Puskesmas dan penanganan Gawat Darurat

- DBD, Mikroskopis Malaria, VCT, TBC, Filariasis dan Kondisi Luar Biasa (KLB) untuk 5 Kecamatan.
- d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dapat memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 1.359.923.000,- untuk Perencanaan Kesehatan, Monitoring dan Bimtek, Konsultasi Perencanaan di 5 Puskesmas serta Sertifikasi ISO dan Akreditasi pada RSUD Abadi Samboja.
 - e. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 23.350.505.582,- dapat terealisasi sebesar Rp. 20.207.841.379,- atau 86,54% yang pemanfaatannya dipergunakan untuk pembangunan 2 buah Puskesmas; Rehab Rumah Dinas Dokter, Pusban, Puskesmas 25 Unit; Pengadaan Mesin Pogging 25 Unit;
 - f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.011.185.000 dapat dilaksanakan sebesar 86,55% atau Rp. 3.471.485.000,- yang dipergunakan untuk kerjasama Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Paramedis 30 Orang, Kemitraan ahli teknologi kedokteran dan kesehatan.
 - g. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dapat terealisasi Rp. 293.786.000,- atau 97,93% untuk Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri, Produksi Rumah Tangga dan Restaurant di 18 Kecamatan.
 - h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang mendapat alokasi sebesar Rp. 7.302.294.000,- dan dapat diserap sebesar Rp. 7.109.844.114,- atau 97,36% untuk

Biaya Perawatan, Sunat Massal, Pengobatan Massal, Operasi Bibir Sumbing dan Operasi Lainnya bagi 7.100 Orang.

- i. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan alokasi dana mencapai Rp. 34.391.866.168,- namun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.234.326.103,- atau 44,29% yang dipergunakan untuk pengadaan alat-alat Rumah Sakit berupa Phacoemulification 1 Set, Operating Microscop 1 Set, Biometry 1 Set, Tempat tidur Pasien 40 Unit, Bed Side Cabinet 40 Unit, Over Bed Table 40 Unit, Scoope Stretcher 10 Unit, Hemodialisa 1 Set, Alat Kesehatan Anak, Alat Kesehatan Fisioterapi, CT-Scan 3 Paket; Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit; Pengadaan alat-alat Medis RSUD berupa Tempat Tidur Pasien 16 Unit, Bed Side Cabinet 16 Unit, Over Bed Table 16 Unit, Hematology Analyzer 5 Dip 1 Unit serta Pengadaan Peralatan Unit Transfusi Darah RS (UTDRS).
- j. Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis dengan alokasi sebesar Rp. 1.724.050.371,- dapat diserap sebesar Rp. 1.713.993.889,- atau 99,41% untuk Jasa Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Jalan Untuk Medis, Paramedis dan Non Medis selama 7 Bulan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum optimal disebabkan oleh distribusi tenaga kesehatan ; dokter umum, dokter gigi, bidan dan perawat masih belum merata.

Sebagai akibat dari permasalahan tersebut Dinas Kesehatan dan Puskesmas mempekerjakan tenaga setempat (tenaga kesehatan lokal) yang mempunyai kompetensi teknis kesehatan seperti dokter umum, perawat, bidan sebagai tenaga kesehatan yang tugasnya untuk melayani masyarakat.

iii. **LINGKUNGAN HIDUP;**

1. **Program dan Kegiatan**

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- 1) Pemantauan Kualitas Lingkungan
- 2) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
- 3) Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- 4) Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
- 5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
- 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- 1) Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA

- 2) Bantuan dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Kalimantan Timur Hijau (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P Ta. 2009)

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- 1) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
- 2) Pemantauan Kualitas Air DAK Non DR TA 2009

e. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- 1) Pembuatan Papan Hibauan dan Renovasi Papan Hibauan
- 2) Renovasi TPS Dalam Kota Tenggara
- 3) Pengadaan Kendaraan Mobil Dinas Operasional KKPP
- 4) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua Tehnis Lapangan Pengawas Kebersihan.
- 5) Pelatihan Pengelolaan Persampahan 3R (Re-Duce, Re-Use, Re-Cycle)
- 6) Pengadaan Tong Sampah dan Rehabilitasi Container Serta Gerobak Sampah.

f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- 1) Pemeliharaan RTH
- 2) Pembuatan Taman di Halaman Taman Jam Bentong Tenggara
- 3) Pembuatan Pot Bunga
- 4) Pembuatan dan Perbaikan Ornamen Taman Dalam Kota Tenggara

- 5) Peremajaan/Tambal Sulam Taman Bawah Jembatan Tenggarong Seberang.
- 6) Peremajaan/Tambal Sulam Taman Median Tenggarong Seberang s/d Desa Bukit Raya
- 7) Peremajaan/Tambal Sulam Taman Halaman Mesjid Agung
- 8) Pengadaan Bibit Tanaman
- 9) Pembuatan Taman Pada Museum Mulawarman
- 10) Pembuatan Lapangan Parkir, Taman, Box Culvert Pagar dan Sarana Penunjang

g. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- 1) Pemagaran Kuburan Muslimin Mangkunegara Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong.
- 2) Pemagaran Kuburan Muslimin Kelurahan Sukarame dan Pengurukan Kuburan Muslimin Rondong Demang Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pendayagunaan Sumber Daya Alam Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur pokok untuk kesejahteraan rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Sebagai implementasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup tersebut, kinerja yang ditunjukkan dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang mencapai

23,5% serta dalam penegakan hukum lingkungan telah menyelesaikan 53,1% kasus lingkungan yang diselesaikan.

Sementara keluaran yang dihasilkan dalam bidang Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan serapan anggaran sebesar Rp. 821.780.310,- atau 98,28% dari alokasi sebesar Rp. 836.133.310,- yang dipergunakan untuk pemantauan lingkungan di 14 Titik Pengamatan, pengawasan kebijakan lingkungan pada 18 Objek/Kasus 8 Titik, Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di 25 Perusahaan dan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah
- b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan anggaran sebesar Rp. 100.898.000,- dapat diserap sebesar Rp. 99.948.000,- atau 99,06% yang dimanfaatkan untuk Pengadaan Biji / Propagule Mangrove 45.000 Buah.
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.017.948.170,- dapat dimanfaatkan 90,92% atau sebesar Rp. 925.593.800,- dengan keluaran berupa Pembuatan dan Renovasi Papan Himbauan 10 Unit, Rehabilitasi TPS Komunal 10 Unit, Pembangunan TPS Komunal 15 Unit, Mobil Dinas Operasional KKPP 2 Unit, Tong Sampah Taman 40 Buah, Rehabilitasi Container dan Gerobak Sampah 1 Paket, Pembuatan Gerobak Sampah 8 Buah.
- d. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp. 5.946.959.130,- dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 5.493.016.900,- atau 92,37%

- untuk pemeliharaan RTH di 21 Lokasi, Pemeliharaan Taman, Pengadaan Bunga dan Pembuatan Pot Bunga, Perbaikan Ornamen Tanaman serta Pembuatan Lapangan Parkir, Taman, Box Culvert Pagar dan Sarana Penunjang.
- e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan alokasi sebesar Rp. 578.050.000,- dan realisasi mencapai 89,93% atau sebesar Rp. 519.849.000,- yang dimanfaatkan untuk Pemagaran dan pengurukan Kuburan di 3 lokasi.

3. Permasalahan dan Solusi

Selama ini dalam melaksanakan pengawasan Lingkungan terdapat adanya kesulitan didalam meninjau langsung kondisi lapangan di perusahaan - perusahaan yang terdapat kasus - kasus lingkungan yang diadukan oleh masyarakat ke BLHD di 18 Kecamatan. Demikian juga dengan alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pengawasan Lingkungan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada perlu tersedia sarana mobil Double Cabin Lapangan untuk meninjau lokasi yang dimaksud. Sementara anggaran untuk BLHD perlu mendapat tambahan sesuai dengan program nasional dan provinsi untuk mengatasi permasalahan Lingkungan

iv. PEKERJAAN UMUM;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- 1) Pembuatan Jembatan Ulin dusun Pendamaran Kec Kenohan

- 2) Penggantian Jembatan Ulin Kartini-Panjaitan Menjadi Jembatan Beton Tenggara
- 3) Lanjutan Pembangunan Jalan Pendekat Pile Slab Jembatan Martadipura Kec. Kota Bangun
- 4) Pembangunan Jembatan 18 Buah Kelekat - Tabang
- 5) Pembangunan Jalan Kelekat - Tabang Tahap II
- 6) Pembangunan Jembatan Pela Kota Bangun
- 7) Perencanaan Pembangunan Jalan Tenggara - Samboja/perbatasan dengan Balikpapan
- 8) Pembangunan Jalan Dari Ma. Wis Ke Ma. Muntai (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 9) Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin di Toko Lima Kampung Dagang Kec. Ma. Badak (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 10) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Santan Tengah (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 11) Rencana Design Pembangunan jembatan Kontruksi Beton Jalan Akses Menuju Kaveleri I Kec. Semboja
- 12) Pembuatan Jembatan Ulin Ds. Badak Ulu Ma. Badak (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 13) Lanjutan Pembuatan Badan Jalan S.Bawang-Badak Mekar Kec Muara Badak
- 14) Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Ing Martadipura
- 15) Perencanaan Pembangunan Jembatan Muara Kaman Ulu -Muara Kaman Seberang
- 16) Pembuatan Jembatan Beton Kuburan Muslimin antara Desa Badak Ulu - Badak Ilir Kec. Muara Badak

- 17) Pembangunan jalan Lintas Kecamatan Muara Badak - Kec. Anggana
- 18) Pemb. Jembatan Ulin Dusun Salok Lai Muara Badak Ilir (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 19) Lanjutan pembangunan jalan poros Martadipura 2 dari jembatan menuju ke Desa Sebelimbingan
- 20) Lanjutan pembangunan jalan poros Martadipura 2 dari Simpang Tiga Tubuhan ke Simpang Tiga Tuana Tuha
- 21) Pembuatan badan jalan dan perkerasan RT 11 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak
- 22) Pembuatan badan jalan dan pengerasan Rt. 12 Desa Tanjung Limau Muara Badak
- 23) Pembuatan Badan Jalan RT 12 Desa Tanah Datar Kec Muara Badak
- 24) Pembuatan Jembatan Desa Tanjung Limau Sambera Kec. Ma Badak
- 25) Peningkatan jalan SMK Pesisir Kel. Senipah Kec. Samboja
- 26) Perencanaan Teknis jalan Bekotok - Tanjung (7 km) Kec. Tenggarong
- 27) Perencanaan Teknis jalan Kresna - Sukarame Kec Tenggarong Seberang
- 28) Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Sebulu - Kartabuana - Muara Badak
- 29) Pembangunan Badan Jalan/Jembatan Ulin Desa Salo Palai Kec. Ma. Badak
- 30) Pembangunan Jalan Pendekat File Slab Jembatan Martadipura Kec. Kota Bangun (Bantuan Keuangan Provinsi)

- 31) Pendampingan Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Santan Tengah
- 32) Pembuatan Badan Jalan Menteng- Sumber Rejeki Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 33) Pembangunan/Peningkatan Badan Jalan Desa Handil Terusan Kec. Anggana (Lanjutan)
- 34) Pembangunan Jalan Pendekat dari Desa Pela Menuju Jembatan Martadipura (Silpa) (Lanjutan)
- 35) Pembangunan dan Pengerasan Jalan Terminal Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 36) Belanja Modal Lanjutan Pembangunan Jalan Amborawang Laut Menuju Tanjung Harapan (Lanjutan)
- 37) Pembuatan Parit Saluran Jl. Perintis Desa Badak Baru Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 38) Lanjutan Pembangunan Jembatan Ulin RT.13 s/d 15 Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 39) Pembangunan Jalan & Jembatan Desa Puandana Sungai Tawar & Perbaikan serta Pembuatan Jalan Baru Kec. Muara Muntai (Lanjutan)
- 40) Pembangunan Jembatan Ulin Desa Teratak Rt 2 dan Rt 1 Kec Muara Kaman (Lanjutan)
- 41) Pembuatan Jembatan Gg. Kuburan RT XI Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 42) Pembangunan jalan Jembatan Gantung dari desa Bila Talang ke Desa Umaq Bekuay Kec Tabang (Lanjutan)
- 43) Pembuatan Jembatan Uli Dusun Pendamaran (Lanjutan)

- 44) Pembangunan Jalan Dalam Lokasi Yayasan al-Istiqomah Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 45) Lanjutan Pembangunan Jalan Muara Wis - Muara Muntai (Lanjutan)
- 46) Lanjutan Pembangunan Jalan dari Jembatan Pela - Muara Wis (Lanjutan)
- 47) Pembangunan Jalan Lingkungan Gg. Mangga Gunung Pasir Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 48) Pembuatan Parit RT 07 Jln Rahmat Badak I - Desa Gas Alam Muara Badak (Lanjutan)
- 49) Pembuatan Jalan Cor Beton Gg. Usaha Tebe Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 50) Pembuatan Jalan Usaha Tani dan Penurapan Saluran Persawahan Desa Semangko Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 51) Lanjutan Pembuatan Jalan Kel. Muara Jawa Ulu Ke Kel. Muara Jawa Ilir (Lanjutan)
- 52) Pembuatan Jembatan Gg. Keluarga Kec Muara Jawa (Lanjutan)
- 53) Lanjutan Pembangunan dan Peningkatan Jalan PADAIDI - Karang Mumus Desa Badak Mekar Kec. Ma. Badak (Lanjutan)
- 54) Pembuatan Badan Jalan RT 12 Desa Tanah Datar Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 55) Pembangunan Jalan Kelekat - Tabang Tahap II (Lanjutan)
- 56) Pembangunan Jalan dan Jembatan Desa Manunggal Jaya - Tanah Datar Muara Badak (Ben. Keu Prop) Lanjutan)

- 57) Pembangunan Jalan Lingkungan SD Nurul LLmi Tenggarong (lanjutan)
- 58) Pembangunan Jalan Pendekat dari Desa Pela Menuju Jembatan Martadipura (Silpa) (lanjutan)
- 59) Pembuatan Jalan Perjuangan Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 60) Pembuatan dan Peningkatan Gg. Sahabat Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 61) Pelebaran/Penurapan, Pengurukan & Semenisasi Gg. Bhakti RT XXXIII Jl. Danau Murung Tembus Jl. Kartini (Lanjutan)
- 62) Pembuatan Jembatan Ulin RT.01 Kamp. Dagang Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 63) Pembuatan Badan Jalan S Bawang-Badak Mekar Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 64) Pembangunan Jalan Jembatan Kayu Ulin Loa Haour RT. 9 Desa Loa Duri Ulu kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 65) Pembangunan Jalan Poros Martadipura Ujung Agregat (Desa Pendamar Simpang Tubuhan) (Lanjutan)
- 66) Pembuatan Jalan Perjuangan Desa Badak Mekar kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 67) Pembangunan Jalan Penghubung Muara Badak Ulu - Salo Palai - Saliki
- 68) Lanjutan Pembangunan Jalan desa Santan Tengah
- 69) Lanjutan Pembangunan Jalan desa Santan Ilir
- 70) Pembangunan Jalan Tembus Menuju Pantai Desa Kersik (Kebun Sawit Rakyat) Kec. Marang Kayu
- 71) Kegiatan Pembangunan Parit Jalan Loa Janan ke Tenggarong, Khususnya Desa Loa Duri

- 72) Pembangunan Jalan Poros Martadipura Simpang Tubuhan - Simpang Semayang
- 73) Lanjutan Pembuatan Badan Jalan dan Pengerasan Jalan di Desa Muara Leka - Muara Aloh Kec. Muara Muntai
- 74) Lanjutan Pembangunan Jembatan Kutai Lama Kec. Anggana
- 75) Pembangunan Badan Jalan dari Martadipura - Sebelimbingan
- 76) Semenisasi Jalan Kec. Kembang Janggut, Hambau, Loa Sakoh dan Genting Tanah (Lanjutan)
- 77) Semenisasi dalam Kota Kembang Janggut - Desa Kelekat, Kec Kembang Janggut
- 78) Lanjutan pembangunan Jalan Sedulang - Poros HTI Kec. Muara Kaman
- 79) Pembangunan Jalan Poros Martadipura, Desa Pendamaran - Tuana Tuha
- 80) Jembatan Sidomulyo Bilatalang Kec. Tabang
- 81) Pembangunan Jalan dan Jembatan desa Manunggal Jaya Tenggara Seberang - Tanah Datar Kec. Muara badak
- 82) Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Perumahan Korpri desa Perjiwa Kec. Tenggara Seberang (belum teranggarkan Tahun 2009 5OPP/CK)

b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- 1) Pembangunan Dermaga Angkutan Sungai dan Bongkar Muat di Kecamatan Tenggara Seberang

c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- 1) Lanjutan Pembuatan Parit Badak 8 Desa Gas Alam Kec. Muara Badak
- 2) Lanjutan Pembuatan Parit RT.07 Desa Gas Alam Kec. Muara Badak
- 3) Lanjutan pembuatan parit/saluran air jalan perintis ke Jl. Sultan Hasanudin desa Badak Baru
- 4) Pembangunan Gorong-Gorong di Desa Salok Palai (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 5) Pembangunan Gorong-Gorong di SP 3 Desa Sidomukti Kec. Ma. Kaman (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 6) Pembuatan parit RT 15 Desa Badak baru Kec. Muara Badak
- 7) Pembuatan parit RT 29 Desa Badak baru Kec. Muara Badak
- 8) Pembuatan Drainasr Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 9) Pembuatan Parit Pasang di Kota Bangun Seberang (Lanjutan)
- 10) Pembuatan Parit Kantor Camat Anggana (Lanjutan)
- 11) Pembuatan Saluran Air Untuk Kelompok Tani Sidomulyo Kec. Tabang

d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

- 1) Turap sheet pile beton tepi Sei Mahakam Tenggara Seberang sepanjang 4 km
- 2) Bangunan Penahan Erosi Sebulu Ulu
- 3) Bangunan Penahan Erosi Kec. Ma. Kaman

- 4) Bangunan Penahan Erosi Sebulu Ulu Tahap II
- 5) Penurapan beton Pelabuhan Toko Lima Kec Muara Badak
- 6) Pembangunan Turap Mata Sapi dan Pengaspalan jalan yg rusak RT.X Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 7) Penurapan Sheet Pile Beton Desa Kota Bangun Ulu (Tepian Tebor) (Lanjutan)
- 8) Penurapan Sheet Pile Beton Desa Kota Bangun Ilir (Lanjutan)
- 9) Penurapan Sheet Pile beton di desa Loa Raya Kec. Tenggaraong Seberang (Lanjutan)
- 10) Penurapan Sheet Pile Beton Loa Tebu (Lanjutan)
- 11) Perencanaan Teknis Sheet Pile Concrete Kawasan Tanjung (Lanjutan)
- 12) Lanjutan Pembuatan Tanggul Abrasi laut Kel. Handil Baru, Sungai Raden
- 13) Pengurukan dan Penahanan Gelombang Muara Sungai Kuala Samboja

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Pembangunan Pos Polisi Lalu Lintas di 4 Tempat

f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- 1) Peningkatan Jl. AP Mangkunegara RT 1 Gang Keluarga Desa Teluk Dalam Kec Tenggaraong Seberang
- 2) Peningkatan Jalan Usaha Tani rapak Lambur Kec Tenggaraong

- 3) Rehab Jalan Tebalai (Muara Kaman Ilir) Kec. Ma. Kaman
- 4) Lanjutan Semenisasi Jalan Muara Kaman
- 5) Peningkatan jalan poros dari desa Kayu Batu desa Muara Leka Kec. Muara Muntai
- 6) Peningkatan jalan poros dan jalan lingkungan desa Kutai lama Kec. Anggana
- 7) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Rapak Lambur - Dusun Sirbaya Kec Tenggara
- 8) Peningkatan Jalan/Semenisasi jalan Sultan Hasanudin, Jl. Perintis, Jl. Lingkungan Kantor Desa, Pasar Insan Raya dan Kampung Tator Badak Baru Kec. Muara Badak
- 9) Penanganan Longsoran Ruas Jalan dua Jalur Tenggara Seberang - Samarinda
- 10) Semenisasi dari Desa Sebuntal menuju Desa Semangko dan Desa Kersik 17 Km
- 11) Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Telford, Box Culvert dan Plat Deucker) Desa Lebak Mantan, Puandana dan Kuyung Seberang Kec. Ma Muntai (Tahap III)
- 12) Peningkatan jalan Desa Bukit Merdeka Jalan Mbak Tutut Tembus Rumah Sakit samboja
- 13) Peningkatan Jalan Mangkurawang - Rapak Lambur Kel. Mangkurawang Kec Tenggara
- 14) Lanjutan Pekerjaan Rigid Pavement Jalan Saliki, Salo Palai Muara Badak Ulu Kec. Ma. Badak
- 15) Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Siliwangi - Senipah Kec Samboja

- 16) Lanjutan Peningkatan dan pelebaran jalan jalur dua Jl. Ahmad Yani Ma. Jawa
- 17) Peningkatan Jalan Teratak ke Ma.Kaman Kec.Ma Kaman
- 18) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tenggara
- 19) Semenisasi Jl. Imam Bonjol Gang Samping RS. Parikesit Rt. 8 Kel. Melayu Kec. Tenggara
- 20) Pengawasan Peningkatan Jalan Dusun Suka Karya Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
- 21) Pengawasan Peningkatan Jalan dusun Suka Sari Desa bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
- 22) Pengawasan Peningkatan Jalan Dusun Suka Rejo Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
- 23) Perbaikan Jalan Kecamatan Muara Kaman (Lanjutan)
- 24) Pengerasan dan Semenisasi Jalan dan Jembatan Penyeberangan Kutai Lama (Lanjutan)
- 25) Peningkatan Jalan Pudak Baru - Pendingin (Lanjutan) RT 6, 7, 8, 9, 10
- 26) Semenisasi Jalan Wisata Pantai Amborawang Laut (Lanjutan)
- 27) Peningkatan Jalan Km 5 Kel. Jahab - Jl. Triyu Kel. Loa Ipuh Tenggara
- 28) Semenisasi jalan Perum Penerangan Jl. Gn. Menyapa Kel. Timbau Kec. Tenggara
- 29) Peningkatan Jalan Dari Desa Bunga Putih - Desa Sambera Kec, Marangkayu
- 30) Peningkatan Jalan Penghubung Marangkayu Ke Muara badak

- 31) Peningkatan Jalan L1 - L2 Tenggaraong Seberang
- 32) Peningkatan Jalan Jaya Makmur - Kelurahan Pendingin Kec. Sanga-Sanga
- 33) Penanganan Longsoran Jalan Panjaitan Tenggaraong
- 34) Penanganan Longsoran Ruas Jalan Loa Tebu - Sebulu
- 35) Penanganan Longsoran SP 3 Petung Kukar (Bantuan Keuangan Propinsi Kaltim)
- 36) Pendampingan Penanganan Longsoran SP 3 Petung Kukar
- 37) Pemeliharaan Jalan & Jembatan Dalam Kota Tenggaraong
- 38) Lanjutan Betonisasi Jalan Pampang-S.Bawang Kec Muara Badak
- 39) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Suka Damai menuju Desa Salo Cella Kec. Muara Badak
- 40) Semenisasi jalan ke kuburan muslimin Desa Saliki (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 41) Lanjutan semenisasi Jl. Taruna Desa Loa Duri Ilir
- 42) Semenisasi Jl. Datar Asam Rt. 11 A Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan
- 43) Semenisasi Jl. Kebaktian Menuju ke Gereja Toraja Rt. 10 B Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan
- 44) Peningkatan jalan dari Dusun Gintung menuju Dusun Musapin Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan
- 45) Pengerasan Jalan Merandai ke Sungai Pimping Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan
- 46) Lanjutan Peningkatan jalan Desa Tanah Datar menuju simpang tiga dalam Kec. Ma Badak

- 47) Lanjutan Peningkatan dan Penangan Longsoran jalan Poros Simpang Tiga Bontang Menuju Simpang Enam Muara Badak
- 48) Semenisasi beton jalan kota Sanga - Sanga
- 49) Lanjutan Peningkatan badan jalan pelabuhan Desa Salo Palai
- 50) Semenisasi Jalan SMPN1 Menuju Jembatan Kuburan Muslimin Kec. Muara Badak
- 51) Lanjutan Semenisasi Badak 8 menuju Jln Dermaga Toko 5 Kec Muara Badak
- 52) Lanjutan Penurapan dan Pelebaran Jalan Toko Lima, Badak VIII Kec. Muara Badak
- 53) Peningkatan Jalan Tambak Rel dan Perumahan Tambak Rel Kel. Baru Kec. Tenggarong
- 54) Lanjutan Perbaikan Jalan H. Jafar Seman Kel.Baru Kec. Tenggarong
- 55) Peningkatan Jalan Dusun Murunan - Jalan Poros Desa Liang Kec. Kota Bangun
- 56) Peningkatan Jalan Desa Sarinadi - Lebaho Ulaq 3 km Kec Kota Bangun
- 57) Peningkatan Jalan Selerong-Sebulu Kec. Sebulu
- 58) Lanjutan Peningkatan Jalan Gunung Panjang Kec. Tenggarong
- 59) Lanjutan Semenisasi Jalan Poros Marangkayu - Muara Badak 10 km
- 60) Lanjutan semenisasi Jl. Tani Makmur Km 25 Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja
- 61) Lanjutan badan jalan Desa Handil Pudak Baru Rt. 7,8,10 Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga

- 62) Semenisasi Jl. Manunggal Jaya menuju Karang Tunggal Kec. Tenggaraong Seberang
- 63) Lanjutan Pengerasan jalan menuju perkampungan pemuda mandiri dan jalan lingkungan kecamatan Loa Kulu
- 64) Semenisasi jalan Dusun beringin Jaya Desa Purwajaya
- 65) Peningkatan jalan spontan menuju Datar Wanyi Desa Rapak Lambur Kec. Tenggaraong
- 66) Lanjutan pelebaran jalan jalur dua Jl. Samanhudi menuju Jl. Cokroaminoto, Jl. Rahmad Badak I menuju Badak 8, Desa Gas Alam Kec. Ma Badak
- 67) Semenisasi K.H Dewantara Desa Badak Baru
- 68) Semenisasi Jalan RT 07, 05, 03 dan 01 desa Gas Alam Kec. Muara Badak
- 69) Perbaikan jalan/jembatan Desa Jantur Induk Kec. Ma Muntai
- 70) Perbaikan jalan/jembatan Desa Jantur Selatan Kec. Ma Muntai
- 71) Perbaikan jalan/jembatan Desa Jantur Baru Kec. Ma Muntai
- 72) Peningkatan jalan Pramono tembus Rapak Nyamuk Kec. Loa Kulu
- 73) Lanjutan Peningkatan jalan Dusun Suka Maju Rt 23 - Rt. 31 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggaraong Seberang
- 74) Lanjutan Peningkatan jalan Dusun Suka Rejo Rt 32 - Rt 34 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggaraong Seberang

- 75) Lanjutan peningkatan jalan Dusun Sukasari Rt 15 - Rt 18 Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
- 76) Peningkatan Jalan Desa Leka Kec. Muara Muara Muntai
- 77) Peningkatan Jalan Leka 2 menuju Leka 1 Kec. Muara Muntai
- 78) Peningkatan Jalan dalam SP III Kec. Kota Bangun
- 79) Peningkatan Jalan dalam SP II Kec. Kota Bangun
- 80) Peningkatan dan Perkerasan Jalan Liang Ulu menuju Jalan Poros Samarinda - Kota Bangun
- 81) Peningkatan Jalan teluk Bingkai menuju Malong Desa Lamin Telihan Kec Kenohan
- 82) Lanjutan Peningkatan Jalan dikomplek Pondok pesantren Al-Muhajirin Batu-Batu Kec, Muara Badak
- 83) Peningkatan jalan poros Karya Bersama Ma Kembang ke Ma Jawa
- 84) Peningkatan jalan poros Suka Damai Tama Pole Ma Jawa
- 85) Peningkatan jalan Handil Buhari Kel. Ma Kembang Kec. Sanga-sanga
- 86) Peningkatan jalan Liposos Km 35 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja
- 87) Lanjutan Peningkatan jalan Kampung Kamal Kel. Sanipah Kec. Samboja
- 88) Peningkatan jalan masuk Desa Karya jaya Samboja (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 89) Peningkatan jalan antara Desa Lempake Dusun Lembu Desa Salo Palai Kec. Ma Badak

- 90) Peningkatan jalan antara Desa Lempake Dusun Lembu Desa Salo Palai Kec. Ma Badak
- 91) Peningkatan jalan dari Menamang Kanan ke Menamang Kiri
- 92) Peningkatan jalan Dusun Bendang Desa Rapak Lambur
- 93) Peningkatan Jalan Pergam dan Jalan Enggang Kelurahan Sukarame Kec. Tenggarong
- 94) Perencanaan Teknis Rehabilitasi jalan dan Jembatan Jalan teriti - Jahab Kec. Tenggarong
- 95) Peningkatan jalan Handil baru darat, Handil Penghulu, Handil Idum, Kel. Ma Sembilan ke Handil 9 Kec. Ma Jawa
- 96) Lanjutan peningkatan jalan dan semenisasi mulai dari ujung jalan Desa Tuana Tuha menuju batas akhir Proyek semenisasi Desa Genting Tanah
- 97) Lanjutan Tahap II semenisasi Kembang janggut kota menuju Desa Kelekat Kec. Tabang
- 98) Lanjutan Cor Beton pemukiman penduduk Rapak Lama Desa Semangkok
- 99) Peningkatan jalan desa Loa Pari Kec. Tenggarong Seberang
- 100) Lanjutan Pengerasan Jalan Terminal Desa Batu-batu Kec. Ma Badak
- 101) Pengerasan Badan Jalan Akses Pemukiman Penduduk Jalan P. Hidayatullah RT. 09 Desa Muara Badak Ulu
- 102) Peningkatan Jalan Bina Raga, Jalan MTQ Dan Jalan PLN Desa Muara Badak Ulu

- 103) Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Badak Makmur Kec. Muara Badak
- 104) Peningkatan Jalan Produksi Karet Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu
- 105) Peningkatan Badan Jalan Seputaran RT 02 SD Tambak dan Perkebunan Masyarakat Desa Salo Palai Kec. Ma. Badak
- 106) Peningkatan Jalan Sedulang HTI Muara Kaman
- 107) Peningkatan Jalan Rumbia Kel Baru Tenggaraong
- 108) Pembuatan/Peningkatan Jalan/Jembatan RT 8 Desa Tanah Datar Kec. Ma Badak
- 109) Peningkatan Jalan Produksi Desa Bunga Putih Kec. Ma. Kayu (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 110) Peningkatan Badan Jalan Penghubung Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 111) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Manunggal Jaya Tenggaraong Seberang
- 112) Semenisasi Jalan Beringin Jaya Desa Purwajaya
- 113) Semenisasi jalan lingkungan RT.01 s/d 04 desa Salo Palai (Lanjutan)
- 114) Pembuatan Jalan Cor Beton Gg, Mulyo Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 115) Semenisasi Gang Akasia (Lanjutan)
- 116) Pengerasan jalan Payogan Agung Kutai Rt. 50 Loa Ipuh Tenggaraong (Lanjutan)
- 117) Peningkatan jalan pemukiman RT 1.2 dan 3 Desa Rempanga (Lanjutan)
- 118) Peningkatan Jalan Menuju Perkampungan Pemuda Mandiri dusun Sumber Rejeki Desa Loh Sumber Kec Loa Kulu (Lanjutan)

- 119) Peningkatan Jalan Manunggal 9 Kel. Karya Merdeka Kec Samboja (Lanjutan)
- 120) Peningkatan jalan poros Sungai Seluang Lampe menuju Desa Seluang Kec. Samboja (Lanjutan)
- 121) Semenisasi Jalan M.Tahir Tanggul Kec Muara Jawa (Lanjutan)
- 122) Semenisasi Gang Anggrek Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 123) Semenisasi Gg Berkah Kec Muara Jawa (Lanjutan)
- 124) Semenisasi Gg Semoga Jaya Gng Pasir Muara Jawa Ulu (Lanjutan)
- 125) Semenisasi Jalan Kasturi RT 06 Desa Anggana Kec Anggana (Lanjutan)
- 126) Peningkatan jalan dan jembatan di Handil D (Terusan) Kec. Anggana (Lanjutan)
- 127) Penurapan Longsor Jalan Arsodono Desa Muara Badak Ulu (Lanjutan)
- 128) Pengerasan dan Pengaspalan jalan beton desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak - Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 129) Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Santan Ulu - Equator Kec. Marang kayu (Lanjutan)
- 130) Pelebaran Jalan Jalur 2 Jln Saman Hudi - Jln Cokroaminoto dan Jln Rahmat - Badak 8 Desa Gas Alam Kec Muara Badak (Lanjutan)
- 131) Semenisasi Gg. Brunei Jl. A.Yani Kel. Ma Jawa Ulu Uk. 4m x 250m Kec. Ma Jawa (Lanjutan)
- 132) Semenisasi Gg. Ramli Handil IV UK 4m x 250 m Muara Jawa Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Lanjutan)

- 133) Semenisasi Gg. Rawa Indah Jl. BTN Uk. 4m x 1000m Kel. Ma Jawa Ulu Kec. Ma Jawa (Lanjutan)
- 134) Semenisasi Gg. Jalur UK 6m x 300m Muara Jawa Kel. Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 135) Semenisasi Gg Perum BPD Rt 14 Kel Loa Ipuh Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 136) Peningkatan Jalan dari Mangkurawang menuju Rapak Lambur Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 137) Peningkatan Jalan dari RT. 03 Sidomulyo Kec. Anggana - Sindang Sari (Lanjutan)
- 138) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Sidomulyo Kec. Anggana (Lanjutan)
- 139) Perencanaan Pemb. lamin Adat Dusun Budaya Sungai Sungan Desa Badak Badak Makmur Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 140) Semensasi Gg. Melati 4 RT.1 Uk. 250m x 3m dan Jembatan Kayu Ulin Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 141) Peningkatan Jalan Lebak Mantan Menuju jalan Poros Melak (Lanjutan)
- 142) Pelebaran dan Semensasi Jalan Desa Sidomulyo Ibu Kota Tabang (Lanjutan)
- 143) Semensasi Jalan Desa Umag Bekuay Menuju Jembatan gantung (Lanjutan)
- 144) Lanjutan Peningkatan Jalan Sari Nadi (SP V) ke Kedang Ipil Kec Kota Bangun (Lanjutan)
- 145) Semensasi Gg. Sejahtera Uk. 4 m x 250 m Kel. Muara Jawa (Lanjutan)

- 146) Lanjutan Peningkatan, Pelebaran Jalan Poros Ma. Badak Simpang Tiga Bontang (Penanganan Longsoran) di Km. 2.45 (Lanjutan)
- 147) Peningkatan Jalan Sandang Rukun Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 148) Lanjutan Semensasi Jalan Toko Lima - Badak 8 Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 149) Lanjutan Semenisasi Jl. Selok Api Laut - Amborawang Laut Kec. Samboja (Lanjutan)
- 150) Peningkatan Jln Desa Selerong Kec. Sebulu menuju Desa Rantau Hempang Kec. Ma.Kaman (Lanjutan)
- 151) Peningkatan Jalan Sangkulirang Gg. Bhakti RT. 22 Kel. Maluhu (Lanjutan)
- 152) Lanjutan Semenisasi jalan Menuju Jalan Poros Samarinda Kec. Ma Kaman (Lanjutan)
- 153) Semensasi Gg. Supina Kel. Ma. Jawa Ulu Kecamatan Ma. Jawa (Lanjutan)
- 154) Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Teratak ke Dusun Liang Berakit Kec Muara Kaman (Lanjutan)
- 155) Lanjutan Peningkatan Jalan Padat Karya RT. 10, 11, 12 Desa Anggana Kec. Anggana (Lanjutan)
- 156) Peningkatan Jalan Teratak ke Ma.Kaman Kec.Ma Kaman (Lanjutan)
- 157) Semensasi Gg. Merpati Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 158) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Santan Ilir - Batas Bontang (Lanjutan)
- 159) Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Ibu Kota Marang Kayu Desa Sebuntal (Lanjutan)
- 160) Peningkatan Jalan RT. 23 Ke RT. 03 Desa Tanjung Limau (Lanjutan)

- 161) Peningkatan Jalan Gg. Nurul Ikhlas Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 162) Pembuatan Gg. Veteran Handil 8 Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 163) Semensasi Gg. Rahmat Handil 8 Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 164) Peningkatan Badan Jalan Gg. Ikhlas Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 165) Peningkatan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan Desa Kutai Lama Kec. Anggana (Lanjutan)
- 166) Rehabilitasi Berat Jalan Trans SP 1 - Sebulu Kec. Sebulu (Lanjutan)
- 167) Lanjutan Peningkatan jalan Lingkungan Perumahan Diknas Kec. Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 168) Peningkatan Jalan (Semensasi Jalan Desa), Desa Embalut Kec Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 169) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Rapak Lambur - Dusun Sirbaya Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 170) Lanjutan Peningkatan Jl. Aji Jaya Winata RT 22 Kel Loa Ipuh Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 171) Perbaikan Gang Rawa Indah1 RT. 17 Kel. Loa Ipuh Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 172) Peningkatan Jalan Mangkuraja Gg V RT XVII dan XXI Kel Loa Ipuh Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 173) Peningkatan Gang Dewi Citra Rt. 19 Jalan Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 174) Peningkatan Jalan Pudak Baru Kelurahan Pendingin Ke. Sanga- Sanga (Lanjutan)
- 175) Penimbunan Jalan Sungai Bandang (Lanjutan)

- 176) Peningkatan Jalan KP Sidodadi - Kp Kamal Desa SenipahSamboja (P) (Lanjutan)
- 177) Semenisasi Gg Swadaya 3 Jl. Gn. Sentul RT 34 Kel Melayu Tenggarong (lanjutan)
- 178) Semenisasi Gg Merak RT 34 Tanggul 4 x 400 M Kecamatan muara Jawa (Lanjutan)
- 179) Semenisasi Jln K.H.A Muksin Gg. 3 Kel. Timbau Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 180) Semenisasi Gg. Kautsar Uk 4m x 200m Jl Delima Kel. Ma. Jawa Ulu Kec. Ma. Jawa (Lanjutan)
- 181) Semenisasi Gg 3 Jl. Pesut Tenggarong (Lanjutan)
- 182) Semenisasi Gg. Jainab (lanjutan)
- 183) Lanjutan Peningkatan Jl. Menuju Wisata Pantai Amborawang Laut Kec. Samboja (Lanjutan)
- 184) Pengerasan dan semenisasi gang Riski Rt. 19 Kel. Timbau Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 185) Semenisasi Gg. Nirmala Kel. Loa Ipuh (Lanjutan)
- 186) Semenisasi Jl. gg. Kubur RT1 dan RT III kel. Melayu (Lanjutan)
- 187) Semenisasi gang ramayana rt.34 kel.Loa Ipuh (poros dan gang anak) (Lanjutan)
- 188) Pengerasan Jl. Km. 7 - Km. 10 Desa Sebuntal Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 189) Semenisasi gang H. Salman Jalan Pesut Rt. 20 Kel. Timbau (lanjutan)
- 190) Semenisasi Gg. Padaidi Tanggul Kec. Ma. Jawa (Lanjutan)
- 191) Peningkatan Jalan di Wisata Bukit Bengkirai Kecamatan Samboja (Lanjutan)

- 192) Rehab Semenisasi Gg. 02 Jalan May. Panjaitan RT. 2 Kel Loa Ipuh Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 193) Lanjutan Peningkatan Jalan & Normalisasi Sungai Tanggi Kecamatan Samboja (Lanjutan)
- 194) Pengerasan Jl Tani Raya - Surya Bhakti dan Pembangunan gedung Serba Guna Ds Batuah Kec Loa Janan (Lanjutan)
- 195) Peningkatan Jalan Usaha Tani Rapak Lambur Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 196) Perbaikan Jl. H. Djafar Seman + Pembuatan Parit Kel Baru Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 197) Peningkatan Jl. Sebulu Ilir Menuju Desa Giri Agung Kec. Sebulu (Lanjutan)
- 198) Semenisasi Gg. 2 Jl. Imam Bonjol Tenggarong (Lanjutan)
- 199) Peningkatan Jalan Jongkang Kecamatan Tenggarong Seberang-Intake Loa Kulu (Tahun 2009) (Lanjutan)
- 200) Peningkatan Jalan PLN Tanjung Batu-Kampung Bawah Tanjung Batu Kec. Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 201) Peningkatan Jln Pudak Baru Kel Pendingin Kec. Sanga-sanga (Lanjutan)
- 202) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Bukit Merdeka Jalan Mba'Tutut Tembus Rumah Sakit Samboja (Lanjutan)
- 203) Pengerasan Jalan Tani Jaya-Surya Bhakti dan Pembangunan Gedung serba Guna Ds Batuah Kec. Loa Janan (Lanjutan)

- 204) Lanjutan Peningkatan Jalan dikomplek Pondok Pesantren Al-Muhajirin Batu-Batu Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 205) Lanjutan Semanisasi dari Desa Sebuntal Menuju Desa Semangko dan Desa Kersik 17 Km (Lanjutan)
- 206) Semenisasi Gg. XVI RT. 8 Kel Timbau (Lanjutan)
- 207) Lanjutan Perbaikan Jalan Blok A s/d G Mangkuraja I Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 208) Lanjutan Pengaspalan Jalan Muara Jawa Ulu-Teluk Dalam Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 209) Peningkatan Jalan Teluk Ladang Ma Jawa Ulu (Lanjutan)
- 210) Peningkatan Jalan Bougenville Kel. Sukarame (Lanjutan)
- 211) Peningkatan Jalan dari Muara Muntai Ke Jalan Poros Samarinda - Melak (P) (Lanjutan)
- 212) Betonisasi Jalan Pampang - S. Bawang (Lanjutan)
- 213) Pengaspalan Jalan Padat Karya Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 214) Rehabilitas Jalan Dalam Kota Tenggaraong (Lanjutan)
- 215) Lanjutan Peningkatan Jalan dan Semenisasi Desa Manunggal Jaya RT. 1 s/d RT. 11 Tenggaraong Seberang (Lanjutan)
- 216) Peningkatan Jalan Kota Bangun Liang (Lanjutan)
- 217) Peningkatan Jl. /Semenisasi Jl. Sultan Hasanuddin, Jl. Perintis, Jl. Lingkungan Kantor Desa, Pasar Insan Raya (Lanjutan)
- 218) Lanjutan Semenisasi Gg. Bugis Kec. Muara Badak (Lanjutan)

- 219) Peningkatan Jl. Gg. Etam - Jl. TMD Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 220) Pembuatan Parit dan Jembatan Kampung Tator Desa Gas Alam Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 221) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan Toko Lima Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 222) Peningkatan Jalan H. Ismail-Jalan TMD Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 223) Semenisasi Jalan Kampung Desa Sabintulung Kec. Ma. Kaman (Lanjutan)
- 224) Peningkatan Jalan & Jembatan Desa Argo Sari (Lanjutan)
- 225) Perencanaan Lanscape dan Jalan Lingkungan Perluasan kantor Bupati & BAPPEDA (Lanjutan)
- 226) Semenisasi Jalan Kampung RT. I, V, VI, VII, XIII, XVI, XI, XXII,XIX, dan XVI Ds Santan Ulu (Lanjutan)
- 227) Lanjutan Peningkatan Jalan dan Jembatan Jonggon A - Jonggon B Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 228) Peningkatan Jalan Loa Ipuh Permai Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 229) Peningkatan Jalan Gunung Belah-Teriti Kec. Tenggarong (lanjutan)
- 230) Peningkatan Jalan Di Wisata Bukit Bengkirai Kecamatan Samboja (Lanjutan)
- 231) Pengaspalan / cor beton Jl. Utama Desa Semangko serta penurapan RT. I, II, III, IV, V, VI, VII Desa Semangko Kec. Marang Kayu (lanjutan)
- 232) Lanjutan Pengerasan Dan Semenisasi Jalan Jembatan Penyeberangan Kutai Lama (lanjutan)

- 233) Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Dari Desa Kayu Batu Desa Muara Leka (Lanjutan)
- 234) Semenisasi Jalan Jember kelurahan Bukit Biru (lanjutan)
- 235) Pengerasan Jalan dari Dusun Tanjung laong menuju sei. Pimping Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 236) Perkerasan dan Pembuatan Badan Jalan dan Jembatan Jalan Waduk Simpang Enam RT 02 Desa Gas Alam Ke (Lanjutan)
- 237) Rehabilitas Jalan dan Jembatan (Telford, Box Culvert dan Plat Deuker) Desa Lebak Mantan, Puanda (Lanjutan)
- 238) Lanjutan Rehabilitas Jalan Tebalai Indah (Muara Kaman Ilir) 13 Km (Lanjutan)
- 239) Peningkatan Gunung Panjang II Kel Panji Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 240) Semensasi Jalan Damai Kecamatan Muara Jawa (Lanjutan)
- 241) Peningkatan Jalan Dari Desa Kersik - Ujung Jembatan Santan Kecamatan Marang Kayu (Lanjutan)
- 242) Peningkatan Jalan Blok BB RT.17 Jl. Gunung Menyapa (Komplek Perumahan Penerangan) Kel. Timbau (Lanjutan)
- 243) Peningkatan Jalan Kereta Gantung dan Rumah Esselon Kec. Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 244) Semensasi Gg. Malaysia Kel. Muara Jawa (Lanjutan)
- 245) Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Tenggarong dan Sekitarnya (Lanjutan)

- 246) Semensasi Jalan Gang 2 RT. 18 Jalan Pesut Kel. Timbau (Lanjutan)
- 247) Semensasi Gg. Permai RT 14 Kel. Loa Ipuh (Lanjutan)
- 248) Semensasi Gg. Firdaus dan Gg. Keluarga Kel. Loa Ipuh (Lanjutan)
- 249) Peningkatan Jalan Pesut Gang Bangunan RT. 19 Kel. Timbau Tenggaraong (Lanjutan)
- 250) Lanjutan Perbaikan Jalan Badak Makmur Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 251) Pengurukan Gg. Langgar RT. 33 Tanggul Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 252) Semenisasi Gg. Rawa Indah II RT. 7 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 253) Peningkatan Jalan Mangkuraja Gg V RT XVII dan XXI Kel Loa Ipuh Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 254) Semensasi Gg. Jeky RT. 1 Muara Jawa Tengah Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 255) Peningkatan Gg. Lencana Kel. Timbau Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 256) Peningkatan Jl. Gang I Tembus Gang II Jl. Pesut Kel. Timbau Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 257) Jalan Masuk SMAN 1 Loa Janan (Lanjutan)
- 258) Semenisasi Gg Baru Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 259) Semensasi Gg. Pinang Muara Jawa Ulu Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 260) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Selerong-Lebaho Ulaq Kecamatan Sebulu (Lanjutan)
- 261) Lanjutan Peningkatan Jalan Veteran Kec. Anggana (Lanjutan)

- 262) Rehabilitasi Simpang Tiga Sepontan Mangkurawang Menuju Mangkurawang (Lanjutan)
- 263) Peningkatan Jalan Prop.KM. 18 KTB-Jonggon Jaya (Lanjutan)
- 264) Perbaikan Jl.H.Djafar Seman+Pembuatan Parit Kel.Baru Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 265) Lanjutan Semanisasi dari Desa Sebuntal Menuju Desa Semangko dan Desa Kersik 17 Km (Lanjutan)
- 266) Semenisasi Jalan Kampung Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman (lanjutan)
- 267) Pembuatan Trotoar Jl KH Dewantara Ds Badak Baru Kec. Muara Badak (Benkeu.Propinsi) Lanjutan)
- 268) Peningkatan Jalan Mulawarman Menuju Pasar Loa Duri Ilir Kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 269) Lanjutan Semensasi Jalan Muara Kaman (Lanjutan)
- 270) Semensasi Jalan Kelompok Tani Desa Sidomulyo - Kampung Baru (Lanjutan)
- 271) Peningkatan Jalan Desa Bukit Raya ke Desa Ambarawang Kec. Samboja
- 272) Perbaikan Jalan Tenggarong - Sebulu Seberang
- 273) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Jonggon Jaya- Desa Sungai Payang - Desa Margasari Kec. Loa Kulu
- 274) Peningkatan Jalan Desa Batuah km. 46 dan km. 47 Kec. Loa Janan
- 275) Lanjutan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Jalur Dua Jl. Ahmad Yani Ma. Jawa
- 276) Peningkatan Jalan Penghubung Desa Tuana Tuha menuju Desa Kahala Kec. Kenohan

- 277) Lanjutan Peningkatan, Pelebaran Jalan Poros Ma. Badak Simpang Tiga Bontang (Penanganan Longsoran) di Km. 2.45
- 278) Semenisasi Jalan Poros Kel. Bukit Biru Kec. Tenggarong
- 279) Pengerasan Badan Jalan Desa Lekak Kidau Kec. Sebulu
- 280) Peningkatan Jl. H. Ismail Desa Muara Badak Ulu
- 281) Peningkatan Jalan dan Jembatan RT. 01 sd RT. 05 - Air Terjun Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan
- 282) Lanjutan Peningkatan Badan Jalan Sidodadi - Badak Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak
- 283) Perbaikan Jalan Loh Sumber, Sumber Rejeki RT. 9 Kecamatan Loa Kulu
- 284) Peningkatan Jalan RT. 13 Kampung Makassar Desa Makarti Kec. Marang Kayu
- 285) Peningkatan Jalan Bukit Raya - Tanjung Batu Kec. Tenggarong Seberang
- 286) Semenisasi Gg. Swakarya Uk. 4m x 200m Jl. Delima Kel. Ma Jawa Ulu Kec. Ma. Jawa
- 287) Peningkatan Jalan Poros Sungai Seluang menuju Lampek Desa Seluang Kec. Samboja
- 288) Lanjutan Semenisasi Jalan menuju Jalan Poros Samarinda - Kec. Muara Kaman (Lanjutan)
- 289) Lanjutan Semenisasi Jalan Muara Kaman (Lanjutan)
- 290) Semenisasi Jalan Kelompok Tani Desa Sidomulyo - Kampung Baru
- 291) Semenisasi Gang I Jl. Imam Bonjol RT. 3 dan RT. 8 Kel. Melayu Kec. Tenggarong

292) Peningkatan Jalan Penghubung SP. V dan SP. VI
Kec. Kota Bangun

g. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

- 1) Inventarisasi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Sarana Prasarana Bangunan di Kab Kukar
- 2) Inventarisasi Jalan, Jembatan, Irigasi dan Sarana Prasarana Bangunan (Lanjutan)

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

- 1) Pembangunan Lapangan Squash
- 2) Pembangunan Stadion Madya
- 3) Pembangunan Velodrome
- 4) Pembangunan Gedung Beladiri
- 5) Pembangunan Equestrian
- 6) Penataan Lahan PON
- 7) Landscape
- 8) Manajemen Konstruksi & AP
- 9) Asrama Atlet & AP
- 10) Pembangunan Sistem Infrastruktur (Listrik, Air Bersih, Air Buangan dan Telpon)
- 11) Pembangunan Lapangan Sepak Bola di Kota Bangun
- 12) Penyediaan Jaringan Infrastruktur PON (Listrik, Telepon, Air Bersih dan Air Buangan) (Belum Teranggarkan Th. 2009 Non 50PP/CK)

i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan

- 1) Pembuatan Software Inventarisasi Berbasis Map Info

- 2) Pembangunan infrastruktur Hardware dan software
- 3) Pembangunan Jaringan Komputer Untuk sistem informasi dan Pelatihan Program Tahap I (Lanjutan)
- 4) Perencanaan Pemeliharaan Rutin Jembatan

j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

- 1) Penataan Jaringan Komputer dan Sistem Informasi DPU
- 2) Pengadaan Tanah Workshop dan Pematangan Lahan
- 3) Pembangunan Lapangan Parkir di Dinas Pekerjaan Umum Kukar
- 4) Operasional dan Pembelian Sarana Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum
- 5) Pembangunan Gedung Lab DPU di Tenggarong (Lanjutan)
- 6) Pemeliharaan Workshop

k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- 1) Pembuatan Pintu Sekat di 5 DP Kec Sebulu
- 2) Perencanaan Pembuatan saluran Induk Daerah Penjuluk Kelurahan Mangkurawang (L)
- 3) Lanjutan irigasi Badak Makmur Rt. 10 Ma Badak Ulu
- 4) Pembuatan pintu air di Handil 8 dan handil 9 Kec. Muara Jawa
- 5) Operasional Pemeliharaan Pengairan Di Kab Kukar
- 6) Persiapan Lahan Berpengairan (PLB) desa Hambau Kec. Kembang Janggut

- 7) Normalisasi Sei Tanggi untuk Pengaman Banjir Kel. Handil Baru Kec. Samboja
- 8) Persiapan lahan berpengairan(PLB) Desa Kayu Batu Kec. Muara Muntai
- 9) Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Ds. Bangun Rejo Tenggara Seberang (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 10) Normalisasi Saluran Irigasi Pertanian Ds. Kertabuana Tenggara Seberang (Bantuan Keuangan Propinsi) APBD-P 2008
- 11) Kegiatan Infrastruktur Irigasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009
- 12) Pendamping Kegiatan DAK
- 13) Pencetakan sawah dan irigasi modern di Kecamatan Tenggara Seberang
- 14) Percetakan sawah, pembuatan irigasi Desa Handil Terusan Kec. Anggana
- 15) Lanjutan Percetakan sawah dan irigasi Desa Salo Cella Rt 4 Kec. Ma Badak
- 16) SID Percetakan sawah Kec. Kenohan, Kec. Kembang Janggut
- 17) SID Percetakan sawah dan irigasi di Kota Bangun
- 18) Pompanisasi dan Jaringan Irigasi 5 DP di Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 19) Lanjutan PPAB Desa Bukit Raya Kec. Tenggara Seberang(Lanjutan)
- 20) Lanjutan Pembangunan Sarana Air Bersih Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 21) Pembangunan sarana Intake Sungai di Batu- Batu Kec Muara Badak (Lanjutan)

- 22) Peningkatan Air Bersih di Sebulu (Ban. Keu) (Lanjutan)
- 23) Lanjutan Pekerjaan Sarana Air Bersih dan Jaringan Pipa distribusi Kec Samboja (Lanjutan)
- 24) Peningkatan dan Pembangunan SAB Desa Buana Jaya dan Separi I, II, III di Kec. Tenggaraong Seberang(Lanjutan)
- 25) Peningkatan dan Pembangunan SAB Desa L1 (Bukit Raya) Kec. Tenggaraong Seberang(Lanjutan)
- 26) Pembangunan Air Bersih Desa Kersik(Lanjutan)
- 27) Peningkatan Sarana Air Bersih Kec. Kota Bangun Lanjutan Tahap III(Lanjutan)
- 28) Pembuatan jaringan irigasi Desa Santan ulu-Semangkok-Kersik Kec. Marangkayu (Lanjutan)
- 29) Pembuatan Kanal Penghubung 2 KM Desa Tanjung - Desa Sabintulung (Lanjutan)
- 30) Percetakan Sawah Baru, Pembuatan Irigasi, dan Pembuatan Jalan Usaha Tani Desa Cella (Lanjutan)
- 31) Pembuatan Pintu Sekat di 4 DP di Kec. Muara Kaman (Lanjutan)
- 32) Operasional dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa (Lanjutan)
- 33) Normalisasi Sungai Jatah Kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 34) Normalisasi Saluran Induk Desa Bangunan Sari Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 35) Pembuatan Pintu Sekat di 3 DP Kec. Tenggaraong Seberang (Lanjutan)
- 36) Pembuatan Pintu Air Sungai Marang Kayu (Lanjutan)

- 37) Rehab Pintu Air Handil 4,5,6,7 Kec. Muara Jawa (Lanjutan)
- 38) Pembuatan Irigasi/Pengairan RT. 10 Badak Makmur Desa Muara Badak Kec. Muara Madak (Lanjutan)
- 39) Pembuatan Irigasi Sei Merdeka Km 45. Samboja dan Pembersihan Sungai Beras (Lanjutan)
- 40) Pembangunan Pompanisasi Pengairan Sawah Dusun Jawa Baru Desa Loa Kulu Kota (Lanjutan)
- 41) Pipanisasi Air Bersih Desa Loleng Kec. Kota Bangun (Lanjutan)
- 42) Peningkatan Air Bersih di Marangkayu (Ban. Keu) (Lanjutan)
- 43) Pemeliharaan Bendungan dan Normalisasi Saluran Primer dan Sekunder
- 44) Pemeliharaan saluran Irigasi dan pintu air 12 lokasi di 5 kecamatan
- 45) Pelatihan bimtek tata guna air dan jaringan irigasi
- 46) Pembersihan dan Pengurukan saluran irigasi kelompok tani karya makmur dusun jawa baru Kec. Loa Kulu
- 47) Pembersihan dan Pengerukan saluran irigasi desa Bangun Sari (SP-4) Kec. Kota Bangun
- 48) Pembersihan dan Pengerukan Saluran irigasi kelompok tani Tiga Sekawan Kel. Panji Kec. Tenggarong

I. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

- 1) Rehab Makam Pangeran Noto Igomo Kelambu Kuning Kec Tenggarong

- 2) Penurapan Kuburan Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun

m. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- 1) Pendampingan DAK Non DR (Lanjutan)
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Bersih (Lanjutan)

n. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya

- 1) Penanganan Abrasi Sungai Kuala Kel Kuala Samboja Kec. Samboja
- 2) Normalisasi Sungai Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja
- 3) FS pembuatan folder / penampung air dan hutan kota di Kec Tenggarong (Lanjutan)
- 4) Rehabilitasi Total Bendung, Pintu dan Pengerukan Waduk Panji Sukarame Tahap II (Lanjutan)
- 5) Pemeliharaan bendungan dan normalisasi saluran primer dan sekunder (Lanjutan)
- 6) Pemberdayaan Petani pemakai air dan pengembangan tata guna air Kab. Kukar Tahun 2008

o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

- 1) Peningkatan Saluran Jaringan Air Bersih Kec. Tenggarong
- 2) Lanjutan Pekerjaan Jaringan Air Bersih Kec. Tenggarong

- 3) Lanjutan PPAB Desa Bukit Raya L1 Kec. Tenggaraong Seberang
- 4) Peningkatan Instalasi Air Bersih Kelurahan Pendingin Kec. Sanga-Sanga
- 5) Penggantian Pipa PDAM dan LPJU Jl Ahmad Yani Kec. Muara Jawa
- 6) Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa distribusi SPAM IKK Desa Bunga Jadi Muara Kaman
- 7) Penurapan Saluran Induk Pembuangan Air Limbah Desa Gas Alam Kec. Muara Badak
- 8) Saluran Pembuangan Air Rt. 3 Desa Saliki Kec. Ma Badak
- 9) Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi air bersih dan sarananya (lanjutan) Kec. Loa Kulu (belum teranggarkan) tahun 2009)

p. Program Pengendalian Banjir

- 1) Pembuatan Penahan Gelombang / Abrasi Pantai Kel Teluk Pemedas (Lanjutan)

q. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- 1) Pembangunan Mushola di Pulau Kumala
- 2) Pembangunan Pasar Di Kel Mangkurawang Kec Tenggaraong
- 3) Perencanaan Teknis Permukiman Perkotaan (Tanjung dan Jl Panjaitan Kec Tgr)
- 4) Rehab Gedung Unikarta
- 5) Rehab Ponpes An Nur Al Ikhlas Loa Janan

- 6) Lanjutan Pembangunan Langgar Al Jawahir Kelurahan Baru Kec. Tenggarong
- 7) Lanjutan Pembangunan Mesjid Baiturahman Kel. Loa Tebu Kec. Tenggarong
- 8) Pembangunan Mesjid Al Qadar Jl. Danau Jempang Kec. Tenggarong
- 9) Perbaikan Teras Mesjid Arriyadah sungai meriam Kec. Anggana
- 10) Pembangunan Masjid Besar Desa Melintang
- 11) Pembangunan Masjid Besar Desa Pela Baru
- 12) Pembangunan Masjid Besar Desa Lebak Cilong Kec. Ma Wis
- 13) Pembangunan Masjid Baiturahman Loa Tebu Kec. Tenggarong
- 14) Pembangunan Masjid Jami Nurul Huda Handil Darat Kec. Samboja
- 15) Pembangunan Masjid Jami Nurul Huda Kel. Koala Kec. Samboja
- 16) Penyelesaian Masjid Nurul Jannah Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
- 17) Pembangunan Mesjid Ulul Azmi Kampung Dagang Desa Ma Badak Ilir Kec. Ma Badak
- 18) Pembangunan Masjid Jami Assifa Kel. Pendingin Kec. Sanga-sanga
- 19) Pembangunan Masjid Djabal Aswat gn Tambi Handil Baru Kec. Samboja
- 20) Pembangunan Langgar At Taqwa Sungai Raden Darat Kec. Samboja
- 21) Rehab Berat Langgar Al-Far Sungai Menteri Kec. Samboja

- 22) Pembangunan sarana dan prasarana Langgar An Nur Kel. Panji Tenggara
- 23) Pembangunan Masjid Nurussalam Kel. Sanipah Kec. Samboja
- 24) Pembangunan menara masjid Al Istiqomah Desa Loa Duri Ilir
- 25) Lanjutan pembangunan Masjid Besar Desa Liang Kec. Kota Bangun
- 26) Pembangunan Langgar MiftahulJannah Jl. Punai Kel. Sukarame Kec. Tenggara
- 27) Pembangunan Masjid TK ABA Desa Badak Baru Kec. Muara Badak
- 28) Landscape Kembang Janggut Kota (Tahap II)
- 29) Peningkatan Sarana Ibadah Langgar At Taufik Dusun Suka Maju Bukit Pariaman Kec. Tenggara Seberang
- 30) Perencanaan Pembangunan Gedung Nahdlatul Ulama (NU) dan Masjid Baiturahim di Desa Bhuana Jaya Kec. Tenggara Seberang
- 31) Lanjutan Semenisasi dan Jembatan Gang Soponyono RT 5 Kel Timbau Tenggara
- 32) Perencanaan Pemb. Perumahan Dinas Untuk Kejaksaan Negeri Tenggara (10 rumah) (Lanjutan)
- 33) Pembangunan Jalan & Infrastruktur Perumahan Kopri Kabupaten Kutai Kartanegara (Lanjutan)
- 34) Penambahan Ruang/Pembangunan Kantor Camat Tenggara (diganti Pengadaan tanah Kantor Pembebasan lahan tanah 2000 M2) (Lanjutan)

- 35) Lanjutan Renovasi Gedung Kantor Bappeda Kab Kukar (Lanjutan)
- 36) Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan di kelurahan Timbau (Polres) (Lanjutan)
- 37) Pembangunan Aula balai Prajurit (Batrai Armed) (Lanjutan)
- 38) Rehab Kantor KUA Kec. Loa janan (Lanjutan)
- 39) Rehabilitasi KCD Pertanian Kec. Muara Kaman (Lanjutan)
- 40) Rehab Kantor KUA Kec. Muara Kaman (Lanjutan)
- 41) Pembangunan Kantor Cabang Dinas Perkebunan Marang Kayu (Lanjutan)
- 42) Pembangunan Gedung PMK (Lanjutan)
- 43) Pembangunan Permanen Kantor KORAMIL (Lanjutan)
- 44) Pembangunan Permanen Kantor KAPOLSEK (Lanjutan)
- 45) Rehab Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Tenggaraong (Lanjutan)
- 46) Rehab KCD Perkebunan (Lanjutan)
- 47) Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Tenggaraong (Gedung Kantor Baru) (Lanjutan)
- 48) Pembangunan Kantor Desa Semangko (Lanjutan)
- 49) Rehab Kantor Camat Samboja (Lanjutan)
- 50) Pembangunan Prasarana Pemerintah di Kel. Timbau Kec. Tenggaraong Tahap III (Kejaksanaan) (Lanjutan)
- 51) Rehab Kantor Kecamatan Kembang Janggut (Lanjutan)
- 52) Rehab KCD Peternakan Kecamatan Muara Muntai (Lanjutan)

- 53) Pengembangan Gedung Serba Guna GPDI Jln. Maduningrat Tenggaraong. (Lanjutan)
- 54) Penambahan Gedung PKK/BPU Desa Semangkok (Lanjutan)
- 55) Rehabilitas Markas Koramil (Lanjutan)
- 56) Rehab Kantor Camat Kenohan (Lanjutan)
- 57) Rehab Kantor Kecamatan Muara Muntai (Lanjutan)
- 58) Rehab KCD Perikanan Kecamatan Muara Muntai (Lanjutan)
- 59) Rehabilitas KCD Perkebunan Kec. Muara Kaman (Lanjutan)
- 60) Rehab Kantor Kecamatan Muara Wis (Lanjutan)
- 61) Rehab Kantor Kelurahan Melayu Kec. Tenggaraong (Lanjutan)
- 62) Pembangunan Perumahan Makodim (Lanjutan)
- 63) Rehab Kantor Kelurahan Melayu Kec. Tenggaraong (lanjutan)
- 64) Rehab KCD Perkebunan Kecamatan Kota Bangun (Lanjutan)
- 65) Pembangunan Mess Bintara di Tenggaraong (Lanjutan)
- 66) Pembangunan Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 67) Pembangunan Rumah Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tenggaraong (Lanjutan)
- 68) Rehab Kantor KUA Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 69) Rehabilitasi KCD Pertanian Tanaman Pangan Sebulu (Lanjutan)
- 70) Rehabilitasi Kantor Camat Sebulu (Lanjutan)

- 71) Rehabilitasi Kantor Cabang Dinas Peternakan (Lanjutan)
- 72) Pembangunan Pesantren Al-Istiqomah, Desa Kota Bangun (Lanjutan)
- 73) Pembangunan Musholla dan Gedung di Pendopo Wakil Bupati Kab. Kutai Kartanegara (Lanjutan)
- 74) Pembangunan LASQI Kec. Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 75) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan di Kecamatan Muara Jawa (Lanjutan)
- 76) Rehab KCD Pertanian Tanaman Pangan Kec. Loajan (Lanjutan)
- 77) Kegiatan SID, FS dan DED Pembangunan Pelabuhan Samboja Kuala Kec. Samboja (Lanjutan)
- 78) Semenisasi gg Nusa Indah Rt. 48 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong
- 79) Master Plan Kota Tenggarong dan Tenggarong Seberang

r. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

- 1) Pembangunan kantor Kelurahan Desa Gas Alam Kec Muara Badak
- 2) Renovasi Mesjid KH M Sajid Kel Baru Kec Tenggarong
- 3) Pembangunan Mesjid Al-Idzhar Kec. Sebulu
- 4) Pembangunan Mesjid Al-Abrar Kec Muara Jawa
- 5) Pembangunan gedung serba guna Desa Gas Alam Badak I
- 6) Pembangunan Mesjid Ukhuwah Kec Muara Badak

- 7) Lanjutan Pembangunan/Perluasan Prasarana Mesjid Agung Tenggaraong
- 8) Perbaikan dan Pelebaran Gg. V RT 18 Kelurahan Melayu Kec. Tenggaraong (Terkena Bencana Kebakaran)
- 9) Semenisasi jalan Gg. Bakut Jl. Pesut Rt. XIV Kel. Timbau Kec. Tenggaraong
- 10) Pembangunan Badan jalan dan Perkerasan jalan perkebunan Kel.Tani Alam Indah Palacari Desa Badak Baru Kec. Muara Badak
- 11) Pembangunan jembatan gang 45 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu
- 12) Pembangunan Rehab jalan/jembatan ulin Gg. Al Falah Rt.9 Desa Loa Duri Ulu
- 13) Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkungan RT 01 s/d 04 Desa Salo Palai Kec. Ma Badak
- 14) Semenisasi gang Durian Manok Kel. Bukit Biru Tenggaraong
- 15) Pengerasan dan semenisasi RT 02 Desa Sungai Bawang Kec. Muara Badak
- 16) Semenisasi Gg. Mutiara Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak
- 17) Lanjutan semenisasi Gg. Bugis Kampung Jawa Ma Badak
- 18) Pembuatan Turap dan Peningkatan Gg Beringin V Ujung Jl. Gunung Pegat RT 40 Kel. Melayu Kec. Tenggaraong
- 19) Peningkatan Gg. 7 RT 6 Kel. Baru Kec. Tenggaraong
- 20) Peningkatan Jalan dan Parit Jl Kelompok Tani RT 8 dan 9 Kel. Bukit Biru Kec Tenggaraong

- 21) Perkerasan jalan RT II Desa Badak baru Kec. Muara Badak
- 22) Peningkatan jalan usaha tani Kel. Karya Merdeka Rt. 5 Kec. Samboja
- 23) Peningkatan jalan usaha tani Desa Karang Tunggal Kec. Tenggaraong Seberang
- 24) Lanjutan peningkatan jalan G. 3 Kel. Baru Tenggaraong
- 25) Peningkatan Jalan Gang Gotong Royong Badak I Kec. Ma. Badak
- 26) Peningkatan Jalan Gang Tabah Jalan Gunung Pasir RT 38 Kel Melayu Tenggaraong
- 27) Mesjid besar desa Liang Kec Kota Bangun (Lanjutan)
- 28) Rehab Mesjid Hasanuddin Kec Tenggaraong (Lanjutan)
- 29) Pembangunan Mesjid jami Loa Kulu (Pasundan) (Lanjutan)
- 30) Lanjutan Pembangunan Lamin Adat Desa Sungai Bawang dan Jalan Menuju Lokasi (Lanjutan)
- 31) Perencanaan Pemb. & Rehab Kesehatan Di 18 Kec. Di Kab.Kutai Kartanegara (Lanjutan)
- 32) Renovasi Area Makam Pangeran Noto Lgomo Di tenggarong (Lanjutan)
- 33) Pembuatan Pagar Kuburan Desa Muara Badak Ulu (Lanjutan)
- 34) Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Sanga-Sanga (Lanjutan)
- 35) Masjid Jabal Nur Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak (Lanjutan)

- 36) Pembangunan Mesjid Al Ansor Jl. Arwana kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 37) Lanjutan Pembangunan Masjid Miftahul Jannah Kel. maluhu kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 38) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pendukung Mesjid Jami Hasanuddin Tenggarong (Lanjutan
- 39) Pembangunan Masjid Al-Muttaqim Desa Loa Raya Kec. Tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 40) Rehab BPU Desa Sebuntal Kec. Marang kayu (Lanjutan)
- 41) Lanjutan Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Teratak (Lanjutan)
- 42) Rehab Bangunan Mesjid Al fajar Dusun Sidodadi Kel. Maluhu Kec. Tenggarong (Lanjutan)
- 43) Pembangunan Mesjid Nurul Yaqin Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 44) Pembangunan Mesjid Besar Desa Genting Tanah (Lanjutan)
- 45) Pembangunan/Perluasan Prasarana Mesjid Almizan Loa Kulu (Lanjutan)
- 46) Mesjid Desa Muhuran (Lanjutan)
- 47) Langgar Al Jawahir Tenggarong (Lanjutan)
- 48) Masjid Al Istiqomah Kota Bangun (lanjutan)
- 49) Pembangunan Pagar Dan Toko Gedung PKK Jl.A Yani Tenggarong (Lanjutan)
- 50) Lanjutan Pagar Mesjid Al Muttaqim Desa Sidomulyo (Lanjutan)
- 51) Renivasi BPU (Balai Pertemuan Umum) Dusun Margamulya (Lanjutan)

- 52) Pembangunan Masjid Jami Al Ma`rif darussalam Desa Tubuhan (Lanjutan)
- 53) Mesjid Desa kahala (Lanjutan)
- 54) Pembangunan Pasar Los Pasar Kelurahan Jahab Tenggara (Lanjutan)
- 55) Masjid Nurul Fajri Danau kelurahan Melayu Tenggara (Lanjutan)
- 56) Pembangunan Pasar Mangkurawang (Parit/Drainase), Pematangan Dan Pengurukan Kecamatan Tenggara (Lanjutan)
- 57) Rehab Mesjid Al Irsyad Rapak Lama Desa Semangko Kec. Marang Kayu (Lanjutan)
- 58) Lanjutan Pembangunan Mesjid Al-Istiqomah Desa Loa Duri Ilir RT 5 Kec. Loa Janan (Lanjutan)
- 59) Lanjutan Pembangunan Gedung BPU Fungsi Ganda Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 60) Pembangunan Mesjid Besar Safaatul Ikhwan Kec Samboja (lanjutan)
- 61) Pembangunan Pasar Di Kel Mangkurawang Kec Tenggara (Lanjutan)
- 62) Pembangunan Mesjid Raya Kec Muara Badak (Lanjutan)
- 63) Mesjid Desa Tuana Tuha (Lanjutan)
- 64) Mesjid Desa Tuana Tuha (Lanjutan)
- 65) Rehab Mesjid Nurul Huda Kel Kuala Kec Samboja (Lanjutan)
- 66) Pekerjaan Pagar Samping Kiri Kanan dan Belakang Jln. Lingkungan Perumahan Pemkab. Kukar di Bukit Biru Tenggara Tahap I (Lanjutan)

- 67) Pembangunan Mesjid Baitur Rohman desa Suka Maju tenggarong Seberang (Lanjutan)
- 68) Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Gas Alam Kec. Muara Badak (Lanjutan)
- 69) Mesjid Ribathul Khair Timbau tenggarong (Lanjutan)
- 70) Pembangunan Mesjid Besar Kembang janggut (lanjutan)
- 71) Masjid Desa Tanjung Batu Harapan Kec. Muara Muntai (Lanjutan)
- 72) Pembangunan Masjid Jami Nurul Huda Kec. Samboja (Lanjutan)
- 73) Pembangunan Masjid Besar Al-Mizan Kec. Loa Kulu (Lanjutan)
- 74) Pembangunan Mesjid Al-Abrar Kec. Muara Jawa (Lanjutan)

s. Program Gerbang Dayaku

- 1) Peningkatan Sarana & sarana Kel. Pendingin & Sanga-sanga Muara di Kecamatan Sanga-sanga (Lanjutan)
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kel. Jawa, sanga-sanga Dalam dan Sari Jaya di Kecamatan Sanga-sanga (Lanjutan)
- 3) Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan
- 4) Pengadan Konstruksi Jalan di Kelurahan
- 5) Pengadaan Konstruksi / Bangunan / Sarana Kelurahan
- 6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan / Pedesaan

- 7) Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Puskesmas / Sarana Kelurahan Lainnya
- 8) Kegiatan Olah Raga Kelurahan Loa Ipuh
- 9) Pelatihan Kewirausahaan UKM

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dilihat dari tingkat pencapaian Indikator Kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pekerjaan Umum masih belum maksimal. Hal ini terlihat kondisi Jalan Kabupaten yang dalam keadaan baik hanya mencapai 18%. Demikian juga halnya dengan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi baik hanya mencapai 25,32%, namun demikian apabila dilihat dalam hal rumah tangga bersanitasi, maka kinerja pemerintah daerah mencapai 89,07%.



Disisi lain apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2009, maka dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dari alokasi dana sebesar Rp. 411.761.112.795,- hanya dapat diserap sebesar Rp. 283.866.736.385,- atau 68,94 % dengan keluaran berupa Jembatan Ulin dusun Pendamaran Kec Kenohan 1 km, Jalan Pendekat Pile Slab Jembatan Martadipura 300 m, Jembatan Kelekat - Tabang, Jalan Kelekat - Tabang Tahap II sepanjang 78 Km, Jembatan Bentang Pela - Kota Bangun 420 M, jalan Lintas Kecamatan Muara Badak - Kec. Anggana sepanjang 24 Km, jalan poros Martadipura 2 dari jembatan menuju ke Desa Sebelimbingan sepanjang 12 Km, badan jalan dan perkerasan RT 11 Desa Suka Damai Kec. Muara Badak 2 Km, Badan Jalan RT 12 Desa Tanah Datar Kec Muara Badak 1 Km, Jalan Lingkungan Desa Santan Tengah 2 Km, Peningkatan Badan Jalan Desa Handil Terusan Kec. Anggana 2 Km.
- b. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.994.516.000,- telah terserap sebesar 98,68% atau Rp. 1.968.167.000,-
- c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 5.690.462.950,- atau 80,49% dari alokasi yang disediakan oleh pemerintah daerah sebesar Rp. 7.069.468.200,- dengan hasil berupa pembangunan parit di Kecamatan Muara Badak sepanjang 4,8 Km dan gorong-gorong di Desa Salok Palai 30 buah dan Desa Sidomukti Kec. Ma. Kaman 30 buah.

- d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dari alokasi sebesar Rp. 43.683.534.267,- hanya mampu menyerap sebesar Rp. 25.408.360.100,- atau 58,17% dengan keluaran berupa Turap sheet pile beton tepi Sei Mahakam Tenggara Seberang sepanjang 4 km, Bangunan Penahan Erosi Sebulu Ulu 200 m, Penurapan beton Pelabuhan Toko Lima 100 m,
- e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 584.087.000,- juga hanya terealisasi Rp. 456.452.000,- atau 78,15% dengan hasil berupa 4 buah bangunan Pos Polisi.
- f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mampu menyerap anggaran sebesar 81,24% atau senilai Rp. 407.443.893.479,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 501.556.930.874,- Dengan alokasi dana yang sangat besar tersebut, pada saat ini kondisi jalan di Kabupaten Kutai yang total panjangnya mencapai 1.529,39 Km, terdapat 274,65 Km yang dalam kondisi baik atau sekitar 18,01%.
- g. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 513.500.000,- dan serapan mencapai Rp. 487.700.000,- atau 94,98%.
- h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang anggarannya dipatok sebesar Rp. 198.705.533.766,- telah terelisasi Rp. 161.473.816.365,- atau 81,26% dengan keluaran berupa Pembangunan 1 buah Lapangan Squash, Stadion Madya, Velodrome, Gedung Beladiri, Equestrian, penataan Lahan Komplek Stadion 25 Ha, landscape Ruang

- Hijau Area PON 5 Ha, 10 Unit Bungalow, 8 Unit Asrama, 1 Ruang Makan, 1 Gudang dan Bangunan Pendukung
- i. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan yang mendapat kucuran dana sebesar Rp. 1.097.028.700,- hanya terserap Rp. 865.031.010,- atau 78,85% dengan hasil berupa 1 Software, Data Base Jalan, Jembatan, Irigasi dan Bangunan.
 - j. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan juga hanya mampu menyerap 44,77% atau Rp. 1.880.454.600,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.200.623.791,-
 - k. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang dipagu sebesar Rp. 101.202.168.240,- hanya terealisasi sebesar Rp. 56.540.496.682,- atau 55,87%
 - l. Program Pengelolaan Areal Pemakaman dengan dana sebesar Rp. 402.398.500,- dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 341.336.000,- atau 84,83%
 - m. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku telah menyerap seluruh alokasi dana yang disediakan sebesar Rp. 188.349.000,-
 - n. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang dialokasikan sebesar Rp. 12.866.709.084,- hanya terealisasi sebesar Rp. 9.828.509.600,- atau 76,39%
 - o. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dari alokasi sebesar Rp. 14.177.530.931,- telah terealisasi sebesar Rp. 10.613.204.769,- atau 74,86%

- p. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 115.661.278.910,- dapat menyerap dana sebesar Rp. 78.318.060.385,- atau 67,71%
- q. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan anggaran mencapai Rp. 43.997.295.300,- hanya terelisasi Rp. 33.659.888.644,- 76,50%
- r. Program Gerbang Dayaku yang dikelola oleh kelurahan dari alokasi dana sebesar Rp. 48.844.164.580,- dapat diserap sebesar Rp. 47.181.088.038,- atau 96,59%

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan klasik yang selalu menjadi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum adalah adanya keterlambatan proses SP2D.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan koordinasi dan komitmen bersama dari berbagai pihak yang berhubungan dengan proses tersebut untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

v. PENATAAN RUANG;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Perencanaan Tata Ruang

- 1) Percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program Perencanaan Penataan Ruang pada tahun 2009 hanya dialokasikan sebesar Rp. 467.077.600,-

yang dimantaafkan untuk Percepatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Permasalahan dan Solusi

Untuk urusan tata ruang, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami sedikit permasalahan pada SKPD yang menanganinya. Selama ini urusan Tata Ruang menjadi kewenangan Bappeda, namun dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, urusan Tata Ruang masuk dalam wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum bidang Penataan Ruang Wilayah. Namun demikian karena sifatnya masih transisi, sehingga masih terjadi tarik ulur kepentingan.

Solusinya adalah bahwa untuk kedepannya urusan tata ruang menjadi kewenangan penuh Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tupoksinya.

vi. PERENCANAAN PEMBANGUNAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi

- 1) Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang Fisik Basis Web
- 2) Pengembangan Sistim Informasi Geografis (GIS) Perencanaan dan Kontrol Pembangunan
- 3) Updating Data Kinerja Sistem Jaringan Jalan dan Penyusunan Tingkat Prioritas Penanganan

- 4) Pembuatan Peta Dasar Digital Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 5) Pendampingan Pameran Luar Daerah
- b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh**
- 1) Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar**
- 1) Masterplan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Wilayah Pantai Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2) Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka dan Study Kelayakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Kota
 - 3) Inventarisasi Perumahan Kumuh
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1) IRAP Kecamatan Tabang Kabupaten Kukar
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
- 1) Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan
 - 2) Bintek Penyusunan Rencana Pemb. Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
 - 3) Perencanaan Pengembangan ICT (Information and Communication Technology)
 - 4) Koordinasi Program Pembangunan di Bidang Sosbud

- 5) Pendukung Kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD
- 6) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musrenbang Nasional
- 7) Pengelolaan Administrasi Umum dan Kearsipan
- 8) Reviiew RPJMD 2005-2010
- 9) Musrenbang Perencanaan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan
- 10) Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 11) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- 12) Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan
- 13) Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP)
- 14) Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
- 15) Analisis Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kab. Kukar

f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- 1) Penyusunan Master Plan dan Action Plan Kawasan Agropolitan Kab. Kutai Kartanegara
- 2) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha Jasa Terpadu di Kab. Kutai Kartanegara
- 3) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Yang Berdaya Saing Lokal dan Internasional di Kab. Kukar

- 4) Studi Keruangan Pertumbuhan Sektor Industri Kecil dan Menengah di Kab Kutai Kartanegara
- 5) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian di Kab. Kutai Kartanegara
- 6) Musyawarah Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Kab Kutai Kartanegara
- 7) Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kab. Kutai Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografi)
- 8) Pengembangan Sistem Database Perencanaan Bidang Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara
- 9) Penyusunan Profil Ekonomi Kab. Kukar
- 10) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada Bidang Pertanian di Kab Kutai Kartanegara
- 11) Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten Kutai Kartanegara
- 12) Identifikasi Sarana Perdagangan dan Koperasi Potensial di kab Kukar
- 13) Survey Investigasi dan Design (SID) Industri Terpilih Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kab Kutai Kartanegara
- 14) Kajian Karakteristik Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan
- 15) Penyusunan Neraca Energi Kabupaten Kutai Kartanegara
- 16) Penyusunan Harga Indek Konsumen (HIK) dan Inflasi Kab. Kukar Tahun 2009

g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

- 1) Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah
- 2) Sinkronisasi Program Kesejahteraan Sosial
- 3) Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM)
- 4) Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 5) Model Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan
- 6) Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan

h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- 1) Penyusunan dan Analisis Infrastruktur Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Upaya Percepatan Pembangunan Daerah.
- 2) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Konservasi Mangrove di Delta Mahakam.
- 3) Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Kutai Kartanegara

i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

- 1) Perencanaan Pengelolaan Lahan Kritis Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan urusan wajib bidang Perencanaan Pembangunan ditandai dengan telah terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perencanaan pembangunan yaitu dengan telah diterbitkannya dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sementara untuk Perda RPJPD dan RPJMD masih dalam proses.

Sedangkan penjabaran RPJMD untuk tahun 2009 telah dituangkan secara keseluruhan kedalam RKPD tahun 2009.

Sementara apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data dan Informasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.233.012.200,- terealisasi Rp. 2.161.316.500,- atau sebesar 93% dengan output berupa : Aplikasi E-Book dan buku Database sarana dan prasarana, 1 Peta dasar kecamatan serta pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan.
- b. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dari anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 795.040.000,- atau 99,8 % dengan keluaran berupa Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten Kutai Kartanegara.

- c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar dengan anggaran Rp. 1.500.000.000,- dapat terserap sebesar Rp. 1.365.265.600,- atau sebesar 91,02 % dengan keluaran berupa : 10 buku Masterplan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih Wilayah Pantai Kabupaten Kutai Kartanegara, 20 buku Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan Terbuka dan Study Kelayakan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Kota dan 20 buku Inventarisasi Perumahan Kumuh.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran sebesar 99% atau Rp 249.970.000,- dari alokasi sebesar Rp. 250.000.000,- yang dipergunakan untuk penyusunan Buku IRAP Kecamatan Tabang Kabupaten Kukar.
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.497.602.010,- dapat terealisasi sebesar 93,17 % atau Rp. 8.848.788.966,- yang dipergunakan untuk : Buku Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan sebanyak 180 eksemplar, Bintek Penyusunan Rencana Pemb. Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) kepada 54 aparatur desa, dokumen Perencanaan Pengembangan ICT (Information and Communication Technology) sebanyak 50 eksemplar, pelaksanaan Koordinasi Program Pembangunan di Bidang Sosbud, Pendukung Kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Musrenbang Nasional, 1 Software Kearsipan, 250 buku Review RPJMD,

- Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Prasarana Perkotaan dan Perdesaan, Buku Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 250 eksemplar, Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebanyak 400 eksemplar, 50 buah buku Renja Bappeda 2010, Buku LKPJ sebanyak 100 set, Buku LPPD sebanyak 50 buah.
- f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan anggaran sebesar Rp. 7.356.400.600,- dapat terealisasi sebesar Rp. 6.885.104.100,- (93,59%) dengan hasil berupa 13 jenis dokumen perencanaan bidang ekonomi dan pelaksanaan Musrenbang bidang perencanaan ekonomi serta 1 buah sistem aplikasi database.
 - g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.809.425.500,- dengan realisasi mencapai 87,23% atau sebesar Rp. 2.450.587.200,- dengan hasil berupa 5 jenis dokumen perencanaan bidang sosial budaya, Pelaksanaan Musrenbang bidang Sosial Budaya serta pelaksanaan Koordinasi Pendampingan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM).
 - h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.485.000.000,- dapat terealisasi Rp. 1.436.699.000,- atau 96,75% yang dipergunakan untuk penyusunan 5 jenis dokumen perencanaan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.
 - i. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana yang memanfaatkan alokasi dana sebesar 446.776.500,- atau 99,28 % dari aloaksi Rp. 450.000.000,-

yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Perencanaan Pengelolaan Lahan Kritis Wilayah Hulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, pada prinsipnya tidak ada hal-hal yang berarti. Sedikit permasalahan adalah pada proses pelaksanaan realisasi anggaran yang baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni 2009, sehingga hal tersebut sangat menghambat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya pada awal tahun anggaran seperti Pelaksanaan Musrenbang, Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan lain-lain.

Solusi yang perlu diambil untuk tahun yang akan datang adalah dengan menjalin koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan Bendahara Umum Daerah yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Bagian Keuangan.

vii. PERUMAHAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

- 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
- 2) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
- 3) Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

b. Program Pengembangan Perumahan

- 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada bidang Perumahan tahun 2009 ditunjukkan dengan besaran Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 55,83 %, dan Rumah layak huni 97,44 %.

Namun apabila ditilik dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran yang menyerap anggaran sebesar Rp. 349.687.000,- yang dipergunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran bagi 200 orang, Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran 200 orang dan Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran bagi 100 Orang ibu-ibu PKK.
- b. Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan berupa Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan terhadap 57 orang dengan anggaran sebesar Rp. 33.342.600,-

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan. Hal ini karena pada tahun anggaran 2009, bidang perumahan hanya diprogramkan pada Kantor Penanggulangan Kebakaran, sedangkan di Dinas

Pekerjaan Umum (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Perumahan) tidak ada memprogramkan kegiatan di pada urusan tersebut.

viii. **KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;**

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- 1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan
- 3) Pembinaan Bakti Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
- 4) Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda, Pemuda Pelopor
- 5) Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP)
- 6) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

- 1) Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda

c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

- 1) Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Di Tingkat Daerah
- 2) Permasalahan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong Peningkatan Prestasi Olahraga
- 4) Pengembangan Olahraga Rekreasi

- 5) Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga
- 6) Lomba Sehat Bugar Anak Pra Sekolah dan Kelompok Bermain
- 7) Pengadaan Alat Olah Raga Untuk SD, SMP dan SMA Sederajat
- 8) Pelaksanaan Identifikasi, Seleksi Bakat, Potensi Pelajar dan Kepemudaan Dalam Olah Raga di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 9) Invitasi Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten dan Nasional
- 10) Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga / Seleksi dan Persiapan Atlet menuju Porprov Balikpapan
- 11) Pelaksanaan Kompetisi Olah Raga / Kejuaran Nasional dan Tryout antar PPLP se Indonesia
- 12) Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga/Seleksi Atlet dan Persiapan Menuju Porseni Se Kaltim di Kabupaten Kutai Barat
- 13) Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga / Seleksi Atlet dan Persiapan Lomba Olah Raga Usia Dini

d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

- 1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2009 dalam urusan kepemudaan dan olah raga dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal

khususnya untuk penyediaan Gelanggang / Balai Remaja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 0,002%, sementara untuk penyediaan Lapangan Olah Raga telah mencapai 0,042% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

Namun jika dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.404.033.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.203.553.000,- atau 85,72% dengan hasil berupa Perkemahan Pramuka 55 orang, Paskibraka 36 Orang, Bakti Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan 18 orang, Pemilihan Pemuda Pelopor 40 orang, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) 40 orang dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 60 orang.
- b. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda yang dipergunakan untuk Pelatihan Pemuda Putus Sekolah sebanyak 40 orang telah menyerap anggaran sebesar 86,14% atau sebesar Rp. 148.165.000,- dari alokasi dana sebesar Rp. 172.000.000,-
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan anggaran sebesar Rp. 4.904.434.140,- mampu menyerap dana 90,57% atau Rp. 4.442.001.568,- yang dipergunakan untuk memperoleh keluaran berupa pembinaan terhadap Atlit Pelajar PPLPD 35 orang, kompetisi olah raga bagi 120 orang pelajar/mahasiswa, Pelatihan Pelajar Siswa Senam Jepen 130 org, Pelatihan Senam Sehat 36 orang, Lomba Sehat Bugar Bagi Anak Pra

- Sekolah 200 orang, Alat Olah Raga 51 Jenis, Lomba Lari Maraton 10 KM, Festival Olah Raga Tradisional 150 orang.
- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga yang dipergunakan untuk Pengurukan Tanah sebanyak 2.140 Kubik telah menyerap dana sebesar Rp. 204.275.100,- dari anggaran sebesar Rp. 229.187.100,- yang disediakan.

3. Permasalahan dan Solusi

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan program yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada. Namun dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut masih dirasakan adanya permasalahan, sebagai berikut :

- a. Untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, seperti pesantren kilat, pelatihan kepemimpinan OSIS, peserta pertukaran pemuda antar propinsi, Diklat Paskibraka, dan pemilihan pemuda pelopor, belum menyebar keseluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dikarenakan minimnya dana yang tersedia.
- b. Untuk peserta lomba olahraga Usia Dini yang diselenggarakan setiap tahun baik di tingkat propinsi maupun secara nasional, masih diikuti oleh siswa Sekolah Dasar/MI di kecamatan-kecamatan terdekat, dikarenakan belum tersedianya dana untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut hingga ke desa-desa.
- c. Beberapa event olahraga pelajar dalam rangka menseleksi/mencari bibit olahragawan yang berprestasi, hanya diikuti oleh pelajar SLTP dan SLTA terdekat,

dikarenakan disamping kurangnya sosialisasi juga kegiatan tersebut waktu penyelenggaraannya kurang tepat (bukan pada liburan sekolah). Hal ini disebabkan pencairan dana kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Pada pelaksanaannya dilapangan, solusi yang diambil Dinas Pemuda dan Olahraga pada permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Dengan mengalokasikan dana yang tepat untuk program dan kegiatan pembinaan generasi muda, perlunya intensifikasi dan sosialisasi yang kontinyu pada masyarakat pemuda seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Perlunya alokasi dana tambahan untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan lomba tingkat propinsi maupun secara nasional yang merata dari wilayah kecamatan hingga ke desa-desa.
- c. Pencairan dana kegiatan yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan Beberapa event olahraga pelajar dalam rangka menseleksi/mencari bibit olahragawan yang berprestasi.

ix. **PENANAMAN MODAL;**

1. **Program dan Kegiatan**

a. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

- 1) Seminar / Dialog Investasi
- 2) Pembentukan Satuan Tugas Penanaman Modal

- 3) Pembuatan Peralatan/Sarana Penunjang Promosi Inventasi
- 4) Pameran Promosi dalam Negeri
- 5) Pameran Promosi Luar Negeri
- 6) Pengembangan Situs Investasi Lewat Internet
- 7) Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Investasi (SIMI)
- 8) Koordinasi dan sinkronisasi bidang investasi antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- 1) Pembuatan Buku Profil dan Peluang Investasi
- 2) Penyusunan Katalog Profil Investasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- 3) Pembuatan CD Multimedia Interaktif Bidang Investasi
- 4) Penyusunan Data Investasi Kab Kutai Kartanegara
- 5) Pendataan Perijinan PMA dan PMDN
- 6) Monitoring, Pendataan dan Pelayanan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
- 7) Bimbingan Penyuluhan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 8) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Penanaman Modal
- 9) Evaluasi dan Pelaporan LKPM
- 10) Study Kelayakan Komoditi Andalan/Unggulan
- 11) Sosialisasi Undang-undang penanaman modal tahun 2007

12) Pemasangan Jaringan Local Area Network (LAN) dan Peralatannya

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Iklim penanaman modal di Kabupaten Kutai Kartanegara selama kurun waktu tahun 2009 ditunjukkan dengan Nilai Realisasi PMDN yang kenaikan / penurunan yang mencapai ... %.

Sementara apabila ditinjau dari segi program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan alokasi sebesar Rp. 3.983.833.600,- dengan serapan mencapai Rp. 3.888.243.918,- atau 97,60% yang dipergunakan untuk seminar/diskusi investasi dengan peserta 60 orang, pembelian peralatan promosi, Pameran skala Nasional 5 kali, Pameran Luar Negeri 2 kali, maintenance dan redesain website.
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan alokasi anggaran Rp. 2.651.918.800,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.557.169.800,- atau 96,43% dengan output yang dihasilkan berupa Buku Profil dan Peluang Investasi, Katalog Profil Investasi Pengusaha Kecil dan Menengah, CD Multimedia Interaktif Bidang Investasi, Data Investasi, Data Perijinan investasi, Sosialisasi Undang-undang penanaman modal 18 Kecamatan dari 50 Perusahaan Sebanyak 170 Orang serta pemasangan jaringan LAN.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan.

x. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

- 1) Pemberdayaan Usaha Koperasi

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

- 1) Pengembangan Pusat Informasi dan Bisnis KUKM

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- 1) Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi
- 2) Pemantapan Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam
- 3) Bantuan Kepada Koperasi dan UKM

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- 1) Pemeberdayaan Usaha Kecil Pedesaan
- 2) Operasional Lembaga Perkreditan Desa
- 3) Pelatihan AMT bagi Usaha IK dan Pemuda
- 4) Pengembangan Kewirausahaan dan Keuanggulan IKM

e. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 1) Bimbingan Teknis Pengembangan Produksi Kerajinan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan wirausaha melalui pengembangan Koperasi dan UKM pada tahun 2009 belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut terlihat dari indikator koperasi aktif sebesar 39,80% dan Usaha Mikro dan Kecil yang hanya sebesar 4,11%.

Namun demikian apabila ditinjau berdasarkan imlementasi program dan kegiatan dapat dilihat dari realisasi pelaksanaannya yaitu :

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan Usaha Koperasi dengan keluaran berupa Bimtek SKU Koperasi dan Pengelolaan WASERDA 60 Org pada 125 Koperasi yang menyerap anggaran sebesar Rp. 322.783.100,- atau 99,22% dari dana yang disediakan sebesar Rp. 350.000.000,-
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.140.000,- dapat diserap sebesar Rp. 821.859.100,- atau 70,84% yang dipergunakan untuk menghasilkan keluaran berupa Mapping KUMKM 18 Kecamatan, Pengadaan Banner, Baliho, Umbul-umbul, pakaian adat daerah, Tata Ruang, Neon Box.

c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi melalui kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Koperasi dan Pemantapan Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam dengan serapan anggaran sebesar Rp. 933.545.750,- atau 86,55% dari yang dialokasikan sebesar Rp. 1.078.617.000,- dengan hasil berupa Sosialisasi Koperasi Baru 75 Org, Bimtek Aplikasi KOMPAK 20 Org, Sosialisasi Perundang-Undangan 20 Org, Sosialisasi Pungsi dan Peran Dekopinda 20 Org, Pelatihan Akuntansi Koperasi 20 Org (150 Koperasi) serta Bimtek Kelembagaan KSP/USP 2 Kali 100 Org.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2009, tidak ada permasalahan yang berarti untuk bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

xi. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- 1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
- 2) Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK
- 3) Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
- 4) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- 5) Pengembangan Data Base Kependudukan

- 6) Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
- 7) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- 8) Tertib Hukum dan Sanksi Administrasi Kependudukan
- 9) Razia Kartu Tanda Penduduk
- 10) Pengawasan WNA
- 11) Pembuatan Akta Catatan Sipil
- 12) Pembinaan Administrasi Catatan Sipil
- 13) Penyajian Informasi dan Publikasi Data Kependudukan dan Catatan Sipil
- 14) Penataan dan Pemeliharaan Arsip Data Akta Capil dan Penduduk
- 15) Monitoring Pemutakhiran Data Penduduk

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Standar Pelayanan Minimal yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 untuk bidang kependudukan dan catatan sipil ditandai dengan telah diterapkannya KTP berbasis nasional, jumlah penduduk ber-KTP sebesar 77,37 % dan penduduk yang telah memiliki akta kelahiran mencapai 19,24%.

Sementara jika ditilik dari sisi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 7.324.109.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.384.130.080,- atau 87,17% yang dimanfaatkan untuk Cetak blanko KTP 225.000 set dan Kartu Keluarga 100 set, Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK sebanyak 10 orang, pembuatan Blanko KTP manual 66.650 Lbr, Santunan Kematian 300 Orang, Pemutahiran Data 17 Kecamatan, Bimtek terhadap 29 orang, Sosialisasi Pengawasan WNA 80 Orang dan pemutakhiran data penduduk.
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata yang dipergunakan untuk mengikuti pameran Merah Putih di Sanga-Sangan yang menyerap dana sebesar Rp. 28.010.500,- dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Selama ini dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat adanya hambatan mengenai operasional pelayanan publik yang berada di 18 Kecamatan.

Solusi :

- Untuk mengatasi permasalahan yang ada perlu adanya koordinasi antar Instansi terkait.

xii. KETENAGAKERJAAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
- 3) Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Latihan Swasta
- 4) Pelatihan pengembangan motivasi berprestasi (AMT)
- 5) Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja
- 6) Pelatihan Keterampilan Bagi Orang Tua Pekerja Anak

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

- 1) Pelatihan/ Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- 2) Pembekalan dan Pembinaan Petugas Pengantar Kerja
- 3) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- 1) Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 2) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang syarat-syarat kerja
- 3) Pengumpulan data KHL untuk penetapan UMK dan UMSK
- 4) Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang serikat pekerja/ serikat buruh

- 5) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Norma Kerja
- 7) Pembinaan dan Pengawasan Higiene Perusahaan
- 8) Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum tolok ukur keberhasilan suatu pemerintahan daerah dalam bidang ketenaga kerjaan dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja dan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Untuk tahun anggaran 2009, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hanya mencapai masing-masing 65,15% untuk tingkat partisipasi angkatan kerja dan sebanyak 21,33% jumlah pencari kerja yang sudah ditempatkan.

Namun demikian apabila dilihat dari segi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selama tahun anggaran 2009 dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi sebesar Rp. 1.523.532.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.107.966.500,- atau 72,72% yang dipergunakan untuk menghasilkan suatu output berupa : Alat Percontohan dan Peraga Keterampilan Servis Sepeda Motor, Las Listrik dan Meubelair; Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi 60 orang Pencari Kerja; Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga

Pelatihan Kerja (30 Orang untuk 15 LPK); Pelatihan pengembangan motivasi berprestasi (AMT) 42 orang serta Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja terhadap 450 orang.

- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 488.715.200,- dapat menyerap sebesar Rp. 477.460.100,- atau 97,7% dengan keluaran berupa Pelatihan / Penerapan Pengembangan Teknologi Tepat Guna bagi 40 orang pencaker, Pembekalan dan Pembinaan bagi 18 orang Petugas Pengantar Kerja, Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja kepada 420 Orang angkatan kerja baru.
- c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dari alokasi dana sebesar Rp. 1.359.884.600,- dapat menyerap sebesar 99,28 % atau Rp. 1.350.064.600,- yang menghasilkan keluaran berupa Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi 500 karyawan; Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang syarat-syarat kerja terhadap 400 karyawan; Sosialisasi peraturan ketenagakerjaan tentang serikat pekerja/ serikat buruh bagi 250 karyawan; Pembinaan K3 pada 77 Perusahaan; Pembinaan Norma Ketenagakerjaan untuk 29 Perusahaan serta Pembinaan dan Pengawasan Higiene pada 60 Perusahaan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Kendala utama pelaksanaan pembangunan selama ini pelaksanaan APBD tidak tepat waktu selalu terlambat.

- b. Sarana kerja berupa kantor sangat kurang memadai.
- c. Terbatasnya tenaga pengawas dan perselisihan hubungan industrial yang memiliki standar kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Solusi

- a. Agar dapat dialokasikan dana pengadaan tanah dan bangunan kantor yang lebih representatif
- b. Bagian Kepegawaian Daerah agar dapat mengusulkan PNS Golongan III kualifikasi S.1 untuk dilatih menjadi tenaga pengawas.

xiii. KETAHANAN PANGAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- 1) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- 4) Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif Bagi Petani/Kelompok Tani
- 5) PRA PENAS Ke XIII Tahun 2011

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

- 2) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- 3) Pengembangan Desa Mandiri Pangan
- 4) Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- 5) Pengembangan Sistem Informasi Pasar
- 6) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- 7) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya
- 8) Pendampingan Kegiatan Dana Talangan DPM LUEP
- 9) Pameran Ketahanan Pangan

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah
- 2) Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

- 1) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
- 2) Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- 1) Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

f. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

1) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan dalam bidang Ketahanan Pangan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 ditunjukkan dengan ketersediaan pangan utama rata-rata sebesar 180 kg/jumlah penduduk per tahun.

Sementara jika dilihat dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan anggaran sebesar Rp. 570.409.500,- yang dapat didipergunakan untuk Magang Petani pada P4S 30 Orang, Pelatihan pada 20 Tempat (BPP Kecamatan untuk 30 Orang Peserta), Pertemuan KTNA Tingkat Kabupaten dan Kecamatan 510 Orang dan Pemberian Penghargaan pada 40 Kelompok Tani sebesar Rp. 564.209.000,- atau 98,91%.
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.284.112.000,- dapat diserap sebesar 88,83% atau Rp. 1.140.615.000,- dengan hasil berupa Lomba Pangan Tingkat Kabupaten 40 Orang (8 Kecamatan) dan Tingkat Propinsi 10 Orang, Pendampingan Desa Mandiri Pangan pada 5 Desa, Identifikasi Inventarisasi dan Sosialisasi Lumbung Pangan pada 13 Kecamatan, Pengembangan Informasi Pasar pada 10 Kecamatan, Bibit Tanaman 22 Bungkus/Roll, Bibit Ternak Sapi 3 Ekor, Bahan Obat-obatan 6 Jenis 715 Kg/Liter serta Penggandaan Informasi Permintaan Pasar 5000 Lembar.

- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan dengan keluaran berupa Model Forum Usaha Petani Berbasis Agribisnis 10 Unit, Biaya Pengolahan Lahan Demplot Penyuluh 1000 O/H, Hand Sprayer 10 Unit, Bibit Tanaman 2 Jenis 50 Bungkus/Roll, Bahan Obat-obatan 7 Jenis 11.060 Kg/Liter serta Cetak Brosur dan Leaflet 1200 Lembar dengan penyerapan dana sebesar Rp. 161.428.000,- atau 95,05% dari dana yang disediakan sebesar Rp. 169.838.000,-
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan berupa Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan di 18 kecamatan dengan serapan dana mencapai 100% dari alokasi sebesar Rp. 100.461.000,-
- e. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan dengan hasil berupa Demplot Pelatihan dan Pembinaan Penyuluh Pertanian 35 Orang yang memerlukan dana sebesar Rp. 1.259.052.500,- atau 86,20% dari anggaran sebesar Rp. 1.460.687.500,-

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2009 untuk urusan ketahanan pangan tidak mengalami permasalahan yang berarti, hanya yang menjadi sedikit hambatan adalah pada proses pencairan keuangan yang terlambat membuat pelaksanaan program dan kegiatan juga mengalami keterterlambatan.

xiv. **PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;**

1. Program dan Kegiatan

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 1) Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

- 1) Pembinaan Organisasi Perempuan
- 2) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera
- 3) Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- 1) Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan
- 2) Peningkatan Kapasitas & Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
- 3) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak

- 4) Pengembangan Materi & Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan & Keadilan Gender (KKG)
- 5) PKK Kabupaten Kutai Kutai Kartanegara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan akan jika dilihat berdasarkan indikator kinerja kunci cukup memuaskan, hal ini terlihat dari Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 96,68% dengan partisipasi angkatan kerja mencapai 95,07%.

Demikian juga apabila dilihat dari capaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan yang telah mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- yang dipergunakan untuk Sosialisasi Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan keluaran berupa Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pedampingan Korban KDRT kepada 80 orang peserta dengan biaya sebesar Rp. 137.120.000,- atau 97,94 % dari dana yang tersedia sebesar Rp. 140.000.000,-
- c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.235.952.000,- mampu direalisasikan sebesar Rp. 1.198.444.000,- atau 96,97% dengan hasil berupa

pelatihan bagi Pelatihan 50 Org pada 25 Organisasi Perempuan, Penyuluhan Bagi 35 orang Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera, Bimbingan Manajemen Usaha bagi 590 orang Perempuan Dalam Mengelola Usaha.

- d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan anggaran mencapai Rp. 1.458.178.500,- dapat diserap sebesar Rp. 1.451.051.000,- atau 99,51% dengan keluaran berupa Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan dengan peserta sebanyak 189 orang serta Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.

3. Permasalahan dan Solusi

Sebagai SKPD yang baru, maka dalam pelaksanaan pembangunan bidang Pemerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak masih belum dapat berjalan secara maksimal, disamping itu permasalahan yang klasik terjadi adalah adanya keterlambatan proses pencairan dana yang baru bisa dilaksanakan pada bulan Juni 2009.

xv. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Keluarga Berencana

- 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana
- 3) Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

- 4) Penyuluhan dan Pelayanan Kontrasepsi
- 5) Pembinaan Pelajar dan Mahasiswa Peduli KB
- 6) Peningkatan Kinerja Pelayanan KB
- 7) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Sejahtera
- 8) Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009
- 9) Pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2009
- 10) Pelayanan KB Gratis Bagi Masyarakat Miskin
- 11) Pendataan Keluarga Sejahtera

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tingkat keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera masih dapat dikatakan berhasil untuk ukuran suatu daerah dengan kondisi wilayah yang sangat luas dan persebaran penduduk yang masih belum merata. Hal ini terlihat dari prevalensi peserta KB aktif yang masih berada pada kisaran 63,68%.

Sementara jika dilihat berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka pelaksanaan program Keluarga Berencana yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.914.837.497,- dengan realisasi keuangan mencapai 96,6% atau sebesar Rp. 2.815.863.556,-. Hasil dari alokasi dana tersebut berupa Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin berupa Pil KB 4.839 Strip, Pembinaan Keluarga Berencana bagi 40 orang, Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB terhadap 30 orang, Pembinaan terhadap 90 Pelajar dan Mahasiswa Peduli KB, Pemberdayaan Ekonomi bagi 40 Keluarga

Sejahtera serta Pelayanan KB Gratis Bagi Masyarakat Miskin di 3 kecamatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Sebagian kegiatan yang dikelola untuk bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera merupakan hibah / pergeseran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, sehingga ada beberapa program dan kegiatan yang dalam pelaksanaannya agak dipaksakan. Selain itu pengalokasian dana tersebut masih relatif sangat minim.

Untuk mengatasi persoalan yang ada, maka diharapkan pada tahun anggaran 2010 dapat dialokasikan dana yang lebih besar untuk urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

xvi. PERHUBUNGAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- 1) Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
- 2) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, danau dan Penyeberangan.
- 3) Lanjutan Pembangunan Pelabuhan di Kec. Ma. Jawa.
- 4) Pembangunan Pelabuhan RT VIII Sebulu Seberang.
- 5) Lanjutan Penyusunan Feasibility Study (FS) Pelabuhan Kota Bangun.

- 6) Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun (Bantuan Keuangan Propinsi).
- 7) Pendamping Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Terpadu Kecamatan Kota Bangun.
- 8) Pembangunan Stop Over Kab. Kukar (Bantuan Keuangan Propinsi).
- 9) Pendamping Kegiatan Stop Over Kab. Kutai Kartanegara.
- 10) Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja.
- 11) Perencanaan Teknis Pembangunan Stop Over dan Pelabuhan Induk Kota Bangun.
- 12) Perencanaan Teknis Pembangunan Pelabuhan Kuala Samboja
- 13) Pembangunan Stop Over Km 54 Bukit Soeharto (Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2008)

b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- 1) Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Timbang Seluas ± 1,5 Ha di Kecamatan Kota Bangun
- 2) Pembebasan Lahan Pelabuhan di Kuala Samboja

c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
- 3) Perawatan/Kalibrasi Alat Uji Kendaraan
- 4) Perawatan Fasilitas Lalu Lintas

d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- 1) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
- 2) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Pengerukan alur sungai mahakam se Kab. Kukar (Subsidi Prop 2008)/ Lanjutan
- 5) Pengadaan dan Pemasangan sarana dan prasarana Fasilitas Lalin Jalan (lanjutan)

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- 1) Pembangunan Lokasi Parkir Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Pembangunan Pelabuhan Desa dan Pelabuhan Penyeberangan di Kecamatan
- 3) Pembangunan Dermaga Muara Jawa
- 4) Pembuatan Dermaga Terapung / Ponton
- 5) Rehab Pelabuhan Pasir di Loa Janan Ulu (Depan Gg. Kutai)

f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- 1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
- 2) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Sungai di Kutai Lama

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari bidang Perhubungan, capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 dapat dilihat dari

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan nilai 0,033% jumlah angkutan darat per jumlah penumpang.

Keberhasilan lainnya dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.933.498.089,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 86.565.030.435,- atau 76,65% yang dimanfaatkan untuk memperoleh output berupa dokumen FS dan DED Pengembangan Terminal Terpadu Kawasan Bisnis dan Rekreasi, Pembuatan Dermaga Apung untuk Tambat Speed, Pembangunan Pelabuhan di Sebulu Seberang, dokumen FS, Study Amdal dan DED di Kota Bangun, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kota Bangun serta Studi Amdal Pembangunan Pelabuhan Laut Samboja.
- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dengan anggaran Rp. 2.206.487.500,- dapat diserap sebesar Rp. 2.152.073.900,- atau 97,53% yang menghasilkan keluaran berupa Rehab Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor 3 kegiatan, Rehab Dermaga 6 Kegiatan serta untuk perawatan alat uji kendaraan dan fasilitas lalu lintas.
- c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dengan anggaran mencapai Rp. 36.014.552.800,- dengan serapan sebesar Rp. 30.376.292.912,- atau 84,34% yang dimanfaatkan untuk Pengerukan alur sungai mahakam serta Pengadaan dan Pemasangan sarana dan prasarana Fasilitas Lalin Jalan.

- d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.428.365.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.050.736.500,- atau 91,47% dengan keluaran berupa Pembangunan Parkir Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Pembangunan Dermaga Muara Jawa, Pembuatan Dermaga Terapung / Ponton dan Rehab Pelabuhan Pasir di Loa Janan Ulu.
- e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan berupa pemasangan Rambu Sungai di Kutai Lama dengan serapan dana sebesar Rp. 690.269.500,- dari alokasi sebesar Rp. 2.050.000.000,- atau hanya 33,67%.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Transportasi umum belum mampu menunjang keseluruhan daerah masih 5 (lima) Kecamatan 27,78 % yang belum terlayani untuk transportasi darat;
- b. Kurangnya fasilitas terminal serta belum membadainya sarana terminal yang ada sehingga tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya;
- c. Masih relatif tingginya kerawanan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten Kutai Kartanegara dikarenakan :
 - Masih adanya fasilitas prasarana jalan berupa rambu lalu lintas rusak dan hilang;
 - Prasarana jalan yang belum membadai sehingga sangat mempengaruhi kelancaran sarana transportasi darat;
 - Kurangnya personel dilapangan sehingga seringkali terjadi pelanggaran lalu lintas jalan;

- Kurangnya sarana mobilitas oprasional / Wasdal;

Solusi :

Transportasi darat memiliki fleksibelitas yang tinggi dibanding yang lainnya, oleh karenanya bidang darat harus mendapatkan perhatian agar mobilitas masyarakat semakin lancar, untuk ini perlu peningkatan sarana prasarana transportasi secara kualitas maupun kuantitas serta perlunya kampanye dan sosialisasi atau penjurusan ketertiban lalu lintas angkutan yang berkesinambungan.

xvii. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

- 1) Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- 2) Pengembangan Konten Video Profil
- 3) Pendampingan / Asistensi Aplikasi SIMDA
- 4) Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan
- 5) Sosialisasi Elektronik Procurement
- 6) Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Satu Atap (SIMTAP)

b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

- 2) Pelatihan Indonesia Go Open Source (IGOS)
- 3) Pelatihan Administrator SIMDA Keuangan

c. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

- 1) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- 2) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 3) Pengembangan Website
www.kutaikartanegarakab.go.id
- 4) Pelaksanaan Pameran Pembangunan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak lepas dari adanya kepedulian pemerintah daerah dengan penyediaan dan pemasangan infrastruktur jaringan dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan, sehingga akses informasi masyarakat relatif sudah lebih baik di banding beberapa tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya website pemerintah kabupaten, maka akses informasi bagi masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur sangat terbuka luas.

Demikian juga apabila dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diuraikan antara lain :

- a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan anggaran sebesar Rp. 2.271.418.605,- dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 2.169.626.242,- atau 95,52% yang menghasilkan output berupa Pemasangan Fiber

Optik, 1 Video Profil, Sosialisasi Elektronik Procurement dan SIMTAP masing-masing kepada 22 orang.

- b. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang mampu memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 535.440.500,- secara maksimal untuk keperluan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi bagi 25 orang, Pelatihan Indonesia Go Open Source (IGOS) kepada 300 orang serta Pelatihan Administrator SIMDA Keuangan dengan peserta sebanyak 15 orang.
- c. Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 603.149.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 463.389.785,- atau 76,83% dengan keluaran berupa Biaya Pemasangan Iklan, Berita dan Video Berita 3 kali, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 35 SKPD, Belanja Domain Website Kutai Kartanegara, Pembuatan CMS Dinas/Instansi.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan selama tahun anggaran 2009

xviii. PERTANAHAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

- 1) Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah

b. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- 1) Pembebasan (Ganti Rugi) Lokasi Bangunan SD Bendang Raya Seluas $\pm 14.040 M^2$ di Kec. Muara Badak kab. Kukar
- 2) Pembebasan Lahan Kec. Muara Muntai dan Loa Janan
- 3) Pembebasan Lahan Kec. Muara Badak
- 4) Pengurukan Tanah di Madrasah Al-Idrus Kec. Tenggarong
- 5) Pengadaan Lahan Lokasi Pembelajaran Lingkungan Alam dan Education Center
- 6) Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Gedung SMP 1 Fillial Rempanga Kec. Loa Kulu
- 7) Pembebasan Lahan / Pengadaan Tanah untuk SD Kec. Tenggarong dan Loa Janan
- 8) Pembebasan Lahan untuk Pasar Kec. Muara Badak
- 9) Pembebasan Tanah Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda lainnya yang Terkena Pembebasan lahan untuk peningkatan ruas jalan jam bentong ke pal lima Tenggarong
- 10) Pengurukan pengembalian batas dan petas situasi lahan Korpri 50 Ha Tahun 1997 dan perluasan lahan Korpri untuk areal buffer 4,25 Ha Tahun 2009
- 11) Pembebasan Tanah Untuk Jembatan Timbang Seluas $\pm 1,5$ Ha di Kecamatan Kota Bangun
- 12) Pembebasan Lahan Pelabuhan di Kuala Samboja
- 13) Pembebasan Lahan Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda Lainnya yang Terkena di Pembebasan Lahan di Kecamatan
- 14) Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang

- 15) Monitoring Ijin Lokasi dan Evaluasi
- 16) Pengelolaan Penerbitan SK Ijin Lokasi Daerah
- 17) Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- 18) Pembuatan Data Pokok Pertanahan Daerah
- 19) Pembaharuan dan Pemeliharaan Data dan Peta Tata Guna Tanah dan Tata Ruang serta Pelaksanaan Survey Tata Guna Tanah
- 20) Pembinaan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT)
- 21) Pembebasan Lahan, Tanam Tumbuh Bangunan dan Benda-benda lainnya yang terkena di Pembebasan Lahan di Kecamatan
- 22) Pembebasan Tanah untuk Pemakaman Umum Muslimin di Kelurahan Loa. Ipuh Kec. Tenggarong dan Pembebasan
- 23) Pembebasan Lahan / Tanah untuk Jalan Masuk Stadion, Lokasi Makam dan Lokasi Pemukiman/ Ujung Jembatan
- 24) Pembebasan Lahan Ktr Kades/BPD Gas Alam, Kantor Kades/BPD Desa Batu-Batu Kec Muara Badak, Fasum Sekolah di Kec. Ma. Badak, Sumur Bor PDAM di Sanga-Sanga
- 25) Ganti Rugi Lapangan Sepak Bola Marang Kayu dan Lokasi SDN 001 110x90m, 60x90m
- 26) Pembebasan Tanah dan Sertifikasi utk Pembangunan Sekolah di Ds Semayang
- 27) Pembebasan dan Sertifikasi Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Polsek kec. Kenohan
- 28) Pembebasan Tanah Untuk KUA Kec. Kenohan

- 29) Pembebasan lahan untuk korban warga Kembang Janggut
- 30) Pembebasan Lahan untuk Kantor Cab. Dinas Pertanian
- 31) Ganti Rugi Bangunan yang Terkena Turap Beton (Muara Kaman ilir)
- 32) Pembebasan Lahan Situs Sejarah Ma. Kaman Ulu
- 33) Pembebasan Lahan Stadion Mini Muara Jawa
- 34) Pembebasan Lahan Wisata Pantai Pengempang Desa Tanjung Limau seluas 8 Ha di Kec Muara Badak
- 35) Pembebasan lahan Pembangunan Gedung pendidikan Rt. 7 Ma Badak Ulu
- 36) Pembebasan Lahan Pasar Desa Badak Baru Kec. Ma Badak
- 37) Pembebasan Tanah Kantor Camat Tenggarong
- 38) Pengelolaan Ijin Lokasi dan Penetapan Lokasi
- 39) Pembebasan Lahan, Tanah Tanam Tumbuh dan Bangunan Tersebar di Empat Kecamatan
- 40) Pembebasan Lahan Untuk Perkantoran Seluas \pm 5 Ha di Kecamatan Anggana Bangunan Pemerintahan di Kec. Kenohan, Sarana dan Prasarana Pemerintahan di Kec. Muara Wis, Pembebasan Untuk Rumah Dinas Kec. Loa Janan
- 41) Pembebasan Tanah Untuk Musholla Rt. 21 Kec. Muara Jawa, TK Al-Qur'an, LPM, Lahan Sekolah Kec. Muara Muntai, Masjid Ukhuwah Desa Muara Badak Ulu Kec, Muara Badak
- 42) Pembebasan Lahan Untuk Perluasan Rumah Dinas Pemda di Jalan Wolter Monginsidi Seluas 6.893 M²

- 43) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tenggarong sebanyak 11 Lokasi
- 44) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tenggarong Seberang sebanyak 13 Lokasi
- 45) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan
- 46) Pembebasan lahan untuk Lapangan Sepak Bola Kec. Loa Kulu
- 47) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Loa Janan sebanyak 10 Lokasi
- 48) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Badak sebanyak 7 Lokasi
- 49) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Badak sebanyak 9 Lokasi
- 50) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Kayu sebanyak 21 Lokasi
- 51) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Jawa sebanyak 4 Lokasi
- 52) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Samboja sebanyak 8 Lokasi

- 53) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Sebulu sebanyak 5 Lokasi
- 54) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Kaman sebanyak 12 Lokasi
- 55) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 10 Lokasi
- 56) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan Benda-Benda Lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) Di Kecamatan Kota Bangun sebanyak 8 Lokasi
- 57) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma.Muntai sebanyak 10 Lokasi
- 58) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kenohan sebanyak 2 Lokasi
- 59) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Kembang Janggut sebanyak 13 Lokasi
- 60) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Tabang sebanyak 7 Lokasi
- 61) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Wis sebanyak 3 Lokasi
- 62) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Anggana sebanyak 2 Lokasi

63) Pembebasan Lahan untuk Kantor Cabang Dinas Pertanian Kac. Loa Janan

c. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

1) Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah di Luar Pengadilan

d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1) Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal

2) Inventarisasi Tanah Garapan / Tanah Negara

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam bidang pertanahan ditunjukkan dengan besaran luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian ijin lokasi. Untuk tahun 2009 capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai %

Sementara apabila ditinjau berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dari alokasi anggaran yang mencapai 76.488.234.616,- hanya mampu direalisasikan sebesar 10,35% atau Rp. 7.912.716.587,- yang dipergunakan untuk Pengadaan Lahan Lokasi Pembelajaran Lingkungan Alam dan Education Center, Pembebasan Lahan Ktr Kades/BPD Gas Alam, Kantor Kades/BPD Desa Batu-Batu Kec Muara Badak, Fasum

Sekolah di Kec. Ma. Badak, Sumur Bor PDAM di Sanga-Sanga, Ganti Rugi Lapangan Sepak Bola Marang Kayu dan Lokasi SDN 001 110x90m, 60x90m, Pembebasan lahan Pembangunan Gedung pendidikan Rt. 7 Ma Badak Ulu, Pembebasan Tanah Kantor Camat Tenggara.

- b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dari alokasi yang disediakan sebesar Rp. 300.000.000,- hanya terealisasi Rp. 104.027.700,- atau 34,68% untuk Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Masalah Tanah di Luar Pengadilan.
- c. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah yang diimplementasikan dalam bentuk Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah terhadap 38 orang dengan anggaran sebesar Rp. 30.248.000,-

3. Permasalahan dan Solusi

Rendahnya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pertanahan disebabkan oleh pergeseran anggaran untuk pembebasan lahan pada APBD Perubahan 2009 dari Bagian Perlengkapan ke Dinas Teknis dan Kecamatan, sehingga tidak cukup waktu untuk proses pembebasan lahan tersebut.

Solusi dari permasalahan tersebut diatas adalah dengan mengalokasikan kembali pada APBD 2010 untuk pembebasan lahan yang dikelola oleh Dinas Teknis.

xix. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 1) Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
- 2) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
- 3) Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
- 4) Sosialisasi Permendagri No.12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah
- 5) Riset/survey tentang nilai-nilai Nasionalisme
- 6) Mengadakan pemantuan terhadap warga negara Asing (WNA)
- 7) Sosialisasi Permendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006
- 8) Pemantauan Deteksi Dini di Daerah (Kominda)
- 9) Fasilitasi Pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan dalam upaya peningkatan wasbang
- 10) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Deteksi Dini Kondisi Daerah

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

- 1) Pengerahan dan kesiagaan anggota linmas
- 2) Pemutahiran data anggota Linmas
- 3) Diklat anggota Linmas dalam PAM Pemilu 2009
- 4) Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anggota Linmas
- 5) Fasilitasi Anggota Linmas Dalam Rangka Membantu PAM Pemilu Tahun 2009
- 6) Latihan Dasar Satuan Linmas
- 7) Pengerahan Satuan Linmas Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
- 8) Diklat Anggota Linmas dalam PAM PILKADA

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- 1) Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik
- 2) Sosialisasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Partai Politik
- 4) Sosialisasi Undang Undang No 8 Tahun 1985
- 5) Bimbingan Teknis Bendaharawan Partai Politik
- 6) Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Partai Politik
- 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi.

d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- 1) Latihan SAR bagi anggota Hansip/Linmas
- 2) Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
- 3) Sosialisasi Undang-undang No 24 Tahun 2007
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman / Korban Bencana

e. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PEMILU Tahun 2009
- 2) Desk Pilkada

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai tolok ukur keberhasilan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinilai berdasarkan jumlah kegiatan pembinaan

Politik Daerah dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Untuk Tahun Anggaran 2009, capaian kinerja berdasarkan indikator tersebut mencapai masing 11 kegiatan Pembinaan Politik Daerah dan 1 kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP.

Sementara capaian kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.944.025.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.547.897.800,- atau 79,62% dengan keluaran berupa :
 - Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama dengan target peserta 225 orang di 3 Kecamatan.
 - Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Budaya Luhur Bangsa dengan peserta 100 orang di 2 Kecamatan.
 - Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa dengan peserta 150 orang di 2 Kecamatan.
 - Sosialisasi Permendagri No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah dengan peserta 307 Orang di 4 Kecamatan.
 - Riset/Surve Tentang Nilai-Nilai Nasionalisme, dengan penyebaran kuisioner kepada 196 orang di 12 Kecamatan.
 - Mengadakan Pemantauan Terhadap Warga Negara Asing (WNA) di 12 Kecamatan.

- Sosialisasi Permendagri No. 9 dan 8 Tahun 2006 dengan peserta 200 orang di 2 Kecamatan.
 - Pemantauan Diteksi Dini Di Daerah (Kominda) dengan 14 titik amatan di 14 kecamatan.
 - Pemantauan Diteksi Dini Di Daerah (Kominda) dengan 14 titik amatan di 14 kecamatan.
 - Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan berbagai Forum Keagamaan Dalam Budaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan, dengan peserta 150 orang di 2 Kecamatan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dengan anggaran sebesar Rp. 7.915.329.180,- dan realisasi mencapai Rp. 6.060.379.280,- atau 76,57% dengan hasil berupa :
- Pengerahan dan Kesiagaan Anggota Linmas 17 kegiatan.
 - Pemutahiran Data Anggota Linmas di 18 Kecamatan.
 - Diklat Anggota Linmas dalam PAM Pemilu 2009, dengan peserta 150 di 3 Kecamatan.
 - Pembinaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Anggota Linmas, dengan peserta 20 Orang.
 - Fasilitasi Anggota Linmas Dalam Rangka Membantu PAM Pemilu 2009, pengadaan Pakaian Dinas Linmas untuk 2.928 buah Pakaian Dinas Linmas.
 - Latihan Dasar Satuan Linmas, dengan peserta 240 orang di 4 Kecamatan.

- Pengerahan Satuan Linmas dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, dengan peserta 2.928 Orang di 18 Kecamatan.
- c. Program Pendidikan Politik Masyarakat yang mendapat kucuran dana Rp. 1.902.789.400,- dengan realisasi mencapai Rp. 1.574.077.000,- atau 82,72% dengan hasil berupa :
- Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, dengan peserta 279 Orang di 3 Kecamatan.
 - Sosialisasi Bantuan Keuangan kepada 38 Partai Politik.
 - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Parpol, dengan monitoring 38 Parpol di 18 Kecamatan.
 - Sosialisasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, dengan peserta 240 orang di 4 Kecamatan.
 - Bimbingan Teknis Bendaharawan Parpol, dengan peserta 38 bendahawan parpol.
 - Tim Peneliti dan Pemeriksa Administrasi Parpol dengan target penelitian 8 Parpol peserta Pemilu 2004 dan 38 parpol peserta Pemilu 2009.
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Berdemokrasi, dengan peserta 1100 orang dari 10 lembaga di 15 Kecamatan.
- d. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.438.045.920,- hanya mampu terserap 36,29% atau Rp. 884.816.850,- dengan keluaran berupa :

- Latihan SAR bagi Anggota Hansip/Linmas, dengan peserta 23 orang.
 - Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi pada 13 Kecamatan.
 - Sosialisasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, dengan peserta 200 Orang.
- e. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dengan alokasi dana mencapai Rp. 7.870.619.500,- dan realisasi sebesar Rp. 5.889.497.965,- atau 74,83% untuk :
- Fasilitasi pelaksanaan Pemilu tahun 2009 (Tim Koordinasi Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu 2009) dibiayai APBD Murni. Dengan kegiatan Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan suara 9.005 orang.
 - Desk Pilkada.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi khususnya Penanganan Bencana masih terkendala sarana dan prasarana serta Anggaran yang sangat terbatas.

Solusi yang telah diambil untuk kegiatan penanganan Bencana dengan cara berkoordinasi dengan Instansi terkait, sedangkan mengenai Anggaran mendapat bantuan dari : APBD II dan Partisipasi Perusahaan dan Masyarakat.

xx. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- 4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 7) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 8) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 9) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 14) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 15) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 16) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 17) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

- 18) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/
Teknis Perkantoran
- 19) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
- 20) Tambahan Penghasilan / Bankeu Provinsi APBD-P
TA 2009
- 21) Penerapan Padat Web
- 22) Pembuatan Web Dinas Pendidikan Kab. Kukar
- 23) Pengembangan Sistem Komputerisasi Pengolahan
Data Bidang Sarana Prasarana
- 24) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
PNS
- 25) Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran
- 26) Penyediaan Perlengkapan Kegiatan Hari- hari
Tertentu
- 27) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 28) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial Se-
Kalimantan Timur
- 29) Tertib Administrasi Kepegawaian
- 30) Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum
dan Perlengkapan
- 31) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 32) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
(Lanjutan)
- 33) Penyediaan Jasa Teknis Perkantoran Bagian
Perlengkapan
- 34) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pengelola
Bantuan Keuangan Pada SKPD

- 35) Tambahan Perbaikan Kesejahteraan Untuk Tenaga Tidak Tetap daerah (T3D), Pasukan Kuning dan Pensiunan di Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara
- 36) Pengelolaan Kearsipan Sub Bagian Keuangan Setkab. Kukar Tahun 2009
- 37) Pendataan Monografi di 18 Kecamatan Dalam Kabupaten Kutai Kartanegara
- 38) Penataan dan Penyusunan Arsip / Dokumen pada Bagian Pemerintahan
- 39) Keolahragaan Sekretariat Daerah
- 40) Pendampingan Program Beasiswa dan Stimulan Bagi Mahasiswa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 41) Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 42) Pengelolaan Data Penerima Bantuan Pendidikan
- 43) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non PNS
- 44) Pengelolaan Data Gaji PNS
- 45) Penyediaan Jasa Representasi
- 46) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah (Murni)

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 5) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 6) Pengadaan Mebeleur
- 7) Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya

- 8) Pengadaan Mobil Pick Up Keperluan Operasi Trantib ke Kecamatan
- 9) Pengadaan Peralatan Dapur Lainnya
- 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
- 11) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
- 13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Genset
- 15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Insenerator
- 16) Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman dan Cleaning Service
- 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
- 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
- 19) Sewa Gedung dan Alat Angkutan Lainnya
- 20) Pengadaan Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan
- 21) Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih / Air Minum
- 22) Perbaikan Instalasi Listrik Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kukar
- 23) Pembuatan Sekat dan Papan Nama Ruangan Pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Kukar
- 24) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- 25) Rehabilitas Kantor Penanggulangan Kebakaran (Lanjutan)
- 26) Penambahan ruang sekretariat baru pada Masjid Muhammad Sayyid Kel. Baru Kec. Tenggarong
- 27) Rehab Kantor Kecamatan Sanga Sanga
- 28) Penambahan / Perluasan Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

- 29) Land Scape dan Semenisasi Parkir Kantor Bupati A dan B serta Kantor Bappeda
- 30) Penambahan / Perluasan Kantor DPRD kab Kukar
- 31) Lanjutan Perencanaan Perkantoran Sewa di Kec. Tenggarong
- 32) Perencana Pembangunan Gedung PMK Kec. Tenggarong
- 33) Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan Timbau (Kejaksaan)
- 34) Renovasi BPU/Kantor Desa Di Kec. Muara Badak (BPU Ds. Badak Ilir dan Desa batu-batu Kantor Desa Badak Baru dan Desa Badak Mekar (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 35) Pembangunan Kantor KORAMIL Tenggarong Seberang
- 36) Pembangunan Gedung Pusat Informasi Bisnis (Bidang Koperasi dan UKMM)
- 37) Pembebasan Lahan Korpri Desa Perjiwa Tenggarong Seberang
- 38) Halaman Upacara 35m x 40m Sanga-sanga Dalam Kec. Sanga-sanga
- 39) Rehabilitasi Wisma Pemkab Kukar Jl. Cimahi Jakarta
- 40) Rehab halaman parkir Kedaton Kukar
- 41) Perencanaan Pengadilan Negeri Tenggarong (Penambahan / Perluasan Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong) DPU
- 42) Pembangunan Gedung Serbaguna Desa Muara Badak Ilir (Bantuan Keuangan Provinsi)

- 43) Penambahan Ruang Kantor Desa Badak Baru (Bantuan Keuangan Provinsi)
- 44) Peningkatan Jalan dan pembuatan parit di perumahan Kodim 0906 Tenggara
- 45) Pembangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kukar (Lanjutan)
- 46) Pembangunan Rehab Kodim (Lanjutan)
- 47) Perawatan dan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peningkatan Bawah Air
- 48) Pembangunan Tempat Parkir Kantor Dinas Sosial Kab. Kukar
- 49) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Desa
- 50) Pembuatan Sekat dan Rehabilitasi Gudang Pemkab
- 51) Pengadaan Furniture, Interior Perumahan Pemkab di Bukit Biru Kec. Tenggara
- 52) Pengadaan Mobil Truck Sampah untuk Keperluan Kecamatan
- 53) Pembuatan Pelayanan Terpadu (Copy Center, Poliklinik, Kantin) dilingkungan Sekretariat Daerah
- 54) Pengadaan Alat-alat Komunikasi
- 55) Pengadaan Alat-alat Studio
- 56) Perlengkapan Furniture dan Kelengkapan Kantor Kec Loa Janan
- 57) Pembangunan Garasi Pemkab Kukar
- 58) Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Jaringan Telepon Gedung A, B, dan C kantor Bupati Kukar
- 59) Pembangunan Gudang dan Arsip Sekretariat Daerah
- 60) Pengadaan Mebelair Keperluan Gedung Bagian Keuangan Setkab Kukar

- 61) Pengadaan Furniture, Interior Kantor Gedung Bappeda
- 62) Pekerjaan Lanjutan Interior & Furniture Pendopo Bupati (Lanjutan)
- 63) Rehabilitasi & Pengadaan Kantor Perwakilan di Jakarta (Lanjutan)
- 64) Pengelolaan Taman Wisata Pulau Kumala (Lanjutan)
- 65) Pengadaan Furniture & Interior Gedung A & B Gedung Baru Blok A dan B Pemkab Kukar (Lanjutan)
- 66) Pengadaan Aplikasi Elektronik Mail pada Bagian Perlengkapan Setkab. Kukar
- 67) Pengadaan Aplikasi Kontrak pada Bagian Perlengkapan Setkab. Kukar
- 68) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Dua Keperluan Tata Pemerintahan
- 69) Pengadaan Plakat Keperluan Pemkab. Kukar
- 70) Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Empat Keperluan Tata Pemerintahan
- 71) Audit & Rehabilitasi Pemasangan jaringan Instalasi Air di Gedung A,B, C Kantor Bupati
- 72) Rehabilitasi Rumah Dinas di Kecamatan-Kecamatan
- 73) Rehabilitasi Sekretariat Lelang
- 74) Rehabilitasi Ruang Eks BKD Menjadi Bagian Keuangan
- 75) Rehabilitasi Langgar Sekretariat
- 76) Rehabilitasi Sedang/Berat Pelabuhan Speed Boat Sekretariat DPRD
- 77) Penyediaan gedung tempat kerja

- 78) Pembelian Kantor untuk UPT-PAD di Kecamatan Loa Janan
- 79) Penunjang Kegiatan Dokumen Pendukung Para Pihak Ketiga
- 80) Penunjang Operasional Pembuatan Program Kerja 6 UPT Dispenda
- 81) Pengadaan Rumah/Garasi Speed Boat

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 3) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 4) Pengadaan pakaian olah raga

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal (Intensive Pelatihan : Teachers Profesional Development Training, TESL/ESP and Cross Cultural Understanding, TOEFL Preperation Training)
- 2) Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah
- 3) Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Kepres 80 Tahun 2003)
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Pelatihan Sistim Pengelolaan Keuangan
- 6) Pelatihan Bimbingan Teknis dan Penyiaran
- 7) Mengikuti Pelatihan Jurnalistik dan Audio Visual
- 8) Bimbingan Teknis Kehumasan
- 9) Pemutahiran Data Kepegawaian 2009

- 10) Pembuatan Website Informasi Pendidikan Informal dan Kelengkapannya
- 11) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 12) Pelatihan dan Pendidikan Serta Pelatihan-pelatihan Formal di Bag Perlengkapan
- 13) Penataan dan Penyaluran Barang dan Sewa Gudang Pemkab Kukar
- 14) Pengelolaan Data dan Penyusunan Laporan Realisasi Barang pada Gudang Pemkab Kutai Kartanegara
- 15) Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemkab. Kukar
- 16) Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Penyusunan Suplemen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Perlengkapan
- 17) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagian Perlengkapan
- 18) Bimtek Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 (Mengikuti)
- 19) Bimbingan Teknis Aplikasi SIMDA BPKP
- 20) Bimtek Penatausahaan Aparatur pada Sub Bagian Anggaran Tahun 2009
- 21) Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Publik (TL)
- 22) Sosialisasi LHKPN (TL)
- 23) Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Struktural utk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (AJB)
- 24) Bimtek Pengelolaan Administrasi Ketatausahaan dan Kearsipan (TU)

- 25) Bimbingan Teknis LAKIP (TL)
- 26) Peningkatan SDM
- 27) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa
- 28) Sosialisasi Keppres 80 / 2003
- 29) Sosialisasi Perbup Pedoman Pelaksanaan Pembangunan
- 30) Sosialisasi Perbup Pedoman Penyusunan RKA SKPD/PPKD
- 31) Sosialisasi Perbup Multiyears Kontrak
- 32) Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Kutai Kartanegara
- 33) Bimbingan Penyusunan Program Kerja
- 34) Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja
- 35) Bimtek Penyusunan RENSTRA SKPD
- 36) Bimtek Penilaian Standar Pelayanan Minimal SKPD
- 37) Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi PA/KPA selaku Pejabat Pembuat komitmen
- 38) Pelatihan Administrasi Pertanahan
- 39) Pelatihan dan Pendidikan Serta Pelatihan-pelatihan Formal di Bag Umum Perlengkapan
- 40) Peningkatan Kapasitas Kehumasan
- 41) Bimbingan Teknis Penyusunan Produk hukum dan Rancangan Peraturan Daerah
- 42) Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP
- 43) Pelatihan Teknis Kearsipan
- 44) Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Perhitungan Pajak & Retribusi Daerah
- 45) Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Non PLN
- 46) Impelementasi Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

- 47) Penyusunan PROTAP Tentang Keberatan P/R Daerah
- 48) Penyusunan PROTAP Tentang Restitusi P/R Daerah
- 49) Penunjang Kegiatan UPT BPKD Kecamatan Loa Janan
- 50) Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Pajak dan Retribusi Melalui Kegiatan Terpadu Instansi Terkait Kab Kutai Kartanegara
- 51) Peningkatan Tata Kearsipan Sub Bendahara Pengeluaran Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara
- 52) Koordinasi Proses Akuntansi Pendapatan Daerah
- 53) Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan SKPD
- 54) Bimbingan Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik Dispenda
- 55) Bimtek Peningkatan Strategi PAD
- 56) Pembangunan Pagar Kantor
- 57) Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Pendopo Mini
- 58) Pengadaan Buku-buku Literatur Perpustakaan
- 59) Pengelolaan Perpustakaan
- 60) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 61) Bimbingan Teknis Analisis Data dengan sistem SPSS
- 62) Penunjang Kegiatan Olahraga Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara
- 63) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada BKD Kab. Kutai Kartanegara

- 64) Pembinaan Ormas Kepemudaan, Keagamaan dan Sosial
- 65) Pembinaan Linmas Desa (Sosialisasi Ketertiban dan Perijinan)
- 66) Penyusunan Profil Desa dan Kecamatan
- 67) Pembinaan Lingkungan Desa
- 68) Pembinaan Dalam Hal Pendataan Aset Desa, Prasarana dan Sarana Umum
- 69) Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD)
- 70) Sosialisasi Pembinaan PKK dan Organisasi Sosial Lainnya
- 71) Pembinaan Dalam Hal Pendataan Aset Desa, Prasarana dan Sarana Umum
- 72) PKK Kabupaten Kutai Kartanegara
- 73) Monitoring dan Pembinaan Pengelolaan Arsip
- 74) Pelatihan GIS
- 75) Pengadaan Peta Citra Satelit Untuk Updating data Penutupan Lahan dan Penggunaan Lahan
- 76) Pendidikan dan Pelatihan Formal (Pelatihan Manajemen Pemasaran Produk Turunan Kelapa)
- 77) Sosialisasi dan Pemutakhiran IUP / TPKP
- 78) Peningkatan Ketrampilan Petani dan Nelayan
- 79) Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan
- 80) Revitalisasi Perikanan Pengolahan
- 81) Analisa Pengembangan Usaha Potensi Perikanan
- 82) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pesisir Laut

e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Renstra
- 2) Penyusunan RKA
- 3) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 4) Monitoring dan Evaluasi Sistem Keuangan pada 18 Cabang Disdik Kecamatan
- 5) Pengadaan Jaringan Wireles Untuk Aplikasi SIMDA
- 6) Supervisi Pengelolaan Keuangan pada 18 Cabang Dinas Pendidikan
- 7) Penyusunan Neraca SKPD
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 9) Peningkatan Pemahaman Mekanisme Pengelolaan Keuangan SKPD (Outsearching)
- 10) Penyusunan Rencana Kegiatan APBD Dinas Pendidikan Tahun 2010
- 11) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 12) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 13) Pendampingan Pengelolaan Keuangan SKPD
- 14) Verifikasi dan Audit Pertanggungjawaban Keuangan Kantor Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
- 15) Penyempurnaan Website dan Sarana Pendukung
- 16) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Badan Kesbanglinmas
- 17) Penyusunan Analisa Standar Belanja
- 18) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pembuatan Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di lingk Pemkab Kukar
- 19) Upgrade penyusunan standarisasi sarana dan prasarana pemerintah kab. Kukar 2009

- 20) Penyusunan standarisasi harga dasar upah, bahan dan peralatan bidang pekerjaan umum
- 21) Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) di lingkungan Sekretariat Daerah
- 22) Evaluasi Peraturan Bupati Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Kab. Kukar
- 23) Perencanaan dan Penganggaran SKPD Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan
- 24) Penyusunan Laporan SPJ Administratif dan Fungsional Bendahara Pengeluaran
- 25) Penyusunan Prognosis Realisasi dan Daya Serap Perjalanan Dinas
- 26) Pembekalan Teknis Bendahara Pengeluaran Pembantu
- 27) Pengolahan dan Pendistribusian Data Gaji dan Rapel PNS se Kab Kutai Kartanegara
- 28) Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Bendahara Bupati
- 29) Penyelesaian Pembayaran Daya Serap Penggajian dan Tunjangan PNS pada Setkab Kukar Tahun 2009
- 30) Daya Serap dan Prognosis Penggajian Tenaga Tidak Tetap Daerah Untuk Setkab Kukar Tahun 2009
- 31) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Kutai Kartanegara
- 32) Penunjang Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Pengeluaran
- 33) Penunjang Kegiatan Bendahara Umum Kas Daerah Penerimaan
- 34) Pemutakhiran Database Gaji PNS Kab. Kukar Tahun 2009

- 35) Konversi NIP PNS se-Kab. Kukar pada Database Gaji dari 9 Digit Menjadi 18 Digit Tahun 2009
- 36) Pelatihan Diklat Penatausahaan Keuangan Berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007
- 37) Penyusunan Rencana dan Anggaran Bagian Organisasi Tahun 2010 (TU)
- 38) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kab. Kutai Kartanegara
- 39) Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara (TL)
- 40) Fasilitasi Efektivitas Perangkat Daerah di Wilayah
- 41) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- 42) Penyusunan Buku SOP dan Standar Pelayanan Sekretariat DPRD
- 43) Bimbingan Teknis Penatausahaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 44) Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Laporan Bendahara
- 45) Penghimpunan Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Dispenda
- 46) Penunjang Operasional Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dispenda
- 47) Penunjang Operasional Evaluasi Akhir Kegiatan
- 48) Penunjang Operasional Pembuatan Laporan Pengelolaan PPH
- 49) Penunjang Pembuatan Laporan Rekap/Realisasi SPK dalam satu tahu
- 50) Penunjang Pendistribusian Barang Cetak dan Inventaris pada Kantor Dispenda

51) Penunjang untuk Kegiatan Penataan Dokumentasi

f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Evaluasi Produk Hukum Daerah
- 6) Penyusunan Naskah Akademik
- 7) Koordinasi Pembinaan Hukum
- 8) Bantuan Hukum
- 9) Penyuluhan Hukum
- 10) Penyusunan Raperda dan Perbup Pengelolaan dan Pendayagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah
- 11) Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Penanaman Modal Daerah
- 12) Fasilitasi Perumusan Kebijakan Tentang Koperasi Dan UKM
- 13) Perumusan Perubahan Perda 13 Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja PDAM Tirta Mahakam Kab Kukar
- 14) Perumusan Kebijakan Tarif Air Minum PDAM Tirta Mahakam Kab Kukar
- 15) Penyempurnaan Nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007 (KLB)

- 16) Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas dan Badan Lembaga Perangkat Daerah (KLB)
- 17) Pengkajian Tentang Keberadaan Tanah Adat/Ulayat Dalam Wilayah Kab Kutai Kartanegara Guna Persiapan Penyusunan Raperda
- 18) Pengkajian dan Penyusunan Perangkat Peraturan Mengenai Urusan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
- 19) Sosialisasi Perbup Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 20) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Kontrak Multiyears
- 21) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- 22) Penyusunan Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan PPKD

g. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

- 1) Fasilitas Tamu & Prosesi Acara Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
- 2) Penunjang Kegiatan Unsur MUSPIDA Kukar
- 3) Penunjang Kegiatan Acara Pemkab Kukar
- 4) Persiapan Prosesi Acara Pemkab Kukar
- 5) Pembekalan dan Orientasi Lapangan Perangkat Kecamatan
- 6) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah

h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Pengelolaan Halaman Website Humas dan Protokol
- 2) Pembuatan Booklet Selayang Pandang
- 3) Pembuatan Buletin Gerbang Dayaku
- 4) Pendokumentasian Informasi Pembangunan dari Media Cetak
- 5) Pameran Keliling Humas Kukar Kabupaten Kutai Kartanegara
- 6) Pengelolaan Bahan Hasil Liputan Bidang Fotografi
- 7) Mengikuti Pameran Pembangunan Peringatan Merah Putih Sanga-Sanga
- 8) Diseminasi Informasi Melalui Media Massa Elektronik
- 9) Pengoperasian TV Kabel Humas
- 10) Diseminasi Informasi Publik
- 11) Peningkatan Siaran Interaktif Pemkab dan Siaran Keagamaan
- 12) Peningkatan Siaran Kesenian Daerah

i. Program Pengembangan Pembangunan

- 1) Orientasi Kehumasan
- 2) Konsultasi dan kordinasi Kehumasan
- 3) Rapat Koordinasi Humas Tingkat kabupaten
- 4) Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Fisik
- 5) Pengolahan Data Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

j. Program Pemberdayaan Aset Milik Pemkab Kukar

- 1) Monitoring dan Penyusunan Laporan Aset Sekretariat Kab Kukar

k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 2) Pendampingan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Bimbingan Teknis penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada SKPD
- 4) Konsolidasi Laporan Akhir Tahun SKPD
- 5) Sinkronisasi Laporan Realisasi SP2D pada SKPD
- 6) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan SKPKD
- 7) Sinkronisasi Data Realisasi Anggaran pada SKPD
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Semester SKPKD
- 9) Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (SKPKD) Kab Kutai Kartanegara
- 11) Evaluasi Usulan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada SKPD
- 12) Pengujian Laporan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Fungsional Pada SKPD di Lingkungan PEMKAB Kukar
- 13) Pengujian Laporan Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD di Lingkungan PEMKAB KUKAR
- 14) Penyusunan Progres Laporan Bulanan Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
- 15) Verifikasi Usulan Pengajuan Penerbitan SPD

- 16) Penyusunan Progres Laporan Semester Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
- 17) Penyusunan Progres Laporan Tahunan Pertanggung Jawaban Pengesahan SKPD
- 18) Konfirmasi Penyaluran Dana Perimbangan Daerah ke Direktorat Dana Perimbangan, DJPK, Departemen Keuangan di Jakarta
- 19) Penghimpunan Data RKA-SKPD Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan Tahun 2009
- 20) Pengelolaan DPA Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan pada APBD Kab. Kukar Tahun 2009
- 21) Pendataan Pegawai Menurut Golongan, Eselon, Non Eselon untuk Penyusunan APBD pada Lampiran IV
- 22) Penataan Kearsipan dalam rangka Administrasi Pelaksanaan APBD Tahun 2009
- 23) Verifikasi dan Assistensi RKA-SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2009
- 24) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Kab. Kutai Kartanegara tahun 2009
- 25) Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2009
- 26) Pengelolaan SPD Dinas / Badan / Kecamatan / Kelurahan pada APBD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2009
- 27) Pendampingan Penatausahaan Keuangan Daerah dengan SIMDA BPKP
- 28) Pengelolaan Data Gaji PNS Pemkab. Kutai Kartanegara Tahun 2009

- 29) Persiapan Data Gaji PNS se-Kab Kutai Kartanegara Tahun 2009
- 30) Konsolidasi, Konversi dan Proses Data Pendukung Gaji Tahun 2009
- 31) Peningkatan SDM Pengelolaan Daftar Gaji
- 32) Pengelolaan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Untuk Pegawai pindah, Meninggal, dan Pensiun se Kab. Kutai Kartanegara
- 33) Pengelolaan Kearsipan Keuangan Daerah
- 34) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Aparatur Sub Bagian Perbendaharaan
- 35) Koordinasi dan Tukar Informasi Mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kelengkapan Administrasi Keuangan Dengan Daerah Lainnya
- 36) Pengelolaan Registrasi SPM Belanja Langsung dan Tidak Langsung se Kab Kutai Kartanegara sebagai Kontrol Kesesuaian Pengeluaran SP2D
- 37) Rekapitulasi dan Pengumpulan Data Surat Pencairan Dana (SP2D) Terhadap Semua Pembayaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung
- 38) Rekonsiliasi Register SP2D dengan Rekening Koran pada Bank Kaltim
- 39) Perawatan dan Perbaikan Sistem Aplikasi Komputer di Sub Bidang Perbendaharaan
- 40) Sistemasi Program Register Untuk Pengelolaan Entri Data SP2D dan Pelaporan Registrasi
- 41) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2009
- 42) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2009

- 43) Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 44) Penyusunan Sistem dan Prosedur Pelaporan Pencairan Dana (Proses SPD dan SP2D) di SKPKD
- 45) Verifikasi Dokumen Permintaan Bantuan Keuangan Pada SKPKD
- 46) Pendampingan Penyusunan RKA pada SKPD
- 47) Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Sub Bagian Perbendaharaan
- 48) Pengujian Dokumen SPP dan SPM dari SKPD
- 49) Pembuatan Laporan Pengeluaran SP2D Persemester untuk belanja langsung dan tidak langsung
- 50) Bimbingan Teknis Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Desa
- 51) Pengelolaan SPD APBD-P Tahun 2009
- 52) Sinkronisasi Pengelolaan APBD-P Tahun 2009
- 53) Studi Efektivitas dan Penyusunan Pedoman RKA-SKPD 2010
- 54) Rekapitulasi dan Sinkronisasi Data Perubahan Belanja Tidak Langsung (BTL) pada Seluruh SKPD
- 55) Penyusunan dan Pengelolaan APBD-P Tahun 2009
- 56) Rekapitulasi Pergeseran Kode Rekening untuk Belanja Langsung dan Studi Efektivitas APBD-P TA 2009
- 57) Kegiatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyusunan APBD-P Kab. Kukar TA. 2009
- 58) Pengelolaan DPPA terkait Perubahan APBD Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan Kab. Kukar

- 59) Pembuatan Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik kepada PPKD untuk menjadi DPAL-SKPD
- 60) Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan
- 61) Penyusunan Jurnal Memorial SKPD
- 62) Pendampingan Posting Jurnal Belanja pada SKPD
- 63) Monitring dan Evaluasi Program Jasa Jaminan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiunan PNS Beserta Keluarga di Lingkungan Pemkab. Kukar
- 64) Mengikuti Bimtek Sistem Pencairan Alokasi Dana Desa, Bansos dan Hibah
- 65) Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Pencairan Dana Bantuan Sosial dan Hibah ke DEP DAGRI
- 66) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
- 67) Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Sosial, Hibah dan Tempat Ibadah
- 68) Monitoring Program Asuransi Kesehatan Aparatur Desa di Wilayah Pemerintah Kab. Kukar
- 69) Verifikasi Penerbitan SPM Bantuan Keuangan pada SKPKD
- 70) Rekapitulasi dan Pengelolaan Data Administrasi Pencairan Pembiayaan Pengeluaran
- 71) Koordinasi Teknis Pelaporan dan Rekonsiliasi DAU, DAK dan Gaji PNS Daerah Kukar dalam Kaitannya dengan WP. Askes, Taspen dan Taperum ke Depkeu dan KPPN
- 72) Bintek Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 55 Tahun 2008

- 73) Pembuatan dan Pengadministrasian Surat Perintah Perjalanan Dinas
- 74) Penyusunan Berkas Kepegawaian
- 75) Memfasilitasi Kegiatan Kerja Bupati, Wakil Bupati, Staf Ahli Bupati, Sekda dan Asisten-Asisten
- 76) Penyusunan dan Pemantapan Rancangan RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009
- 77) Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan SKPD
- 78) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- 79) Penjaringan pajak / retribusi daerah untuk peningkatan PAD
- 80) Identifikasi potensi pajak daerah
- 81) Intensifikasi/Ekstensifikasi Perhitungan Penerimaan Dana Perimbangan bagi Hasil Pajak dari SDA
- 82) Validasi Data Produksi untuk Bagi Hasil SDA
- 83) Sosialisasi SPTPD / SPTRD dan Media Pajak Lainnya
- 84) Konsultasi Tentang Peremajaan Data Pajak / Retribusi Daerah untuk Meningkatkan SDM pada Bidang Pendataan
- 85) Pemutihan dan Pemungutan Ditempat Pajak / Retribusi Daerah
- 86) Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi Daerah
- 87) Pengumpulan dan Analisis Pelayanan Pendapatan Daerah di Kec. Tenggarong
- 88) Penggalan Potensi PAD di Kec. Tenggarong
- 89) Penunjang Administrasi Teknis Bagian UPT Kec. Tenggarong

- 90) Inventarisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 91) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah di Luar Wilayah Kab Kuka
- 92) Penyusunan Protap Tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
- 93) Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah di Dalam Wilayah kab Kukar
- 94) Monitoring Capaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009
- 95) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 96) Pembuatan Dokumentasi Profil Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 97) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan PAD pada UPT di Lingkungan DISPENDA
- 98) Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 99) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir dan PNS
- 100) Asistensi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah
- 101) Bimbingan Teknis Pengelolaan Pembukuan Permintaan dan Penerimaan Benda Berharga
- 102) Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Pendapatan Daerah
- 103) Bimbingan Teknis Penetausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah
- 104) Monitoring Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah

- 105) Pengembangan Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- 106) Pembuatan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah
- 107) Monitoring Penerimaan Benda Berharga di Kecamatan, UPT, Badan dan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara
- 108) Monitoring Pajak dan PBB di 18 Kecamatan
- 109) Pengumpulan Data Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di 18 Kecamatan
- 110) Pengolahan dan Pengelolaan Data Perkembangan Pendapatan Daerah
- 111) Monitoring Pengelolaan Benda Berharga
- 112) Inventarisasi dan Monitoring Aset Barang
- 113) Pengendali, Penerimaan dan Pengeluaran Baran
- 114) Intensifikasi Pengelolaan dan Penerimaan Keuangan Daerah
- 115) Pengawasan dan Pengarahan Terhadap Pertanggungjawaban Pengguna Dana / PPTK
- 116) Penunjang Kegiatan Pendapatan Wajib Pajak di Kecamatan Muara Jawa
- 117) Penunjang Peningkatan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Wilayah UPT Dispenda Muara Badak
- 118) Penyediaan Jasa Administrasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 119) Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah pada Kantor UPT Dispenda Kec. Tenggarong Seberang

- 120) penggalian potensi pajak dalam rangka peningkatan potensi PAD diUPT Dispenda Kec.Tenggarong Seberang
- 121) Identifikasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kutai Kutai Kartanegara
- 122) Pengembangan Sistem Informasi dan Koneksifitas Dispenda
- 123) Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB Kab Kutai Kartanegara
- 124) Pembuatan dan Pengadministrasian Surat Perintah Perjalanan Dinas
- 125) Penyusunan Protap Tentang Pelaksanaan Penyitaan Tunggakan Pajak Daerah
- 126) Penunjang kegiatan penghimpunan dan penyampaian data barang Dispenda dan 6 UTPD
- 127) Penunjang kegiatan peningkatan inventarisasi manajemen pengelolaan dan penyaluran barang pada bagian umum Dispenda
- 128) Pengelolaan data bagian umum Dispenda
- 129) Penunjang Kegiatan Inventarisasi Sarana dan Sarana Fisik Dispenda Kab. Kutai Kartanegara
- 130) Studi Komparatif Pemeliharaan Aset Dispenda
- 131) Penyesuaian Penerapan Terhadap Terbentuknya Dispenda Kab. Kukar TA. 2009
- 132) Studi Efektivitas, Penyusunan dan Pengelolaan serta Monitoring Data dan Pembayaran dari Bagi Hasil Pajak SDA (Pemungutan Hasil Perikanan)
- 133) Pemungutan Data Basis Pajak Daerah Kab. Kutai Kartanegara

- 134) Bimtek Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Daerah Kab. Kutai Kartanegara
- 135) Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Barang - Barang Daerah
- 136) Monitoring dan Pelaporan Asset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di 18 Kecamatan
- 137) Decision Support System dan Executive Information System (penilaian asset)
- 138) Kerjasama pemanfaatan asset pemerintah daerah Kab Kukar
- 139) Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Kab.Kukar Dalam Hal Pengelolahan Asset Daerah
- 140) Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Bangunan Menara
- 141) Bintek Aplikasi SIMBADA untuk penyimpan dan pengurus barang di seluruh SKPD
- 142) Pemeliharaan Aset Aplikasi SIMBADA se Kab Kutai Kartanegara
- 143) Revaluasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah se Kabupaten Kutai Kartanegara
- 144) Pengamanan, Sertifikasi, Pemagaran Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 145) Identifikasi aset yang digunausahaka
- 146) Pengumpulan dan Penyusunan Data / Informasi Aset Daerah
- 147) Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

I. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 1) Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Daerah
- 2) Bimbingan Peningkatan Pemahaman Akuntansi/ Laporan Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda
- 3) Pelatihan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian
- 4) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

m. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- 1) Memfasilitasi Dalam Rangka Pengambilan Kebijakan Dalam Permasalahan Bidang Perhubungan
- 2) Monitoring Pasar Kontemporer/Pasar Tumpah Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 3) Monitoring Barang Sangat Strategis Dan Barang Strategis Dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 4) Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Pdam Tirta Mahakam Kab. Kukar Tahun 2008
- 5) Monitoring Dan Evaluasi Permasalahan Investasi Di Kecamatan
- 6) Fasilitasi Penyempurnaan Perda Tentang Investasi Penanaman Modal Daerah
- 7) Monitoring Dan Evaluasi Permasalahan Dan Peningkatan Pemberdayaan Koperasi Dan Ukm
- 8) Inventarisasi Dan Monitoring Unit Usaha Perusda
- 9) Fasilitasi Dan Koordinasi Perumusan Kebijakan Tentang Perubahan Perda Perusda Tunggang

- Parangan Dan Penyusunan Perbub Tata Laksana Organisasi Perusda Tunggang Parangan
- 10) Fasilitasi Dan Koordinasi Tentang Pengembangan Dan Peningkatan Kinerja Perusda
 - 11) Pedoman Pelaksanaan Penjaringan Calon Dewan Direksi Perusahaan Daerah (Perusda)
 - 12) Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Terkait Dengan Urusan Perikanan
 - 13) Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Terkait Dengan Urusan Peternakan
 - 14) Monitoring dan Evaluasi Produksi Perikanan Tahun 2009
 - 15) Monitoring dan Evaluasi Produksi Peternakan Tahun 2009
 - 16) Monitoring dan Evaluasi produksi pertanian tanaman pangan
 - 17) Monitoring Menginventarisir Masalah - Masalah Pertambangan Golongan C Tambang Batubara & Migas
 - 18) Memfasilitasi dalam rangka pengambilan kebijakan terhadap masalah pertambangan dalam pemanfaatan lahan permukaan dalam wil. Kab. Kukar
 - 19) Monitoring realisasi program Community Development (Comdev) Perusahaan Tambang Batubara dalam Wil. Kab. Kukar
 - 20) Penyusunan Perda dan Perbup Ijin Usaha Pengelolaan Sarang Burung Walet Dalam Wilayah Kab. Kukar

- 21) Monitoring Bina Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Sektor Pertanian Dalam Arti Luas
- 22) Monitoring Pengembangan Perkebunan Tahun 2009
- 23) Monitoring dan Inventarisasi Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Tambang Dalam Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 24) Pelatihan Pengelolaan Manajemen Lingkungan Tipe A

n. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- 1) Pengolahan Dan Penyusunan Data Bagian Perekonomian Di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 2) Penyusunan Data Base Pengusaha Jasa, Industri Dan Perdagangan
- 3) Biaya Pendampingan Pameran Dalam Negeri
- 4) Koordinasi /Fasilitasi Pengelolaan Bahan Dan Data Informasi Urusan Bidang Penanaman Modal Daerah
- 5) Pengolahan dan Penyusunan Data Bagian Sumber Daya Alam di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

o. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- 1) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi
- 2) Study Komperatif Peningkatan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Milik Daerah
- 3) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi (Keikutsertaan Pemkab Kukar pada Regency Expo 2009)
- 4) Rakor Kegiatan Tahunan PANJATAPDA

- 5) Pameran Dalam Rangka Kegiatan Rakor PANJATAPDA
- 6) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah pada Bidang Ekonomi (Pameran Agro dan Food Agribisnis)
- 7) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerja Sama Antar Daerah Bidang Ekonomi (Pendampingan Subsidi Ongkos Angkut Raskin 2009)
- 8) Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik (Koordinasi dan Konsultasi Dalam Rangka Pelaksanaan PENAS ke XIII di Kab. Kutai Kartanegara)
- 9) Pelaksanaan Lanjutan SOA Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2008 (Lanjutan)

p. Program Penataan Organisasi

- 1) Penyusunan Naskah Akademik Peta Jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (AJB)
- 2) Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 (KLB)
- 3) Evaluasi Tupoksi /Uraian Tugas Jabatan Struktural SKPD

q. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

- 1) Penanganan Permasalahan di Bidang Pemerintahan Umum
- 2) Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat

r. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- 1) Penegasan Batas Daerah Kabupaten
- 2) Penataan Batas Wilayah Kecamatan
- 3) Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 4) Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI ke 64

s. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- 1) Sosialisasi TP UKS

t. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- 1) Koordinasi dan inventarisasi bidang transmigrasi
- 2) Koordinasi dan inventarisasi bidang tenaga kerja
- 3) Koordinasi dan inventarisasi bidang sosial
- 4) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pembangunan
- 5) Pendampingan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional
- 6) Rapat Koordinasi Bidang Pembangunan
- 7) Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa SKPD
- 8) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2009
- 10) Pengawasan pengelolaan barang dan aset dispenda
- 11) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- 12) Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

- 13) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- 14) Sinkronisasi dan Penyusunan Raperda Pemanfaatan Asset di Kabupaten Kukar
- 15) Identifikasi dan Penilaian Aset Yang Akan Dihapuskan
- 16) Identifikasi bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta penelusuran IMB dan sertifikat tanah se Kab Kukar

u. Program Manajemen pelayanan pendidikan

- 1) Rapat koordinasi pendidikan
- 2) Koordinasi dan inventarisasi asrama pelajar / mahasiswa

v. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba

- 1) Sosialisasi narkoba dan aids

w. Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

- 1) Pelayanan manasik haji dan pemberangkatan haji
- 2) Safari ramadhan ke kecamatan
- 3) Koordinasi dan konsolidasi tilawatil qur'an
- 4) Peningkatan Pengetahuan Syiar islam
- 5) Pengadaan hewan sapi kurban
- 6) Festival Masjid Bersejarah Nusantara dan Asia Tenggara

x. Program Optimalisasi Sistem Administrasi Bantuan

- 1) Monitoring Bantuan Sosial
- 2) Verifikasi Kegiatan Bantuan Sosial dan Hibah

y. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 1) Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

z. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- 1) Evaluasi Formasi T3D dilingkungan Setda. Kab. Kutai Kartanegara (PEG)
- 2) Impassing Gaji PNS Tahun 2009 dilingkungan Setda Kab.Kukar (PEG)
- 3) Proses Usulan dan Penyelesaian Cuti PNS dilingkungan Setda Kab.Kukar (PEG)
- 4) Proses Usulan dan Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala Setda Kab. Kukar (PEG)
- 5) Proses Usulan Kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober di Lingkungan Setda Kab. Kukar (PEG)
- 6) Pemberian Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Setda Kab. Kukar (PEG)
- 7) Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS di Lingkungan Setda Kab. Kukar (PEG)
- 8) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
- 9) Seleksi penerimaan calon PNS
- 10) Penempatan PNS
- 11) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
- 12) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
- 13) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
- 14) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
- 15) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

- 16) Koordinasi penyelenggaraan diklat
- 17) Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
- 18) Evaluasi Kinerja Aparatur
- 19) Pembinaan PNS Melalui Pelaksanaan Psikotest Pejabat Struktural Esselon II, III dan IV di Lingkungan Pemkan Kutai Kartanegara
- 20) Audit Data Base Tenaga Honorer
- 21) Verifikasi T3D Tahun 2009
- 22) Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum
- 23) Proses Pengurusan Taspen, Karis/Karsu dan Karpeg
- 24) Penggajian T3D 12 Instansi Vertikal untuk bulan Juli sampai dengan Desember 2009
- 25) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

aa. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda
- 2) Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- 3) Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewa
- 4) Rapat-Rapat Paripurna
- 5) Kegiatan Reses
- 6) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
- 7) Penyusunan/Pengkajian Kebijakan Daerah
- 8) Penyusunan Bahan Bacaan Garda Rakyat dan Website DPRD Kutai Kartanegara

- 9) Penyusunan Buku Profil Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 2009-2014
- 10) Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada Media Massa
- 11) Penjaringan/Seleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRD
- 12) Penjaringan/Seleksi Staf Ahli Pimpinan dan Komisi-Komisi DPRD
- 13) Pelatihan Pimpinan dan Anggota DPRD
- 14) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
- 15) Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD
- 16) Penyusunan Legal Manual Komisi-komisi dan panggar Legislatif

bb. Program Pelayanan Perizinan

- 1) Pengembangan Sistem Pelayanan Ijin Terpadu

cc. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- 1) Penataan Kearsipan

dd. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Penyusunan Rencana Strategik Renstra

ee. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

- 1) Pemulangan Pegawai yang Pensiun

ff. Program Pendidikan Kedinasan

- 1) pendidikan penjenjangan struktural

gg. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

- 1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

hh. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Tim Pendamping Kecamatan untuk Fasilitasi terhadap Pembinaan Pengelola Alokasi Dana Desa
- 2) Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan (Desa)
- 3) Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa

ii. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

- 1) Musrenbang
- 2) Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

jj. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- 1) Pembebasan Tanah, Tanam Tumbuh dan benda-benda lainnya Buku Putih (Gerbang Dayaku) di Kecamatan Ma. Jawa sebanyak 4 Lokasi

kk. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1) Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

ll. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 1) Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

mm. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- 1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

nn. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Implementasi pelaksanaan bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian dinilai berdasarkan adanya Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Berdasarkan kategori tersebut, pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 4 buah.

Sementara apabila ditinjau berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2009, dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program dan Kegiatan pada setiap SKPD yang terdiri dari Pelayanan Adm Perkantoran, Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 817.560.084.099,42 dapat direalisasikan untuk jalannya roda pemerintahan pada masing-masing SKPD sebesar Rp. 641.581.456.080,- atau 78,48%
- b. Program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - 1) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.177.648.800,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.606.599.625,- (74,57%) yang dipergunakan untuk Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan, Cetak Perda 400 Buku, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan peserta 200 orang, Publikasi Media Elektronik, Cetak dan Spanduk 65 Kali, Cetak Buku Perundangan 450 Buah, Desiminasi HAM 100 Orang, Masyarakat Sadar Hukum 300 Orang, Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.
 - 2) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.997.424.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.800.097.700,- (93,42%) dengan keluaran berupa Akomodasi Tamu 853 Kamar, Rapat Koordinasi 392 Kali, Naskah Sambutan 1.008 Kali, Pembekalan dan Orientasi Lapangan 18 orang

Perangkat Kecamatan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Pemerintah Wilayah 2 kali dengan peserta 52 orang.

- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.521.095.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.138.331.000,- (84,81 %) dengan keluaran berupa update website humas dan protokol, 862 Booklet Selayang Pandang, 2000 eksemplar Buletin Gerbang Dayaku, Pameran Keliling Humas di 2 kecamatan, Diseminasi Informasi Melalui Media Massa Elektronik berupa 10 Advetorial TV dan 22 Advetorial Radio, Pengoperasian TV Kabel Humas, Diseminasi Informasi Publik 1.548 Release serta 25 buku Data Bagian Sumber Daya Alam di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan besaran anggaran mencapai Rp. 42.441.504.242,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.228.345.065,- (73,58%) dengan keluaran berupa buku ASB sebanyak 400 Buku, Buku Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebanyak 350 Buku, 146 buku Perbup ttg Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa, 200 buku standarisasi sarana dan prasarana pemerintah, 365 buku standarisasi harga dasar upah, bahan dan peralatan bidang pekerjaan umum, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, 432 buku Pedoman Pelaksanaan Rancangan APBD, Bimbingan

Teknis penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan peserta 450 orang, 500 buku Peraturan Bupati Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 632.890.000,- dapat terealisasi Rp. 557.801.100,- (88,14%) dengan keluaran berupa Pelatihan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pendayaagunaan Asset Badan Usaha Daerah dengan peserta 70 orang, Bimbingan Peningkatan Pemahaman Akuntansi/Laporan Keuangan Bagi Staf Tenaga Pembina Dan Pengawas Perusda kepada 5 orang peserta, Pelatihan Pengembangan Tenaga Aparatur Pengawasan dalam Peningkatan SDM Bidang Administrasi Perekonomian dengan peserta 16 orang.
- 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 3.251.098.800,- dan realisasi sebesar Rp. 2.903.249.900,- (89,3%) yang dimanfaatkan untuk 30 kali rapat Fasilitasi Pengambilan Kebijakan Dalam Permasalahan Bidang Perhubungan, Monitoring Pasar Kontemporer/Pasar Tumpah di 4 obyek, Monitoring Barang Sangat Strategis Dan Barang Strategis pada 2 obyek dan 16 titik, Inventarisasi Dan Monitoring pada 5 Unit Usaha Perusda, 1 draft Perda dan 1 draft Perbup Terkait Perumusan Kebijakan Urusan Perikanan, 1 draft Perda Terkait Perumusan Kebijakan Urusan

Peternakan, Monitoring dan Evaluasi Produksi Perikanan-Perikanan-Pertanian-Tanaman Pangan dan Tambang Galian Gol C, Pelatihan Pengelolaan Managemen Lingkungan Tipe A dengan peserta 8 orang.

- 7) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan alokasi dana Rp. 6.528.247.750,- dapat diserap sebesar Rp. 4.044.023.949,- (61,95%) yang dimanfaatkan untuk mengikuti Regency Expo 2009 selama 6 hari, Rakor Kegiatan Tahunan PANJATAPDA, 200 Buku Profil Kab. Kukar, Cetak DVD Visualisasi 40 buah, Pameran Agro dan Food Agribisnis, Pendamping Subsidi Ongkos Angkut untuk 45. 679 RTM (4.796.295 Kg), SOA Beras untuk Rumah Tangga Miskin (45.679 RTM, Biaya SOA 3.293.535 Kg)
- 8) Program Penataan Organisasi dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 627.099.800,- dan realisasi mencapai Rp. 596.981.800,- (95,20%) dipergunakan untuk memperoleh hasil berupa 45 buku Naskah Akademik Peta Jabatan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (AJB), Perda Pembentukan Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah Berdasarkan PP 41 Tahun 2007 (KLB).
- 9) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan hasil berupa Penanganan 17 kasus Permasalahan di Bidang Pemerintahan Umum dengan serapan dana Rp. 266.942.000,- (97,80%) dari alokasi sebesar Rp. 272.942.000,-

- 10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.610.252.100,- dan realisasi sebesar Rp. 994.361.050,- (61,75%) yang dimanfaatkan untuk memperoleh output berupa 3 Kesepakatan Penegasan Batas Daerah, Pelatihan bagi 7 orang untuk Penataan Batas Wilayah Kecamatan, Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi di 4 Wilayah Kecamatan, Rapat Koordinasi Penyelenggaraan HUT RI ke 64 dengan 10 lembaga.
- 11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran sebesar Rp. 2.657.260.600,- dan realisasi sebesar Rp. 1.875.511.500,- (70,58%) dengan hasil berupa Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan pembangunan pada 600 titik pengamatan, Pendampingan Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sebanyak 20 kali, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 12 kecamatan serta Koordinasi dan inventarisasi bidang transmigrasi tenaga kerja dan sosial.
- 12) Program Pengembangan Pembangunan untuk Pengolahan Data Sarana dan Prasarana Fisik di 18 Kecamatan dengan serapan dana Rp. 201.066.920,- (37,58%) dari alokasi sebesar Rp. 535.018.000,-
- 13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 638.331.000,- dipergunakan seluruhnya untuk Evaluasi Formasi T3D, Impassing Gaji PNS Tahun 2009, Proses Usulan dan Penyelesaian Cuti PNS, Proses Usulan dan

Penjadwalan Kenaikan Gaji Berkala, Pemberian Penghargaan Bagi PNS serta Pemutakhiran dan Peremajaan Data PNS dilingkungan Setda.

- 14) Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan keluaran berupa Sosialisasi TP UKS bagi 180 orang dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,-
- 15) Program Manajemen pelayanan pendidikan yang memanfaatkan seluruh alokasi anggaran sebesar Rp. 687.767.300,- dengan output berupa 2 kali Rapat koordinasi pendidikan, Koordinasi dan inventarisasi pada 12 asrama pelajar / mahasiswa.
- 16) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba berupa sosialisasi kepada 200 orang tentang Narkoba dan Aids yang menyerap anggaran sebesar Rp. 115.000.000,-.
- 17) Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama berupa Pelayanan manasik haji dan pemberangkatan haji, Safari ramadhan ke kecamatan, Koordinasi dan konsolidasi tilawatil qur'an, 35 buku Pengetahuan Syiar islam, Pengadaan 25 ekor sapi kurban dan 1 kali Festival Masjid Bersejarah Nusantara dan Asia Tenggara yang menyerap anggaran sebesar 91,88% atau Rp. 2.388.817.950,- dari alokasi Rp. 2.600.000.000,-.
- 18) Program Optimalisasi Sistem Administrasi Bantuan dengan anggaran Rp. 521.026.000,- untuk Verifikasi dan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah kepada 8000 penerima bantuan.

- 19) Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang menyerap dana Rp. 182.000.000,- atau 91% dari alokasi Rp. 200.000.000,-
- c. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Skeretariat DPRD yang terdiri dari
- 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang anggarannya mencapai Rp. 34.029.047.200,- dengan serapan sebesar 79,83% atau Rp. 27.165.365.944,- dipergunakan untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pansus Non Raperda, 121 kali Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama, 2 Kali kegiatan Reses, Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah, pengadaan Bahan-Bahan Hearing/Rekomendasi Kebijakan DPRD, 700 Buletin/Majalah, 200 Buku Profil Anggota DPRD, Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD pada 15 Media Massa, Pelatihan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD serta keperluan Seminar, Lokakarya dan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran Rp. 1.375.614.100,- dan realisasi Rp. 1.048.481.200,- (76,22%) yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil berupa Penyusunan dan Pemanapan Rancangan 20 berkas RKA/DPA DPRD dan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2009 serta biaya Bimbingan Teknis Mengenai Pengelolaan Keuangan SKPD bagi 42 orang.

- d. Program Pelayanan Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 1.207.613.000,- dapat diserap sebesar 99,34 % atau Rp. 1.199.613.000,- dengan hasil berupa 1 buah Sistem Jaringan Perijinan Terpadu.
- e. Program dan Kegiatan yang dilekoka oleh Dina Pendapatan Daerah meliputi :
- 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang menyerap anggaran Rp. 599.370.000,- atau 96,71% dari aloksi sebesar Rp. 620.370.000,- yang dipergunakan untuk pengelolaan tata kearsipan.
 - 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan alokasi anggaran mencapai Rp. 33.139.809.870,- dan dengan realisasi sebesar 64,47% atau Rp. 21.365.601.110,- dengan hasil berupa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah pada 37 obyek di 18 titik pengamatan, Penjaringan pajak / retribusi daerah pada 2000 obyek pajak, Identifikasi potensi pajak daerah pada 7 obyek, Validasi Data Produksi untuk Bagi Hasil SDA, Sosialisasi SPTPD/SPTRD dan Media Pajak Lainnya kepada 720 peserta, Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi Daerah pada 108 jenis obyek, Pengumpulan dan Analisis Pelayanan Pendapatan Daerah kepada 1000 WP di Kec Tenggaraong, 1 dokumen Protap Tentang Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah bagi 1500 WP, Bimbingan Teknis Penetausahaan Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan Daerah dengan peserta 372 orang, Pengembangan 12

Sistem Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah serta Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan/BPHTB.

- 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH untuk pengelolaan barang dan aset dispenda yang menyerap anggaran Rp. 163.277.500,- atau 93,02% dari alokasi sebesar Rp. 175.530.000,-
 - 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan 20 buku Renstra yang menyerap dana sebesar Rp. 111.965.000,- atau 67,36% dari alokasi sebesar Rp. 166.227.000,-
- f. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain
- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 2.062.276.600,- dan realisasi 86,6% atau Rp. 1.785.947.500,- dengan hasil berupa 35 Dokumen LHP, Penanganan 10 Kasus Pengaduan dan Tindak Lanjut 250 Laporan Hasil Temuan.
 - 2) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan anggaran Rp. 329.420.000,- dan realisasi Rp. 224.636.500,- atau 68,19% untuk Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan bagi 40 orang peserta.
 - 3) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dan serapan dana Rp. 181.225.000,- atau 90,61% untuk Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan serta Informasi Masyarakat

- g. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah program Penelitian Umum dengan alokasi Rp. 6.966.313.100,- dan realisasi mencapai 97,58% atau Rp. 6.797.424.800,- yang menghasilkan bahan penelitian berupa Kajian-kajian, seminar, semiloka, Bimtek dan Evaluasi pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- h. Program dan Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah adalah :
- 1) Program Pendidikan Kedinasan untuk biaya Diklat PIM II, Diklat PIM III, Diklat PIM IV. Biaya Pembekalan Istri (74 Org) dengan serapan dana Rp. 4.610.551.700,- atau 89,16% dari alokasi Rp. 5.171.382.500,-.
 - 2) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 3.000 CPNS Daerah dengan dana Rp. 11.134.989.100,- atau 53,44% dari alokasi Rp. 20.835.102.000,-
 - 3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan alokasi Rp. 6.343.456.741,- dan realisasi sebesar 78,86% atau Rp. 5.002.716.400,- yang dipergunakan untuk Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 180 Orang, Seleksi penerimaan calon PNS formasi 2009 sebanyak 1.154 orang, penempatan 3.000 Orang PNS, Kenaikan Pangkat 5.000 Dokumen, Penilaian Satya Lencana Karya Setya 311 orang, Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas (S1, D IV, Dokter Spesialis, S2, S3) bagi 56 Orang, Bantuan Penerimaan Calon Praja IPDN 10 Orang, Up Grade Data Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

untuk 17.775 Pegawai dan Psikotes dengan Peserta 360 Orang,

- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan anggaran Rp. 3.529.038.950,- dan realisasi 44,78% atau Rp. 1.580.158.200,- dengan keluaran berupa Verifikasi T3D Tahun 2009 dan Penerimaan CPNS melalui Formasi Umum.
- i. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pengelola Aset Daerah adalah sebagai berikut :
- 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan anggaran yang mencapai besaran Rp. 16.867.610.872,- dan realisasi hanya 36,44% atau Rp. 6.146.695.241,- dengan keluaran berupa Bimtek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Barang - Barang Daerah dengan peserta 110 orang; Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Bangunan di Pulau Kumala yaitu Sky Tower, Cable Car, Trampolin, Bumper Car, Kereta Api, Merry Go Round; Pengamanan, Sertifikasi, Pemagaran Tanah dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Ujian Ulang Penilaian Aset 68 Org.
 - 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan anggaran Rp. 1.514.868.500,- dan realisasi sebesar 54,23% atau Rp. 821.555.900,- yang dipergunakan untuk Identifikasi dan Penilaian Aset Yang Akan Dihapuskan, Identifikasi bukti kepemilikan kendaraan bermotor serta penelusuran IMB dan sertifikat tanah se Kab Kukar.

3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 12 Bagian, dengan kondisi sekarang karena terbatasnya ruangan perkantoran satu atap, khususnya dilingkungan sekretariat sehingga satu bagian yaitu Bagian Perlengkapan berada diluar lokasi kantor sekretariat, sehingga menjadikan terkendala dalam melakukan koordinasi antar bagian, disamping itu juga faktor banyaknya pegawai sedangkan luas ruangan terbatas.

Untuk itu kedepannya perlu dilakukan penataan dan penambahan ruang kantor serta rasionalisasi pegawai dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga lebih efektif dan efisien.

Untuk permasalahan yang ada di Badan Penelitian Pembangunan Daerah adalah :

- Jumlah Peneliti (Fungsional) saat ini masih belum ada secara formal, yang ada baru 1 orang akan dicalonkan secara formal sebagai Fungsional peneliti. Logikanya sebenarnya jumlah pegawai yang ada dan peneliti berbanding ; 3 : 1.
- Selama ini pelaksanaan penelitian sebagian besar masih dilakukan dengan Pihak ketiga, belum bisa secara mandiri melakukan penelitian (Swakelola mandiri).
- Judul penelitian kadang kala masih kurang tepat dengan kebutuhan yang ada terutama yang berkaitan dengan Dinas Dinas atau Badan Lainnya.

- Pelaksanaan Penelitian belum Sepenuhnya dilakukan Balitbangda , sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 33 tahun 2007 pasal 4 ayat 1.
- Hasil Penelitian belum memberikan dampak langsung dalam pembuat kebijakan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemecahannya adalah melalui :

- Perlu adanya Pengangkatan baru tenaga Peneliti dengan cara mengangkat PNS yang ada dilingkungan Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara atau dari luar Balitbangda Kab Kutai Kartanegara.
- Untuk Kedepannya agar dapat dilakukan Penelitian sendiri (Swakelola Mandiri)
- Perlu adanya masukan Judul Penelitian dari Dinas / Kecamatan agar judul yang ada sesuai dengan kebutuhan.
- Perlu adanya Perda atau Perbup yang mengatur bahwa setiap Penelitian yang dilakukan oleh Dinas/ Badan di Daerah harus melalui Balitbangda atau dikoordinasikan dahulu pada Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara

xxi. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

- 1) Pelatihan Bagi Lembaga Adat
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Tapal Batas Bagi Kepala Desa dan Lurah

- 3) Pendidikan dan Pelatihan Kepala Dusun Tentang Manajemen Pemerintahan Desa
- 4) Pembinaan Perangkat Pemerintah Desa (BPD)
- 5) Pelatihan dan Bimtek Bagi Anggota BPD Baru di Wilayah Kutai Kartanegara

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

- 1) Fasilitas dan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Pembekalan Verifikasi APB Desa
- 3) Pembinaan, Penatausahaan dan Pertanggung jawaban Desa
- 4) Penyusunan Juknis Pencairan ADD dan Pedoman Evaluasi APBDes

c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Administrasi Pendamping Nasional Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Survey Database Kebutuhan Masyarakat
- 3) Pendataan Profil Desa / Kelurahan
- 4) Sosialisasi Musrenbang Desa/ Kelurahan
- 5) Inventarisasi dan Sinkronisasi P2LDT
- 6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- 7) Evaluasi usaha Perkreditan Desa /LPD dan Lumbung Pangan Masy.Des (LPMD)
- 8) Pembinaan dan Fasilitasi Pemasarakatan dan Pemanfaatan TTG
- 9) Forum Diskusi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- 10) Pelatihan P3MD Instansi Sektoral Kabupaten
- 11) Pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
- 12) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten
- 13) Bimbingan Teknologi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan
- 14) Pendataan Evaluasi Tk.Perkembangan LPM se. Kabupaten Kutai Kartanegara
- 15) Pelantikan Pengurus LPM
- 16) Penyegaran Kader Posyandu Kabupaten
- 17) Penunjang Operasional dan Optimalisasi LPM
- 18) Penunjang Manajemen RT
- 19) Pelatihan Substantive Pemberdayaan Masyarakat
- 20) Peningkatan Kualitas Aparatur BAPEMAS
- 21) Tertib Administrasi Kepegawaian
- 22) Lomba Desa / Kelurahan
- 23) Pembinaan Rumah Tidak Layak Huni
- 24) Pendataan Infrastruktur Desa / Kelurahan
- 25) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
- 26) Pembinaan dan Inventarisasi SDA
- 27) Administrasi Perencanaan Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan
- 28) Evaluasi Pembangunan Pedesaan

d. Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penataan Kawasan Pembangunan Pedesaan dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kerjasama Desa

- 2) Penyusunan Raperda Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan

e. Program Perencanaan Tata Ruang

- 1) Penyusunan Master Plan Tata Ruang Desa di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Melalui Model Perencanaan Partisipatif

f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatu

- 1) Pemilihan dan pelantikan Kepala Desa
- 2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
- 3) Penyaringan Pengangkatan Perangkat Desa
- 4) Pelatihan Pembuatan LPPD, LKPJ dan ILPPD bagi Kepala Desa
- 5) Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS tahap I

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dilihat dari aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2009 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PKK Aktif dan Posyandu Aktif yang masing-masing mencapai 100%.

Namun demikian apabila dilihat dari aspek realiasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang sama dapat diuraikan sebagai berikut :

- b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.100.000.000,-

- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.077.219.000,- atau 98,92% yang dimanfaatkan untuk membiayai Pelatihan Bagi 25 orang dari Lembaga Adat, Pendidikan dan Pelatihan Tapal Batas Bagi 35 Kepala Desa dan Lurah, Pendidikan dan Pelatihan bagi 28 Kepala Dusun Tentang Manajemen Pemerintahan Desa, Pembinaan Kinerja BPD Terhadap Tugas dan Fungsi BPD 250 orang serta Bimtek Administrasi Pemerintahan Desa 101 orang.
- c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang mendapat alokasi dana sebesar Rp. 3.600.555.300,- dengan realisasi Rp. 3.024.845.200,- atau 84,01% yang menghasilkan keluaran berupa Fasilitasi Penyusunan Perdes RPJMDes Partisipatif, Perkades RKPDes, RKA Desa, Perdes APBDes Partisipatif, Perkades DPADes, Pelaksanaan Swakelola Pemdес dan Swakelola Padat Karya (@ 185 Orang), Peserta Aparat Desa 370 serta Juknis Pencairan ADD dan Pedoman Evaluasi APBDes
 - d. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan alokasi mencapai Rp. 11.450.352.900,- dan realisasi sebesar Rp. 8.446.938.145,- (73,77%) telah menghasilkan output berupa Pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Survey Database Kebutuhan Masyarakat, Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan peserta 30 orang, Pelatihan P3MD Instansi Sektoral Kabupaten dengan peserta 200 Orang, Pembinaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada perguruan Tinggi Negeri dan Swasta kepada 500 Orang, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Bimbingan Teknologi Penguatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa/ Kelurahan kepada 36 orang, Pelantikan 25 orang Pengurus

- LPM, Penyegaran 60 orang Kader Posyandu Kabupaten, Penunjang Manajemen RT dengan peserta 95 orang, Pelatihan Substantive Pemberdayaan Masyarakat bagi 60 orang peserta, Pelatihan Komputer 30 orang, Bimtek Peningkatan Kualitas Aparatur 30 orang, Lomba Desa / Kelurahan serta Evaluasi Pembangunan Pedesaan.
- e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 447.100.000,- (81,29%) yang menghasilkan keluaran berupa Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penataan Kawasan Pembangunan Pedesaan dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kerjasama Desa serta Raperda Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa/Kelurahan
 - f. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan realisasi mencapai Rp. 1.994.972.900,- (79,8%) dengan hasil berupa Pemilihan dan pelantikan 25 Kepala Desa, Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa di 25 desa, Penyaringan Pengangkatan 295 Perangkat Desa, Pelatihan Pembuatan LPPD, LKPJ dan ILPPD bagi Kepala Desa dengan peserta 185 Orang serta Pendidikan dan Pelatihan bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS tahap I sebanyak 70 orang.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Untuk alokasi anggaran SKPD belum memadai kemudian kapasitas Sumber Daya Manusia masih lemah dan masih belum terintegrasinya kegiatan antara bidang karena

penggabungan dua organisasi tersebut serta sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas.

Solusi :

Diharapkannya penambahan alokasi anggaran SKPD sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yaitu program-program pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana maksimal. Kemudian perlunya peningkatan SDM SKPD dan perlu dilaksanakan/dilakukan perencanaan kegiatan monitoring, evaluasi secara terpadu dan berkala serta berkesinambungan sehingga terintegrasinya diantara bidang-bidang. Untuk pencapaian kinerja yang maksimal dibutuhkan sarana prasarana yang memadai yaitu diperlukannya pembaunan gedung kantor baru yang memadai.

xxii. SOSIAL;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- 2) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
- 3) Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Lansia

- 5) Prasarana dan Penunjang Program SWTM
- 6) Prasarana dan Penunjang Program SWTM (Belanja Jasa PT Pos Indonesia)

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 1) Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak
- 2) Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
- 4) Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
- 5) Pelayanan dan Pemulangan Orang Terlantar (OT), Eks Napi dan Eks Rehabilitasi PSK ke Tempat Asalnya
- 6) Pembuatan Website Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
- 7) Pelayanan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Kekerasan
- 8) Pembuatan Juklak, Juknis dan Lifter Bidang Rehabilitasi Sosial

c. Program Pembinaan Anak Terlantar

- 1) Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Traum

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- 2) Pembinaan Penyandang Cacat Melalui Loka Bina Karya (LBK)
- 3) Pembinaan, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat

e. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

- 1) Pelayanan Anak Pada Panti Sosial Asuhan Anak Kutai Kartanegara

f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 2) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- 3) Pelatihan dan Magang Bidang Keterampilan (Penyandang Cacat, Eks Anak Nakal dan Korban Narkotika, Eks PSK)

g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- 1) Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

- 2) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Veteran dan Janda Veteran) di Kab Kutai Kartanegara
- 3) Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial
- 4) Pembangunan Gudang Penyimpanan Stock Bantuan Korban Bencana
- 5) Diskusi Masalah Kepemudaan Karang Taruna
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Usia Dini
- 7) Rapat Kerja Karang Taruna
- 8) Peningkatan Generasi Muda Melalui KarangTaruna
- 9) Rehab TMP dan Monumen Pejuang
- 10) Penurapan Halaman Monumen Merah Putih (Turap Beton) (Lanjutan)
- 11) Pengkajian Pemberian Gelar Sultan Aji Muhammad Idris Sebagai Pahlawan Nasional

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2009 di Bidang Sosial ditandai dengan tersedianya 13 buah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mencapai 14,98% dan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang juga mencapai 14,98%.

Sementara apabila dilihat dari sisi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sbb :

- j. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

- Sosial (PMKS) Lainnya yang menyerap dana sebesar Rp. 4.264.641.200,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.386.877.200,- atau 97,21% yang dialokasikan untuk penyediaan Bibit Tanaman Perkebunan Karet 8.100 Pohon, Ternak Sapi 10 Ekor, Pembersihan Lahan dan Konstruksi Bangunan KAT untuk 12 Unit Rumah dan 6 UEP; Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi 230 Keluarga Miskin, 140 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; Pengadaan Alat Pertanian 1.660 Buah, Pengadaan Bibit Ternak Babi 25 Ekor, Dedak 500 Kg, Sembako UEP Lanjut Usia serta Santunan kepada 16.250 Orang SWTM.
- k. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.646.530.000,- mampu menyerap Rp. 1.556.398.850,- atau 94,53% yang keluarannya berupa Bimtek dan Sosialisasi Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak bagi 80 orang, Penyuluhan 4 Kali untuk 120 Orang, Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana 40 Orang, Pemulangan 39 orang terlantar dan Bahan UEP untuk Korban Perlindungan Anak sebanyak 30 anak.
- l. Program Pembinaan Anak Terlantar yang memperoleh alokasi dana Rp. 151.160.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 145.676.150,- atau 96,37% yang dipergunakan untuk Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi 104 Anak Terlantar.
- m. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan keluaran berupa UPSK Penyandang Cacat 30 orang, Pembinaan 30 orang Penyandang Cacat melalui LBK serta untuk Biaya Hidup dan Pelatihan untuk 20 Anak

- Panti yang menyerap anggaran sebesar Rp. 703.274.510,- atau 93,42% dari alokasi yang tersedia sebesar Rp. 752.807.600,-
- n. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo yang dipergunakan untuk Pelayanan 50 Anak Pada Panti Sosial Asuhan Anak dengan serapan dana sebesar Rp. 438.210.640,- dari alokasi yg tersedia sebesar Rp. 448.000.000,-
 - o. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) dengan alokasi dana sebesar Rp. 944.819.000,- dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 908.813.200,- atau 96,19% untuk Pengadaan Alat Bengkel Motor, Pakaian Kerja Lapangan, Kaos, Topi dan Sepatu (@20 stel), Alat Perbengkelan dan Alat Praktek, Pelatihan dan Perlengkapannya untuk 30 orang, Pelatihan Penyandang Cacat 20 orang dan Pelatihan Eks PSK 10 orang.
 - p. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 3.349.833.139,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.871.019.675,- atau 85,71% dengan keluaran berupa pendampingan Santunan Veteran dan Janda Veteran sebanyak 433 orang, Pembangunan Gudang Penyimpanan Stock Bantuan Korban Bencana seluas 111,26 M², Sarana Rekreasi bagi Anak Usia Dini, Pelatihan Manajemen bagi Generasi Muda 20 Orang, Rehab Monumen Tugu Pejuang Jl. Suwondo dan Jl. AM. Sangaji, Semenisasi dan Pembangunan Pagar Tempat Parkir TMP Bukit Biru serta Penurapan Halaman Monumen Merah Putih.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan mendasar yang bersifat krusial yang saat ini dihadapi oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan data base yang valid

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial selalu lebih cepat dibanding kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mengatasinya. Kondisi ini menyebabkan pergerakan data yang begitu cepat, sehingga update data harus selalu dilakukan dengan interval waktu yang cukup pendek. Data base penyandang permasalahan kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang saat ini dimiliki oleh Dinas Sosial bersumber dari kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang terakhir dilakukan pada tahun 2007. Kegiatan tersebut belum pernah dilakukan lagi sampai dengan tahun 2009, sehingga validitas datanya sudah harus diperbaiki.

Upaya yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengandalkan laporan dari pemerintah desa atau sekedar melakukan verifikasi dengan perangkat desa. Verifikasi tersebut sayangnya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, karena kegiatan tersebut dilakukan dengan cara menumpang pada kegiatan lain. Kelemahan lain dari upaya ini adalah adanya kemungkinan data yang bersifat subyektif karena sumbernya hanya dari satu pihak yang memiliki otoritas diwilayahnya.

b. Ketersediaan anggaran yang memadai

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa instansi sosial baik

itu Kementerian Sosial maupun instansi sosial di daerah, memiliki tanggung jawab dalam bidang pengentasan kemiskinan. Disamping itu pemerintah dan pemerintah daerah diamanatkan untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk kegiatan pengentasan kemiskinan tersebut.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pengentasan kemiskinan di Kab. Kutai Kartanegara, sehingga kegiatan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan pun idealnya mendapatkan anggaran yang memadai. Kegiatan pengentasan kemiskinan dilakukan melalui pemberian jaminan sosial dan bantuan sosial. Jaminan sosial diberikan kepada mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan tugas kehiduannya. Sedangkan bantuan sosial diberikan kepada mereka yang masih memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas kehidupannya, namun karena sebab tertentu pelaksanaan tugas-tugas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2009 anggaran Dinas Sosial untuk pengentasan kemiskinan masih kurang memadai dan lebih kecil. Kondisi ini menyebabkan kegiatan bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dilakukan secara maksimal, baik dari cakupan penyandang masalah yang dilayani maupun jenis dan besaran bantuan yang diberikan.

xxiii. KEBUDAYAAN

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- 1) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah.
- 2) Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.
- 3) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- 1) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.
- 2) Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.
- 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sebagai daerah yang dikenal dengan kerajaan hindu tertua di Republik Indonesia, serta adanya fanatisme masyarakat terhadap warisan budaya maka sudah sewajarnya jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai perhatian lebih dalam bidang budaya. Hal ini terlihat dari adanya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 4 kali serta pelestarian terhadap budaya, situs dan kawasan budaya sebesar 75%.

Demikian juga apabila dilihat dari kaca mata realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka kinerja pemerintah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.180.571.900,- (98,38%) yang dimanfaatkan untuk Ceramah tentang Jarahnitra dan UU 9 Kecamatan, Referensi Budaya Lokal Daerah (Etnografi Dayak, Catatan Adat Kutai, Tapak Raja) 900 Eks; Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air berupa 250 item Benda Cagar Budaya 1 Draft Perda, Situs Awang Long di Kota Bangun dan Situs Jembayan Loa Kulu, Album BCB 175 Eks serta Seminar Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata dengan peserta 70 Orang.
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.308.482.000,- dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 2.299.517.000,- (99,61%) dengan keluaran berupa Perlengkapan Kegiatan Festival Budaya (Festival Kemilau Nusantara, Budaya Adat, Erau Adat dan Inventaris Kebudayaan di Asrama Mahasiswa), Pagelaran Atraksi Wisata Budaya 20 Kelompok, Hadiah uang Pembinaan Kelompok Seni Budaya 4 Jenis Lomba 56 Item, Pelaksanaan Lomba Pendampingan ERAU dan HUT Kota Tenggarong, Honorarium Tim Pendukung dan Pelatih Penari Massal 1250 Orang, Dekorasi 4 Jenis 271 Buah, Perlengkapan Kegiatan ERAU 5 Jenis 4000 Buah, Baju Kaos dan Pakaian Penari Tari Massal 550 Stel.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kebudayaan.

xxiv. STATISTIK

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi

- 1) Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara
- 2) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah
- 3) Penyusunan PDRB dan Potensi Ekonomi Kecamatan
- 4) Survey Sosial Ekonomi Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Statistik ditandai dengan tersedianya data sekunder berupa Buku Kabupaten Dalam Angka; Monografi, Sistem Informasi Profil Daerah dan PDRB serta data hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicapai melalui program Pengembangan Data dan Informasi dengan memanfaatkan anggaran sebesar Rp. 2.301.281.460,- dari alokasi sebesar Rp. 2.356.616.000,- atau 97,65%.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti pada pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Statistik.

xxv. ARSIP

1. Program dan Kegiatan

a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

- 1) Pembuatan Tata Kearsipan

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

- 1) Penelusuran dan Pemeliharaan Arsip Statis
- 2) Penelusuran Arsip Visual

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Indikator yang dapat diukur untuk penilaian kinerja sebuah instansi ataupun pemerintahan dalam bidang kearsipan adalah dengan melihat adanya penerapan pengelolaan arsip secara terpadu. Penerapan sistem kearsipan secara terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan baru pada Badan Arsip dan Perpustakaan.

Sementara apabila dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan yang digunakan untuk Pembuatan Tata Kearsipan dengan serapan dana 100% dari alokasi sebesar Rp. 119.146.500,-
- b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan dengan alokasi sebesar Rp. 285.917.900,- dapat direalisasikan 47,54% atau sebesar Rp. 135.917.900,- yang digunakan untuk Penelusuran dan Pemeliharaan terhadap 500 buah Arsip Statis.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penelusuran arsip secara visual.

Solusinya adalah dengan membangun sebuah sistem kearsipan baik secara statis maupun visual pada setiap SKPD.

xxvi. PERPUSTAKAAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- 1) Pengadaan Bahan Pustaka / Buku-buku Bacaan
- 2) Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan
- 3) Peningkatan Informasi Kepustakaan Melalui Pameran
- 4) Seminar Tentang Pengembangan Perpustakaan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui bidang Perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2009 dirasa masih belum dapat memenuhi standar kecukupan. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang hanya 1,52% dengan jumlah koleksi judul Buku yang tersedia baru mencapai 49,67%.

Hal tersebut juga terjadi pada pelaksanaan program dan kegiatan yang diimplementasikan kedalam Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

yang hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 57,05% dari alokasi yang tersedia senilai Rp. 1.229.807.900,- atau hanya tereliasasi Rp. 701.627.462,- dengan keluaran berupa Pengadaan Bahan Pustaka / Buku-buku Bacaan 6.000 eksemplar dan Peningkatan Informasi Kepustakaan Melalui Pameran sebanyak 1 kali.

3. Permasalahan dan Solusi

Kondisi fasilitas dan gedung yang dipergunakan sekarang ini oleh Badan Kearsipan Dan Perpustakaan dalam melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari kurang begitu refresentatif. Impack terhadap pekerjaan kenyamanan, ketenangan dan konsentrasi tidak bisa didapatkan.

Solusi segera menempati gedung baru dimana fasilitas, kafasitas dan volume gedung memenuhi apa yang diharapkan.

II. URUSAN PILIHAN

i. KELAUTAN DAN PERIKANAN;

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan diarahkan untuk :

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

- 1) Rehab Pemukiman Nelayan
- 2) Pengadaan Jaring Milenium
- 3) Pengadaan Fish Finder
- 4) Pengadaan Gill Net
- 5) Revitalisasi Perikanan Tangkap
- 6) Modernisasi Armada Tangkap

- 7) Pengadaan Kawat Tempirai
- 8) Pembuatan Jembatan Pemukiman Nelayan
- 9) Pembangunan TPI / PPI
- 10) Pembangunan TPI / PPI DAK
- 11) Pendamping DAK
- 12) Pendamping PNPM
- 13) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Kota Bangun (DAK TA. 2008)
- 14) Pendamping Dana DAK TA. 2009

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

- 1) Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan
- 2) Pengawasan Pemanfaatan Embung Bekas Tambang Batu Bara
- 3) Koordinasi Penataan Hukum Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
- 4) Sosialisasi Pokmaswas
- 5) Bantuan Musibah Banjir Gulma
- 6) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- 1) Pengembangan Keramba Jaring Apung
- 2) Penanggulangan dan Pemberantasan Hama dan Penyakit Ikan
- 3) Penggemukan Kepiting di Tambak
- 4) Pengembangan Rumput Laut dan Pembangunan Hatchery Mini

- 5) Pembangunan Tambak Percontohan, Panti Benih dan Bak Pentokolan udang Galah
- 6) Pengembangan BBI
- 7) Revitalisasi Perikanan Budidaya
- 8) Pengembangan Budidaya Udang Galah dan Gurami
- 9) Pelatihan Pembenihan Ikan Betutu dan Magang Budidaya udang Galah
- 10) Bantuan Musibah Air Bangar
- 11) Pengembangan Kolam Mina Padi
- 12) Pengembangan Sawah Tambak
- 13) Pembuatan dan Pengembangan Irigasi Tambak
- 14) Pelatihan Pembenihan Patin bagi Pembudidaya
- 15) Peninggian Tanggul Tambak

d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

- 1) Pengembangan Read Down Sattion Satelit Noa dalam mendukung penempatan dan monitoring fishalter di perairan Kukar
- 2) Penyusunan Renstra Perikanan Kab. Kutai Kartanegara

e. Program Pengembangan Data / Informasi

- 1) Penyusunan Data Base Ekonomi Perikanan
- 2) Inventarisasi dan Identifikasi Kelompok Nelayan
- 3) Pengembangan Perencanaan Pengendalian dan Sistem Informasi Perikanan
- 4) Pemutakhiran Data Statistik Perikanan

f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Pameran Industri Bahari

g. Program Peningkatan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Perairan

- 1) Penanaman mangrove pada budidaya tambak
- 2) Penanaman mangrove di Delta Mahakam
- 3) Pengadaan pakan dan benih ikan nila, ikan mas, lele dumbo, ikan patin untuk kelompok nelayan.
- 4) Pengadaan pakan dan benih ikan untuk kelompok perikanan.

h. Program Pemberdayaan Kelompok Tani dan Nelayan

- 1) Pengadaan Kapal dan Mesin untuk Nelayan di Marangkayu.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah melalui bidang Perikanan dan Kelautan yang pada tahun 2009 produksi perikanan mencapai 79,2 % dari target daerah dengan konsumsi ikan mencapai 157,78 %.

Apabila dilihat dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perikanan dan kelautan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan anggaran sebesar Rp. 9.122.599.875,- dapat direalisasikan 73,74% atau Rp. 6.727.064.967,- dengan

hasil berupa sosialisasi dan pementapan calon penerima bantuan atap seng 50 Unit dengan jumlah atap sebanyak 1513 lembar, Alat Tangkap Jaring Milenium 22 Unit, Cool Fish Finder 4 Unit, Alat Tangkap Gill Net 764 Unit, Lacuda 90 Unit, Kapal Motor 20 Buah, Kapal Penangkap Ikan, Kawat Tempirai 1753 Rol, Pembangunan Jembatan Pemuikiman Tani dan Nelayan 250 Meter, Pembebasan Lahan dan pembangunan TPI/PPI di Kota Bangun, Monofilament 1.000 Unit, Alat Tangkap Multiflament 1 Paket dan pendampingan PNPM.

- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dengan anggaran sebesar Rp. 1.238.096.000,- dapat terealisasi sebesar 69,15% atau Rp. 856.141.000,- dengan hasil berupa Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan dengan peserta 300 orang, Pengadaan Bibit untuk Restocking di eks Galian 17.000 ekor, Perlengkapan untuk Bantuan Pokwasmas 60 Unit, Sosialisasi Pokwasmas dengan peserta 240 orang.
- c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 4.665.000.000,- dan realisasi mencapai 80,40% (Rp. 3.750.840.500,-) yang menghasilkan output berupa 64 Keramba Jaring Apung, Bibit Ikan Nila 56.000 Ekor, Pakan 10.800 Kg, Sosialisasi Pengendalian Lingkungan dan Pemberantasan Hama Penyakit Ikan kepada 40 orang nelayan, Rumput Laut 4000 Kg, Tali Nilon 2000 M, Pelampung 4000 Buah, Tiang Bambu 2000 Buah, Perencanaan Pembangunan Hatchry Mini, Tambak Percontohan, Panti Benih dan Bak Pentokolan Udang Galah 4 Buah, Penggemukan Kepiting

- di 4 Tambak, Pengembangan Budidaya Udang Galah dan Gurami seluas 5 Ha, Pelatihan Pembenihan Ikan Betutu dan Magang Budidaya udang Galah kepada 25 nelayan, Pengembangan Kolam Mina Padi pada 12 parit kolam, Pengembangan Sawah dan irigasi Tambak 11.706 M².
- d. Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan anggaran Rp. 2.470.625.200,- dapat terserap Rp. 2.242.405.400,- (90,76%) dengan output berupa Pengembangan Read Down Sattion Satelit Noa dalam mendukung penempatan dan monitoring fishalter di perairan Kukar pada 5 lokasi.
 - e. Program Pengembangan Data / Informasi untuk Penyusunan Data Base Ekonomi Perikanan dan Pemutakhiran Data Statistik Perikanan yang menyerap dana Rp. 470.738.800,- atau 99,18% dari anggaran sebesar Rp. 474.611.000,-
 - f. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan anggaran Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 186.668.240,- (93,33%) yang dipergunakan untuk membiayai Pameran Dalam Daerah 3 Kali, Luar Daerah 2 Kali.
 - g. Program Peningkatan Sumberdaya Hayati dan Non Hayati Perairan dengan anggaran Rp. 1.825.000.000,- dapat terelisasi Rp. 1.601.057.500,- (87,73%) dengan hasil berupa Penanaman Bibit Mangrove 50.000 Pohon 5 Ha, Pembuatan Site Plan Kawasan Konservasi Kepiting Bakau 1 buah, pengadaan 1.106.000 Ekor Benih dan Pakan 22.200 Kg (Udang, Ikan Nila, Patin, Mas) untuk 5 Desa.
 - h. Program Pemberdayaan Kelompok Tani dan Nelayan tidak dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,-

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- Terlambatnya dana yang turun ke dinas sehingga berakibat pada penggeseran jadwal kegiatan yang sudah direncanakan.
- Akibat masalah keuangan di atas maka berakibat pada kesulitan mencapai target yang sudah ditetapkan karena sektor ini sangat sensitif terhadap pengaruh dari faktor eksternal yaitu musim dan cuaca.
- Penilaian kinerja baru sampai pada indikator input, output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact belum bisa diukur karena belum adanya parameter untuk pengukurannya.

Solusi :

Strategi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan adalah dengan cara mengerahkan segenap sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sarana dan prasarana yang ada, mendorong kinerja aparatur, dan meningkatkan koordinasi antar bidang maupun dengan instansi terkait.

Menyusun Rencana Operasional dan Rencana Tindak secara matang dari setiap kegiatan. Rencana Operasional dan Rencana Tindak tersebut digunakan sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan.

ii. PERTANIAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Data/Informasi

- 1) Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 2) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Peternakan
- 3) Survey Investagasi dan Design (SID) Pengembangan Peternakan Sapi Bali

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

- 1) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- 2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 3) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- 4) Pemberdayaan Kelompok Peternak

c. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)

- 1) Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan
- 2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- 3) Pengembangan Lumbung Pangan Desa
- 4) Pengembangan Perbenihan/Perbibitan
- 5) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- 6) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian
- 7) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

- 8) Pendampingan Kegiatan Perluasan Areal, Pengelolaan Lahan dan Air (APBN)
- 9) Pencetakan Sawah Desa Perangat Baru Kecamatan Marang Kayu (Bantuan Keuangan Propinsi)
- 10) Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian (DAK)
- 11) Pendampingan DAK Pertanian
- 12) Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
- 13) Pembinaan, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Lembaga Kemitraan Petani dan Pelaku Agrobisnis
- 14) Pendukung Kegiatan APBN

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

f. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- 1) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
- 2) Bantuan Pengadaan Saprodi (Padi, Jagung, Kedelai, Identifikasi, CPOL dan Pembinaan) (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 3) Bantuan Pengadaan Pupuk (Urea, Superphoa, NPK, Pestisida dan Benih Padi) (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)

- 4) Pengembangan Kawasan Industri Pangan Berbasis Padi (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 5) Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit
- 6) Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
- 7) Pengadaan Bibit Unggul Tanaman Karet Rakyat
- 8) Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat
- 9) Perlindungan Tanaman Perkebunan
- 10) Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat di 13 Kecamatan (Bantuan Keuangan Provinsi 2009)
- 11) Usaha Pembibitan Kelapa sawit dan karet
- 12) Pengembangan pembibitan sawit sistem home industri
- 13) Pembibitan karet pola home industri
- 14) Pembangunan jalan usaha tani dan produksi perkebunan
- 15) Pemeliharaan tanaman perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat
- 16) Pendukung Tugas Pembantuan Kabupaten (TP-APBN)

g. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan

h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

- 1) Pembangunan Pintu Air dan Drainase

i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

- 1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
- 2) Pengamatan Penyakit dan Perlindungan Hewan
- 3) Pelayanan Kesehatan Hewan
- 4) Pengamanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 5) Pembinaan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)
- 6) Pengadaan Obat-obatan dan Peralatan Medis Peternakan

j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- 1) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
- 2) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Sapi Bali
- 3) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Babi
- 4) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Kerbau
- 5) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Kambing
- 6) Pengembangan Ternak Ruminansia
- 7) Pengembangan Ternak Non Ruminansia
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Ternak Kerbau Pada Lahan Ex-Batu Bara.
- 9) Pengembangan IB dan Embrio Transfer
- 10) Pengembangan Pakan Ternak.
- 11) Penataan Data Statistik Peternakan
- 12) Pengadaan Sapi di Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman (Bantuan Keuangan Propinsi)

- 13) Breeding Center Untuk Ternak Babi di Jahab Kec Tenggarong
- 14) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Babi (Lanjutan)
- 15) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Kerbau (Lanjutan)
- 16) Pengembangan Pusat Pembibitan (Breeding Center) Ayam Buras (Lanjutan)
- 17) Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Pusat Pembibitan Ternak Kerbau Rawa Kec. Muara Muntai (Lanjutan)

k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

- 1) Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
- 2) Penyuluhan Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Peternakan yang Akan Dipasarkan
- 3) Peningkatan Pelayanan Usaha dan Permodalan
- 4) Pembebasan Lahan Untuk Peternakan Kambing Seluas Lebih Kurang 50 ha Kec. Sebulu (Lanjutan)

l. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

- 1) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna

m. Program Peningkatan Sarana Produksi Hasil Peternakan

- 1) Pengadaan Bahan Material Pusat Pembibitan
- 2) Pengadaan Inventaris Pusat Pembibitan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pengembangan Pertanian dalam arti luas merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak dicanangkannya program Gerbang Dayaku. Untuk tahun anggaran 2009 sendiri, pencapaian indikator keberhasilan di bidang Produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar mencapai 5,17% dengan kontribusi terhadap PDRB dengan migas sebesar 5,43%.

Sementara apabila dilihat berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.595.576.500,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.552.451.900,- (97,29%) dengan hasil berupa Pengerasan / Telpot jalan usaha Tani 3 m x 200 m Kelompok Tani Kejawi Permai A Desa Rapak Lambur, Pembangunan Rumah Pengelolaan Kompos 5 Unit.
- b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 26.598.933.729,- dapat terelisasi Rp. 24.430.904.135,- (91,85%) yang pemanfaatannya untuk Aktualisasi dan Pemutakhiran Data Pertanian 18 Kecamatan, Pelatihan 35 Orang dalam hap Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian, Alat Pertanian Power Thresher, Arco, Vacuum Fryer, Dryer (30 Unit), Pembangunan Lantai Jemur, Pondok Pertemuan, Lumbung Pangan, Gazebo, Rehab Kamar Mandi dan Pintu Gudang (6 Jenis 16 Unit), Bibit Hortikultura 234.50 Ha, Bibit Tanaman 4.644 Pohon/Kg, Bahan Obat-obatan 9

Jenis 37.143 Kg/Botol/Liter, Alat Peraga 4 Jenis 11.002 Unit/Meter/Potong, Pengadaan Insektisida dan Distribusi 192.250 Kg/Botol, Peserta Apresiasi Sapra Pertanian 30 Orang 10 Kali, Bibit Tanaman 9 Jenis 10.382 Kg, Bahan Obat-obatan Pupuk Majemuk 64.740 Kg/Botol, Perluasan Areal Pencetakan Sawah 1.375 Ha, Optimalisasi Lahan 240 Ha, Pembangunan Jalan Usaha Tani 8000 M, Pengembangan Jalan Usaha Tani 2.500 M, Rehab Jaringan Irigasi 435 Ha, Pembuatan Irigasi, Embung dan Dam 8 Unit, Bibit Tanaman 62.000 Stek/Batang, Pupuk 2.400 Kg, Jaringan Irigasi Usaha Tani 88 Km/Unit, Pengolahan Areal 12 Ha, Rehab Balai 154 M², Rumah Pompa, Genset, Reservoir, Pompa Air (4 Unit), Irigasi Air Tanah (5 Unit), Cek Dam 50 M², Pipa Instalasi 700 M.

- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan untuk Pengembangan Alsintan (Hand Traktor, Pady Reaper, Walking Transplanter, Power Reader, Mesin Penghancur, Pompa Air, Pompa Thresher) 80 Unit dengan biaya sebesar Rp. 2.085.519.650,- atau 95,11% dari alokasi sebesar Rp. 2.192.653.150,-
- d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 46.047.985.000,- dan realisasi mencapai 85,54% atau Rp. 39.393.242.835,- yang dipergunakan untuk memperoleh hasil berupa Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan bagi 31 Kelompok, pengadaan Alsintan 66 Unit, Komputer / Notebook 4 Unit, Pembangunan Lumbung Padi dan Gudang Alsin 24 M²; Bibit Kelapa Sawit 67.340 Pohon, Pupuk NPK 12.950 Kg, Herbisida 1.554 Liter, Pengembangan Lahan Kelapa Sawit 518 Ha pada 24 Kelompok Tani; Bibit Kelapa Karet

281.000 Pohon, Pupuk NPK 14.050 Kg, Herbisida 1.686 Liter, Pengembangan Lahan Karet 562 Ha pada 25 Kelompok Tani, Pengembangan 102 Ha; Bibit Karet Okulasi Siap Tanam 51.000 Pohon, Pupuk NPK 2.040 Kg, Herbisida 306 Liter; Pembibitan 6,3 Ha pada Kelompok Tani 6 Desa, Bibit 165.000 Batang, Pupuk NPK 10.556 Kg, Herbisida 36 Liter; Pengembangan pembibitan sawit sistem home industri 18 Ha pada 9 desa; Pembibitan Karet Rakyat 13,20 Ha pada 22 Desa, Pupuk, Pestisida (22.132 Kg), Herbisida 132 Liter; Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bendang Raya 3 Km, Pembangunan Jalan Usaha Tani Kel. Loa Ipuh Darat 5 Km.

- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan berupa Pembuatan Leaflet Profil Investasi Komoditi Perkebunan 1000 Lembar dengan serapan dana sebesar Rp. 178.400.000,-
- f. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya berupa Pintu Air Handil Baru 1 unit , Saluran Drainase Amborawang Laut 2 km dengan dana Rp. 490.370.000,- atau 98,07% dari alokasi sebesar Rp. 500.000.000,-
- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan anggaran sebesar Rp. 1.807.826.900,- dan realisasi sebesar Rp. 1.640.037.600,- (90,72%) dengan hasil berupa Vaksinasi pada hewan ternak, Pengambilan Sampel Darah dan Pemeriksaan Sampel, Pelayanan pemeliharaan kesehatan ternak masyarakat, Analisa kelayakan daging di pasar, Bahan Sampel Daging dan Jasa Pemeriksaan 180 Sampel, Biaya Operasional 2 Puskesmas,

- Obat-obatan Hewan 52 Jenis 1.938 Botol / Boks / Unit,
Alat Peternakan 21 Jenis 3970 Buah / Boks / Unit / Lusin
- h. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 13.906.915.200,- dan realisasi mencapai 96,91% atau Rp. 13.477.760.609,- menghasilkan keluaran berupa Pengaspalan jalan lingkungan Lokasi Breeding Centre Lebaho Ulaq 315 M, Pengerasan jalan lingkungan RPH Mangkurawang, 240 M Semenisasi jalan menuju tempat pemotongan hewan 45 M, Pengadaan Konstruksi Jaringan Air RPH (1 Paket) Pembuatan Kenopi Parkir Kendaraan Angkut Daging (1 Paket), Semenisasi Lantai Ruang Pemotongan Hewan 6 M³, Pemeliharaan 300 Ekor Bibit Ternak Sapi Balik, Petugas Teknis 260 O/B, Upah Harian 2000 Hok, Servis Pemeliharaan 6 Jenis 10 Bulan, Suku Cadang 70 Buah, Kendaraan dan Mesin 8 Unit 10 Bulan, Jilid 10 Buku, Timbangan Ternak Digital 2 Unit, Pengadaan Buku Beternak Sapi, Kambing, Kerbau 800 Buah, Pengadaan Ternak Sapi Bali 625 Ekor, Kerbau 100 ekor, Kambing Boerawa 189 Ekor, Pelatihan PKB dan ATR 10 Orang, Penyuluhan 1 Kali, Pelatihan Teknis 2 Orang, Bahan Obat-obata 5 Jenis 1430 Liter/Kg, Cetak Buku Teknis Budidaya 150 Buku, Pengadaan Tanah Peternakan dan Biaya Pengukuran tanah lokasi breeding Centre babi Jahab oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) 30 Ha, Kalang dan Pagar Lahan Breeding Kerbau serta Pembebasan Lahan Breeding.
- i. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.411.625.343,- dan realisasi mencapai Rp. 3.223.194.091,- (94,48%) dengan hasil berupa Promosi Atas Hasil Produksi

Peternakan Unggulan Daerah dan Pembebasan Lahan, Tanah, Tanam Tumbuh, Bangunan dan Benda Lainnya untuk Breeding Venter Ternak Kambing 50 Ha.

- j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Biourine dan Kompos Bokashi 1 Kegiatan dengan serapan dana sebesar Rp. 159.544.000,- atau 89,89% dari anggaran sebesar Rp. 177.364.000,-
- k. Program Peningkatan Sarana Produksi Hasil Peternakan dengan anggaran sebesar Rp. 807.900.000,- dan serapan dana Rp. 760.870.300,- (94,18%) yang menghasilkan keluaran berupa Belanja Bibit ayam Buras Unggul (DOC Parent Stock) 2.500 Ekor, Belanja bahan Obat-Obatan 1 Kegiatan, Bahan Kimia dan Pupuk 15,5 Liter/Pak/Botol, Bahan Material 12 Jenis 568 Buah/Kaleng/Meter/Sak/ Kegiatan, Upah Tukang Harian 250 Orang, Jilid 25 Eks serta Pengadaan Mesin Tetas Digital Besi (4 Unit), Fasilitas Digging Spray (1 Unit), Lemari, Jam, Tabung Gas, Kulkas, Alat Laboratorium, Sentolop (6 Jenis 14 Buah/Set)

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan umum yang berimplikasi terhadap kegiatan usahatani bidang pertanian tanaman pangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani antara lain :

- Ketersediaan anggaran yang bersumber dari APBD tidak bertepatan waktunya dengan kegiatan dilapangan
- Kondisi infrastruktur yang belum memadai terutama akses jalan usahatani dan sarana jalan pedesaan (sentra produksi)

- Ketersediaan lembaga finansial dan fasilitas program dalam pelayanan pendanaan usahatani yang masih terbatas
- Terjadinya perubahan lingkungan usahatani yang kurang mendukung proses produksi yang disebabkan adanya kegiatan usaha non pertanian (kegiatan pertambangan dan perkebunan).

Dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan masih terhambat adanya permasalahan yang bersifat teknis baik yang berifat internal maupun eksternal antara lain :

- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke usaha non pertanian sehingga berakibat turunnya luas panen dan produksi
- Ketersedian Sarana Produksi yang relative terbatas ditingkat petani
- Kinerja petugas teknis di Kecamatan yang belum maksimal
- Adanya alih fungsi (transisi) tenaga kerja petani ke sektor non pertanian (sektor jasa, pertambangan dan perkebunan)

Agar kegiatan pertanian tanaman pangan tetap berjalan dengan baik dan sesuai harapan, tentunya perlu adanya penanganan dan tindakan yang konkrit baik bersifat umum maupun teknis dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain ;

- Mengintensifkan bimbingan dan pembinaan ke Kecamatan maupun desa

- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral guna penanganan masalah degradasi lahan pertanian
- Melaksanakan bimbingan ke kelompok tani dalam upaya mengakses sarana produksi (pupuk)
- Memantapkan modernisasi pertanian

iii. KEHUTANAN;

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

- 1) Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu
- 2) Pengembangan Sarana Budi Daya Sarang Burung Walet
- 3) Pelatihan Petani Budidaya Burung Walet.
- 4) Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu
- 5) Penyusunan Raperda Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu
- 6) Penyusunan Master Plan RHL Tingkat Kecamatan

b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Pelatihan Kelompok Tani
- 2) Pengadaan Hutan Kota
- 3) Penghijauan Lingkungan
- 4) Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan
- 5) Penunjang Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan DAK/DR
- 6) Rehabilitasi Kawasan Delta Mahakam
- 7) Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM)

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

- 1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 2) Bimbingan Teknis Pelatihan Petani Perlindungan Hutan dan Lahan
- 3) Penyuluhan Perlindungan Hutan dan Lahan
- 4) Inventarisasi Daerah Rawan Gangguan Keamanan Hutan
- 5) Inventarisasi Kawasan Lindung, Konservasi dan Kawasan Budidaya
- 6) Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara
- 7) Studi Kelayakan Pengelolaan terpadu Kawasan Lindung dan Hutan Lindung (Air Terjun Selerong)
- 8) Penyusunan database kehutanan dan pengadaan peta citra lansat kab. Kukar
- 9) Penyusunan database kehutanan dan pengadaan peta citra lansat kab. Kukar
- 10) Orientasi kegiatan batas kawasan
- 11) Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
- 12) Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Regu Kebakaran Hutan dan Lahan
- 13) Penanggulangan Kebakaran Hutan

d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

- 1) Pameran Hasil Hutan

- 2) Pengawasan dan Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan

e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

- 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi)
- 2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Penghijauan Sumber Dana DAK DR)

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang selama ini menjadi andalan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di Kutai Kartanegara. Peranan pemerintah dalam sektor kehutanan terlihat dari capaian kinerjanya dalam hal Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Pada tahun 2009 rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya mencapai 1,62 %, sementara kerusakan lahan hutan sebesar 38,28 %.

Jika ditilik berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dengan anggaran sebesar Rp. 2.065.411.150,- dapat direalisasikan Rp. 1.940.272.345,- atau 93,94% dengan hasil berupa Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu Bahan Baku Bangunan 6 Jenis 72.629 Kaleng/Buah/Kali, Tanaman 5 Jenis 79.743 Batang, Obat-obata 2.090 Kg/Liter, Bahan Material Lainnya 3 Jenis 101 Buah; 1 unit sarana budidaya sarang burung walet; Pelatihan bagi 25 Petani Budidaya Burung Walet;

- Raperda Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu serta Dokumen Master Plan RHL Tingkat Kecamatan.
- b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan anggaran Rp. 3.368.380.591,- dapat direalisasikan sebesar 85,50% atau Rp. 2.880.007.937,- dengan keluaran berupa Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Pelatihan Kelompok Tani bagi 60 orang peserta, Pengadaan 31 Ha Hutan Kota, pengadaan bahan untuk penghijauan lingkungan berupa Bahan Persemaian 248 Kaleng/Unit/Buah, Benih Tanaman 310.870 Kg/Batang, Obat-obatan 120 Kg/Liter, Hadiah 3 Unit, Bahan Material Lainnya 2 Jenis 10.477 Unit, Pakaian Kerja Lapangan Baju dan Topi @ 500 Buah, Rehabilitasi Kawasan Danau dan Perairan 54 Ha, Rehabilitasi Kawasan Delta Mahakam 75 Ha.
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dengan anggaran Rp. 4.189.864.948,- dapat direalisasikan Rp. 3.174.606.670,- (75,77%) dengan keluaran berupa Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada 81 titik di 16 kecamatan, Bimbingan Teknis Pelatihan Petani Perlindungan Hutan dan Lahan dengan peserta 60 orang, Penyuluhan Perlindungan Hutan dan Lahan kepada 300 orang, Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan, Orientasi kegiatan batas kawasan sepanjang 80 Km serta Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kepada 50 orang peserta.
 - d. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dengan alokasi dana Rp. 239.528.900,- dan realisasi mencapai Rp. 206.078.500,- atau 86,03% dengan hasil berupa pameran hasil hutan 3 kali, Pengawasan dan

Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan 2 obyek 20 IUPHHK.

- e. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dengan anggaran Rp. 17.878.170.200,- dan realisasi 72,97% atau Rp. 13.045.789.925,- yang dimanfaatkan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Reboisasi) 3.856 Ha Di Kawasan Budidaya Kehutanan.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk urusan Kehutanan adalah kurangnya alokasi dana untuk rehabilitasi kerusakan hutan.

Diharapkan pada tahun 2010 ada penambahan alokasi dana untuk program dan kegiatan di bidang Kehutanan.

iv. ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- 1) Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
- 2) Monitoring Batas Wilayah KP
- 3) Survey dan Memetakan Data Geologi, Geografi, Geodesi
- 4) Inventarisasi Potensi dan Cadangan Bahan Galian Pemegang Izin KP
- 5) Monitoring dan Evaluasi Lahan Pasca Tambang
- 6) Monitoring Pelaksanaan UKP/UPL dan RKL/RPL Kegiatan Pertambangan Umum dan Energi

- 7) Analisis Pengembangan Lahan Pasca Tambang di Kaitkan Dengan Rencana Penutupan Tambang dan Tata Ruang Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 8) Pembinaan dan Evaluasi Perizinan Migas
- 9) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Air Bawah Tanah/Air Permukaan
- 10) Pengawasan Distribusi BBM
- 11) Inventarisasi Fasilitas WKP Migas di Wilayah Kab. Kutai Kartanegara
- 12) Pelaksanaan Inspeksi K3
- 13) Pelaksanaan Inspeksi Pengelolaan Lingkungan
- 14) Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Pertambangan Umum
- 15) Monitoring Produksi dan Penjualan Batubara

b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- 1) Pameran Pembangunan dan Expo Dalam Daerah dan Luar Daerah

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- 1) Penataan Sistem Administrasi Kepegawaian
- 2) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit (PAK) Kenaikan Pangkat Inspektur Tambang

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

- 1) Pengadaan Solar Light
- 2) Biaya Pemeliharaan Rutin dan Operasional PLTD
- 3) Pengadaan dan Biaya Pemasangan Perawatan Berkala W4, W5 dan W6 PLTD

- 4) Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kelistrikan
- 5) Inventarisasi Keperluan Energi Listrik Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
- 6) Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Listrik
- 7) Pemindahan Tiang Listrik di Kecamatan Kota Bangun Seberang

e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- 1) Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Kontribusi sektor pertambangan yang sebesar 85,84% dari total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 menunjukkan masih dominannya peranan sektor tersebut. Dalam hal ini tujuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada sektor migas untuk beralih ke sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah masih jauh dari harapan

Kenyataan tersebut ditambah dari kurang maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009 yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan anggaran Rp. 1.980.144.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.922.242.800,- atau 97,08% yang dimanfaatkan untuk Monitoring Dan Evaluasi Perizinan Bahan Galian Gol.C, Monitoring Batas Wilayah KP dengan obyek 12 perusahaan, Survey dan Memetakan Data Geologi-Geografi-Geodesi pada 5 obyek, Penataan Dokumen Pemegang Ijin KP 168 perusahaan, Monitoring dan Evaluasi Lahan Pasca Tambang pada 13 perusahaan. Inspeksi K3 pada 7 perusahaan, Inspeksi Pengelolaan Lingkungan pada 5 perusahaan, Monitoring Produksi dan Penjualan Batubara pada 7 perusahaan.
- b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi yang berupa Pameran Hut Peristiwa Merah Putih Di Sanga-sanga, Pameran Dalam Daerah Provinsi Kaltim (Erau Expo), Pameran Indonesia Regency Jakarta dengan serapan dana Rp. 356.079.200,- atau 70,22% dari alokasi Rp. 507.079.200,-
- c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan besaran anggaran mencapai Rp. 32.207.604.675,- dan hanya dapat diserap 17,19% atau Rp. 5.535.103.500,- yang dipergunakan untuk Pengadaan dan Pemasangan PLTS 50 WP Menamang Kanan, Tunjungan, Pulau Pinang, Liang Buaya, Bukit Layang 376 Unit serta Jaringan Listrik di Kota Bangun, Gunung Menyapa, Markas Armed Desa Jembayan dan Marang Kayu (4 Item).
- d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan untuk Penyusunan 25 Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang menyerap dana

sebesar Rp. 117.700.000,- atau 98,91% dari alokasi sebesar Rp. 119.000.000,-

- e. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan untuk penyusunan Dokumen 2 Perda dan 3 Perbub yang menyerap dana Rp. 75.157.000,- atau 47,87% dari alokasi sebesar Rp. 157.000.000,-.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009, kecuali ada beberapa kegiatan yang dialokasikan pada APBD-P tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu.

v. PARIWISATA;

Sebagai implementasi terhadap prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu pada pengembangan industri pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata, maka pada tahun 2009 pelaksanaan program diarahkan pada program **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** dengan kegiatan sbb :

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 1) Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
- 2) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
- 3) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 1) Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
- 2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dibidang Pariwisata
- 4) Monitoring / penertiban perijinan dibidang pariwisata.
- 5) Penataan Kawasan Obyek Wisata Waduk Sukarame Tenggarong (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 6) Bantuan Pembenahan Obyek-Obyek Wisata/Daerah Tujuan Wisata dalam rangka Tahun Kunjungan Wisata (Bantuan Keuangan Provinsi APBD-P TA. 2009)
- 7) Redesign Patung Lembu Suana di Pulau Kumala

c. Program Pengembangan Kemitraan

- 1) Bimbingan Teknis bidang Perhotelan
- 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah kunjungan wisata yang mencapai 287.259 orang. Walaupun demikian kontribusinya terhadap PDRB masih sangat rendah karena berada di bawah 1%

Demikian halnya apabila ditinjau dari segi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 3.144.107.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.110.956.525,- atau 98,95% yang dimanfaatkan untuk mengikuti Pameran Luar Negeri 2 Kali (Tong-tong Belanda dan Australia), Dalam Daerah 7 kali, Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 75 orang serta pengadaan Komputer Layar Sentuh Mobile 1 Unit, Brosure Elektronik dan Master 5.251 Keping, Lensa Tele dan Handy Cam 2 Unit, Pengembangan Data Website dan Pemutakhiran Data 2 Kegiatan.
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan anggaran mencapai Rp. 12.466.044.600,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.236.474.100,- (58,08%) dengan pemanfaatan untuk Konstruksi Pembangunan Taman Burung dan Rest Area, Penataan Obyek Wisata Kedaton, Pembebasan Tanah Waduk Panji Sukarame dan Sertifikasi, Penataan Obyek Wisata di Taman Ria Temanggung dan Waduk Panji Sukarame, Pembangunan Lamin Budaya Lekaq Kidau dan Obyek Wisata Pulau di Desa Kembang Janggut, Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan dibidang Pariwisata kepada 400 peserta.
- c. Program Pengembangan Kemitraan dengan anggaran sebesar Rp. 600.892.500,- dan realisasi Rp. 597.838.400,- (99,49%) yang dipergunakan untuk Bimbingan Teknis bidang Perhotelan terhadap 75 orang, Sosialisasi Sadar Wisata, Pembinaan Potensi Aneka Wisata dan Duta Wisata 3 kali.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- Masih lemahnya SDM yang tersedia dalam hal pembinaan sektor wisata
- Lemahnya koordinasi lintas sektoral
- Belum adanya kerjasama antar pelaku usaha sektor wisata
- Sarana dan prasarana kerja yang belum representatif untuk menunjang kegiatan kepariwisataan

Solusi :

- Meningkatkan kemampuan SDM Pembinaan di sektor wisata
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral secara berkala
- Memfasilitasi para pelaku sektor usaha pariwisata sesuai dengan kompetensinya.
- Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

vi. INDUSTRI

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 1) Bimbingan Teknis Pengembangan Produksi Kerajinan
- 2) Pengembangan Industri Energi Alternatif

b. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial

- 1) Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Pasar Desa di Kecamatan Samboja

c. Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil Menengah

- 1) Bimbingan usaha dan produksi industri rumah tangga dan kecil
- 2) Pengawasan Teknis Kegiatan Industri
- 3) Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri
- 4) Pembinaan DEKRANASDA

d. Program Pengembangan Kemampuan Teknologi dan Produksi

- 1) Perencanaan Teknis Pengembangan Kompetensi Inti dan Industri Unggulan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 mencapai 42,82% dengan kontribusi pada PDRB sebesar 1,24%.

Sedangkan untuk realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan alokasi dana Rp. 592.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 588.381.000,- (99,30%) dengan hasil berupa Bimbingan Teknis Pengembangan Produksi Kerajinan kepada 20 orang dari perwakilan 40 IKM, Pengembangan Industri Energi Alternatif kepada 20 orang.

- b. Program Pengembangan Kelembagaan Industri Kecil Menengah dengan anggaran Rp. 2.064.170.550,- dapat direalisasikan Rp. 2.019.843.050,- (97,85%) dengan output berupa Bimbingan usaha dan produksi industri rumah tangga dan kecil bagi 20 orang dari 85 IKM pada 7 Kecamatan, Peningkatan Promosi dan Pemasaran Hasil Industri, Pembinaan DEKRANASDA 100 orang.
- c. Program Pengembangan Kemampuan Teknologi dan Produksi untuk kegiatan Perencanaan Teknis Pengembangan Kompetensi Inti dan Industri Unggulan dengan serapan anggaran sebesar Rp. 148.588.400,- atau 74,29% dari alokasi sebesar Rp. 200.000.000,-

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2009.

vii. PERDAGANGAN

1. Program dan Kegiatan

a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri

- 1) Pengawasan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan
- 2) Pengawasan dan Penerbitan TDP
- 3) Identifikasi Sembako, BBM, Semen, Bahan Bangunan dan Gas Elpiji
- 4) Pengembangan Promosi/Expo Dalam Negeri
- 5) Operasi Pasar Sembako

- 6) Peningkatan Peluang Investasi Usaha Perdagangan
- 7) Pengawasan Peredaran Barang Kadaluwarsa & Barang Terlarang
- 8) Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen
- 9) Identifikasi Profil Komoditi Daerah
- 10) Identifikasi Pengembangan Perdagangan
- 11) Sinkronisasi Pengembangan Perdagangan Antar Pulau
- 12) Identifikasi Alat UTTP
- 13) Sidang Tera Ulang Alat UTTP

b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- 1) Pengembangan Pasar Desa Loa Janan
- 2) Pembinaan Industri Berwawasan Lingkungan

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Eksport

- 1) Pendataan Komoditi Eksport Daerah
- 2) Pengembangan Eksport Non Migas Panjatapda Satgas Pemasaran Kab.Kukar
- 3) Promosi/Expo Luar Negeri

d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

- 1) Pengembangan Perdagangan Internasional
- 2) Identifikasi Pendukung Pengembangan Perdagangan Internasional

e. Program Peningkatan Kualitas Pemantapan UMKM

- 1) Pemantapan UMKM

2) Peningkatan Badan Pelayanan Umum Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara masih relatif kecil, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap PDRB tahun 2009 yang hanya sebesar 2,56%.

Sementara itu kinerja bidang Perdagangan dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat dicinci sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri yang mendapat alokasi dana Rp. 1.663.953.000,- dengan realisasi Rp. 1.577.379.000,- (94,80%) yang dipergunakan untuk menghasilkan Pengawasan Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan pada 18 titik/kecamatan, Pengawasan dan Penerbitan TDP pada 17 titik, Identifikasi Sembako, BBM, Semen, Bahan Bangunan dan Gas Elpiji pada 18 obyek, Operasi Pasar Sembako pada 5 desa serta koordinasi ke departemen terkait.
- b. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan serapan dana sebesar Rp. 904.819.000,- atau 90,84% dari alokasi yang tersedia sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan keluaran berupa Pengembangan Pasar Desa Loa Janan, Mengikuti Diklat Lingkungan 4 Orang dan Pemantauan Penerapan UKL/UPL dan AMDAL pada 7 Kecamatan.
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan kegiatan berupa Pameran Produksi Ekspor Nasional Jakarta dengan peserta 4 orang, Pendataan Komoditi

Eksport Daerah pada 7 kecamatan yang menyerap anggaran sebesar Rp. 206.025.600,- atau 75,79% dari alokasi sebesar Rp. 271.838.000,-

- d. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional berupa Studi Pengembangan Perdagangan Internasional di Jakarta 8 Org dan Identifikasi Pendukung Pengembangan Perdagangan Internasional pada 8 kecamatan dengan dana sebesar Rp. 118.402.000,- atau 75,87% dari alokasi sebesar Rp. 156.062.000,-

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2009.

viii. KETRANSMIGRASIAN

1. Program dan Kegiatan

a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

- 1) Penguatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan.
- 2) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
- 3) Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi.
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman Transmigrasi.

- 5) Lanjutan Peningkatan UPT Desa Rapak Lambur (Bantuan Keuangan Provinsi).

b. Program Transmigrasi Lokal

- 1) Identifikasi Potensi Lahan dan Pemantapan Rencana Lokasi Pengembangan Transmigrasi dan Penataan Masyarakat Lokal
- 2) Penyiapan Permukiman Masyarakat Lokal Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan di bidang transmigrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.711.042.500,- dan realisasi sebesar Rp. 2.646.030.350,- atau 71,3% dengan keluaran berupa Bimtek Pengetahuan Tenaga Teknis Lapangan 24 Orang, Evaluasi Program Transmigrasi, Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan 40 Orang, Ternak Bebek 624 Ekor, Pakan 5.200 kg, Bantuan Buku Agama Perpustakaan Alat Sekolah, Pengukuran Kadesteral, Peningkatan Jalan Desa UPT Rapak Lambur 0,45 Km.
- b. Program Transmigrasi Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 3.122.004.500,- dan realisasi sebesar Rp. 2.888.628.250,- atau 92,52% dengan keluaran berupa Pembangunan Rumah Penataan Tipe 36 untuk Jahab, Samboja Kuala dan Saliki serta Pemantapan Rencana Lokasi Pengembangan

Transmigrasi dan Penataan Masyarakat Lokal di 22 desa/
lokasi.

3. Permasalahan dan Solusi

Tidak ditemui permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2009.

BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

A.1. Dasar Hukum

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/ Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksudkan dana tugas pembantuan memiliki diskripsi sebagai berikut :

- Merupakan belanja kementerian/ lembaga pusat
- Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada daerah dan/ atau desa
- Kepala Daerah memeberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD
- Dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- SKPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala daerah dan kemudian dilaporkan ke Kementerian / lembaga
- Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada

daerah

- Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik
- Tidak memerlukan dana pendamping
- Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara

Sedangkan menurut PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah “Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu”

A.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendapatkan dana bantuan tugas pembantuan dari dana APBN dari 6 Departemen teknis yaitu :

- Departemen Pertanian
- Departemen Perkebunan dan Kehutanan
- Departemen Transmigrasi
- Departemen Sosial
- Departemen perikanan dan kelautan
- Dirjen Pemberdayaan masyarakat desa

A.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Dana tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun Anggaran 2009 dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) antara lain :

- Dinas Pertanian tanaman pangan
- Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
- Badan ketahanan pangan dan penyuluhan
- Dinas Perikanan dan kelautan
- Dinas Peternakan
- Dinas Perkebunan
- Bapemas/Sekretariat daerah

A.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

1. Dinas Pertanian tanaman pangan

APBN

- Program Pengemb. Agribisnis
 - ◆ Integrasi tanaman ternak, kompos dan Bio gas,
 - ◆ Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)
 - ◆ Pengembangan Agroindustri Perdesaan
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - Bantuan Benih Bibit/Bibit, sarana produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan
 - Mekanisme Pertanian Pra dan Pasca Panen
 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina, dan Peningkatan Keamanan
 - Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP).
 - Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian (TP)

- Program peningkatan Kesejahteraan Petani
 - ◆ Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan, Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan agribisnis.
 - ◆ Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana alam
 - ◆ Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
 - ◆ Peningkatan Sistem Penyuluhan, Sumber daya manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok tani

2. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan APBN

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - ◆ Pengembangan Desa Mandiri pangan, Penanganan Daerah Rawan pangan dan dan Diversifikasin Pangan
 - ◆ Diversifikasi pangan
- Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - ◆ Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik dan Bencana Alam

3. Dinas Peternakan APBN

- Program Pengembangan Agribisnis
 - Integrasi Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas (TP)
 - Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP)

- Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - ◆ Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Serta Pengembangan Kawasan (TP)
 - ◆ Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP)

- 4. Dinas Perkebunan
 - APBN
 - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - ◆ Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur pertanian (TP)

 - Program Pengembangan Agribisnis
 - ◆ Pengembangan Agroindustri Perdesaan

- 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - APBN
 - Program Pengemb. dan Wilayah Strategi dan cepat tumbuh
 - Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di wilayah Cepat Tumbuh
 - Peningkatan kapasitas SDM, Pemda dan masyarakat transmigrasi di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
 - Fasilitasi pengakhiran status Bina Pemukiman Transmigrasi di wilayah Strategis dan cepat tumbuh.

 - Program Perlindungan dan Pengemb. Lembaga Tenaga Kerja
 - ◆ Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negoisasi Bipartit

- Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
 - ◆ Pengawasan Norma Keselamatan dan kesehatan Kerja

6. Dinas Perikanan

APBN

- Program Pengembangan Sumber daya Perikanan
 - ◆ Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

7. Sekretariat Daerah/BAPEMAS

APBN

- Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
 - Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan

A.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerima dana tugas pembantuan sebesar Rp. 18.083.454.000 (delapan belas milyar delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas 7 program dan 28 kegiatan yang didistribusikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan rincian dana/barang tugas pembantuan yang diterima adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2009

No	Nama Instansi	APBN	
		Alokasi (Rp.000)	Realisasi (Rp. 000)
1	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	4.302.865	4.302.865
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.073.214	1.073.214
3	Badan Ketahanan pangan dan Penyuluhan	711.500	711.500
4	Dinas Perikanan dan Kelautan	926.300	926.300
5	Dinas Perternakan	437.720	437.720
6	Dinas Perkebunan	650.000	650.000
7	Bapemas/ Sekretariat Daerah	9.647.355	9.647.355
	Jumlah	18.083.454	18.083.454

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir triwulan keempat realisasi Tugas Pembantuan-APBN di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp. 16.840.249.575,- (Enam belas milyar delapan ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar 93,13 persen dengan realisasi fisik sebesar 98,04 persen.

A.6. Permasalahan Dan Solusi

Untuk tugas pembantuan ini beberapa permasalahan yang ditemui pada tahun anggaran 2009 terdiri dari ;

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah terutama tentang program-program yang akan dilaksanakan serta alokasi dana yang akan dikururkan, sehingga

ada beberapa program dan kegiatan yang tidak diketahui secara jelas oleh pihak Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penanganan permasalahan yang kurang optimal pada program dan kegiatan untuk tugas pembantuan ini, karena pihak Pemda hanya dilibatkan pada saat program dan kegiatan tersebut mengalami hambatan.
3. Realisasi kegiatan APBN-TP tidak mencapai 100 persen disebabkan penyelesaian kegiatan terhambat masalah teknis administrasi keuangan dan teknis kegiatan di lapangan.

Beberapa solusi yang disarankan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan peran koordinasi antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penentuan program kegiatan dan alokasi dana yang akan ditetapkan.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih optimal sehingga dalam penanganan permasalahan akan lebih mudah dan cepat.

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH

A.1. Kebijakan dan Kegiatan

Otonomi daerah pada hakikatnya penyelenggaraan pemerintahan di daerah diarahkan kepada percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, berbagai cara daerah untuk memanfaatkan dan mengali potensi yang ada yaitu berkreasi menggali dan memanfaatkan potensi yang ada melalui saling tukar pengalaman dan bekerjasama dengan daerah lain yang memiliki kesamaan potensi. Implementasi kerjasama yang dilaksanakan oleh dua daerah agar mendasari dan memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi dan saling menguntungkan, kebijakan kerjasama antar daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Kerjasama antar daerah. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam bekerjasama antar daerah maupun kerjasama dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk ***Tim Koordinasi*** berupa Keputusan Bupati Nomor :180.188/HK-60/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

A.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun untuk tahun anggaran 2009 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada melakukan kerjasama dengan daerah lain.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

B.1. Kebijakan dan Kegiatan

Untuk memaksimalkan penggalan dan pemanfaatan potensi SDA dan SDM di daerah perlu dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dimaksud dapat berupa fisik maupun juga non fisik dan khusus dibidang non fisik dimaksudkan untuk menyerap ilmu serta keahlian khusus dari pihak ketiga selaku nara sumber juga sebagai pendamping dalam hal pelaksanaan kegiatan/proyek baik itu dari Departemen/ Lembaga pemerintah non departemen dan perusahaan swasta yang berbadan hukum baik itu berupa yayasan, BUMN dan lembaga lainnya.

Dalam rangka pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga untuk turut memacu pertumbuhan dan perkembangan daerah dalam berbagai bidang. Kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana BAB I Pasal 1 poin 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Bidang-bidang kerja sama yang dilakukan dengan pihak ketiga merupakan lapangan kegiatan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip transparansi efisiensi dan efektifitas, dimana diharapkan hal ini akan menguntungkan kedua pihak, baik pihak ketiga maupun Daerah.

B.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, melalui SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2009 antara lain :

- Mou Nomor 180/MoU-1/HK/2009 tanggal 5 Januari 2009 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan PT.Bakrie Telekom, Tbk tentang Pemanfaatan dan Penggaunaan Instruktur Telekomunikasi.
- MoU Nomor 180/MoU-2/HK/2009 tanggal 5 Januari 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, *leading sector* BPKD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-3/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKH Kaltim Post tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-4/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKH Tribun Kaltim tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-5/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKH Samarinda Post tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-6/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKH Koran Kaltim tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-7/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKH Poskota Kaltim tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-8/HK/2009 tanggal 4 Maret 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

Majalah New Eksekutor tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.

- MoU Nomor 180/MoU-9/HK/2009 tanggal 29 April 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Wuski, Wus dan Cim Germani tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-10/HK/2009 tanggal 10 Juni 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Wuski, Wus dan Cim Germani tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-11/HK/2009 tanggal 10 Juni 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Wuski, Wus dan Cim Germani tentang Media Cetak, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-12/HK/2009 tanggal 17 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kapolres Kutai Kartanegara tentang Pelaksanaan Revitalisasi Program Keluarga Berencana Nasional, *leading sector* BKBPPPA.
- MoU Nomor 180/MoU-13/HK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Lembaga Adat Seni Budaya Kumala tentang Pengisian Acara Hiburan pada acara resmi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-14/HK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kios Bunga Rosalinda Samarinda tentang Pembuatan Sepanduk Digital Printing, Backdrop sponge, Spanduk Kaw serta Mini Garden dalam kegiatan resmi Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.

- MoU Nomor 180/MoU-15/HK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan dan Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun, Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Bantuan Operasional Sekolah, Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Guru dan Pengembangan Sekolah Unggulan, *leading sector* Bagian Humas dan Protokol Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-16/HK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan pengalihan anggaran belanja tak terduga menjadi belanja hibah untuk KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara, *leading sector* Bagian Keuangan Setkab Kutai Kartanegara.
- MoU Nomor 180/MoU-17/HK/2009 tanggal 18 Agustus 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara MoU Nomor 180/MoU-17/HK/2009 tanggal 7 Desember 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, *leading sector*.
- MoU Nomor 180/MoU-18/HK/2009 tanggal 5 Januari 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (KUA), *leading sector* Keuangan/ Bappeda dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010.
- MoU Nomor 180/MoU-19/HK/2009 tanggal 9 Desember 2009, Kerjasama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang

Penyusunan Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Kutai Kartanegara.

B.3. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam realisasi pelaksanaan kerjasama antara daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu masih adanya prinsip-prinsip dari peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang tidak dipenuhi dan dilaksanakan, sehingga kerjasama yang dilakukan kurang memberikan kontribusi yang berarti untuk pembangunan di daerah, dan solusi kedepannya yang diharapkan agar sebelum dilakukan kerjasama perlu dilakukan kajian-kajian secara komperhensif sehingga kerjasama yang akan dilakukan nantinya dapat memberikan manfaat dan masukan kepada kepala daerah sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut guna kesejahteraan masyarakat.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

C.1. Kebijakan dan Kegiatan

Kebijakan desentraliasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat melaksanakan percepatan pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik.

Hubungan antara pemerintah daerah dan legislatif dan lembaga vertikal di daerah merupakan hubungan kerja yang

kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna, bahwa lembaga pemerintahan di daerah tidak saling mendominasi namun bersinergi sehingga memberi hasil berupa perumusan dan penetapan langkah-langkah antisipasi maupun pemecahan permasalahan yang terkait dengan materi koordinasi semua pihak.

Kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan instansi vertikal dan unsur muspida serta DPRD Tahun 2009 diagendakan secara rutin terlaksana satu kali pertemuan untuk setiap bulannya dan akan dilakukan koordinasi sewaktu-waktu diperlukan.

C.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan rapat koordinasi meliputi :

- Koordinasi pembahasan tentang Hari Amal Bhakti Departemen Agama RI Ke-63 Tahun 2009 di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Produksi BPMIGAS-Total E&P Indonesia di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan pelaksanaan Peringatan Merah Putih di Sanga-Sanga.
- Koordinasi pembahasan tentang Penggunaan Barang dan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Instansi Vertikal dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan tentang Persiapan Pelaksanaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-64 Tahun 2009.
- Koordinasi pembahasan tentang Kunjungan Kerja Menteri Pertanian RI ke Kab. Kutai Kartanegara.

- Koordinasi pembahasan tentang Penyerahan dan Peresmian Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Tenggarong.
- Koordinasi pembahasan tentang Silaturahmi Kapolda Kaltim di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan tentang Pemilu Legislatif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan tentang Kunjungan Silaturahmi Atlet, Pelatih dan Official 1st Asian Martial Art and SEA Games XXV di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Koordinasi pembahasan tentang Pelaksanaan Erau Kukar Tahun 2009.
- Koordinasi pembahasan tentang Komunitas Intelijen Daerah.
- Koordinasi pembahasan tentang Persiapan PILKADA Kab. Kukar Tahun 2010.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

D.1. Kebijakan dan Kegiatan

Permasalahan batas wilayah merupakan permasalahan krusial, yang dialami juga oleh daerah-daerah se Indonesia, dimana permasalahan tersebut timbul dilatarbelakangi beberapa faktor salah satunya potensi ekonomis yang berada disekitar lokasi titik perbatasan kedua wilayah, baik itu batas antar provinsi, kabupaten, kecamatan hingga wilayah kelurahan/desa. Kebijakan penataan batas wilayah antar kabupaten/kota mengacu kepada Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dan untuk penataan batas antar kecamatan berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996

Untuk meminimalisir permasalahan tapal batas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya mengalokasikan anggaran guna menetapkan dan menyelesaikan masalah batas baik itu wilayah antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan penataan batas antar kecamatan dalam Wilayah Kutai Kartanegara. Untuk pelaksanaan dilapangan telah dibentuk Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK-265/2009 tanggal 18 Mei 2009, dimana komposisi tim penataan batas terdiri dari beberapa unsur yaitu :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan
2. Bagian Administrasi Pertanahan
3. Bagian Hukum
4. Bapemas dan Pemdes
5. Bappeda
6. BPN

Tahun Anggaran 2009 alokasi yang tersedia merupakan kegiatan lanjutan yang dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan tapal batas yaitu :

- A. Penataan dan penegasan batas wilayah Kabupaten/Kota.
- B. Penataan dan penegasan batas wilayah administrasi antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- C. Pemasangan pilar batas Batas Utama (PBU).
- D. Pelatihan Pelacakan dan Penegasan Batas Daerah.

Khusus pelaksanaan penyelesaian pelacakan dan penetapan batas antar kelurahan/desa dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tahun 2009 tidak ada kegiatan, karena tidak teranggarkan juga adanya transisi penyerahan

kewenangan penyelesaian tapal batas kelurahan/desa, dimana sebelumnya penyelesaian batas kelurahan/desa ditangani oleh Bagian Pempdes, dan setelah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, penyelesaian batas kelurahan/desa ditangani dan menjadi kewenangan Bagian Administrasi Pemerintahan.

D.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelacakan batas wilayah antar kabupaten/kota

1.1. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat :

Tahun 2009 telah dilakukan Pelacakan Trayek Batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Barat yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang 55 km, berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 35,60 km, dengan hasil pelacakan dan penetapan batas sebagai berikut :

- Pada segmen batas Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Gusik Kecamatan Bongon Kabupaten Kutai Barat, pada tanggal 23 Maret 2009 telah dilakukan pelacakan titik koordinat dan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada titik Koordinat yang disepakati sebagai berikut : 00°37'53,072" LS - 116°22'47,039" BT.

- Pelacakan titik koordinat batas pada ruas batas Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Saka Lotok Kecamatan Manor Bulatn Kabupaten Kutai Barat.
- Pelacakan pada tanggal 20 - 24 Oktober 2009 disekitar Danau Melintang antara Desa Muara Enggelam Kecamatan Muara Wis dan Desa Tanjung Batuq Harapan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Loa Deras Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat, menghasilkan satu titik koordinat kesepakatan batas dengan tanda alam Pohon Rengas Kuning ditepi Danau Melintang.

1.2. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur :

Konsultasi dan Koordinasi Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 27 April 2009, akan dilakukan pelacakan dan penegasan batas, dimana dalam pertemuan tersebut disepakati starting point Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyur Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur disepakati di GOTPAL (sungai buatan) dan akan dilakukan peninjauan

lapangan, Pelacakan Trayek Batas yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang 62,60 km pada tahun 2009, berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 34,20 km, adapun hasil pelacakan dan penetapan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

- Pada tanggal 7 Mei 2009 dilakukan Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, disepakati batas pada titik koordinat $00^{\circ}11'02,0''$ LU - $116^{\circ}39'08,9''$ BT yang terletak di Muara Sungai Baluy dan ditarik garis lurus ke arah Barat (270°) sampai dengan batas Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara. Garis batas dimaksud akan dilakukan pelacakan lanjutan.
- Pada tanggal 18 s.d 20 Juni 2009 dilakukan Pelacakan Trayek Batas pada segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal, masing-masing unsur Pemerintah Desa sepakat dan telah dipasang pilar batas sementara disebelah selatan Sungai GOTPAL (sungai buatan).
- Pada tanggal 27 Juli 2009 di Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur dilakukan pembahasan pelacakan lanjutan untuk menentukan titik koordinat pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) pada segment

batas Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Kutai Timur.

- Pelacakan Trayek batas pada segment Desa Sedulang Kecamatan Muara Kaman dengan Desa Mulupan Kecamatan Muara Bengkal dilaksanakan pada tanggal 5 - 9 Agustus 2009, dan disepakati batas di MUARA SUNGAI GOTPAL dengan titik koordinat : $0^{\circ}13'38,1''$ LU - $11^{\circ}46'35,9''$ BT, menuju ke arah MUARA SUNGAI BALUY dengan titik koordinat : $0^{\circ}11'02''$ LU - $11^{\circ}39'08,9''$ BT, dari MUARA SUNGAI GOTPAL menyeberangi SUNGAI KEDANG RANTAU menuju ke pohon Rengas dengan koordinat $0^{\circ}13'35,1''$ LU - $11^{\circ}46'35,3''$ BT.

1.3. Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda :

Konsultasi dan Koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 23 Juli 2009 membahas segment batas Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan segment batas Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Samarinda Utara & Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Peta kajian atas peta lampiran PP Nomor 21 tahun 1987 oleh masing-masing TIM PBD akan dioverlay oleh TIM PBD Propinsi Kalimantan Timur sebagai bahan tindak lanjut, adapun hasil kegiatan penegasan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda yaitu :

- Pada tanggal 27 Agustus 2009 konsultasi dan koordinasi di Sekretariat Propinsi Kalimantan Timur, dimana dalam pertemuan tersebut akan dilakukan Pelacakan Trayek Batas yang disepakati dari rencana pelacakan trayek batas sepanjang 43,20 km, namun dalam implementasi pelacakan dan penetapan batas pada tahun 2009 hanya berhasil dilacak dan disepakati sepanjang 13 km, sedangkan sisa yang direncanakan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kota Samarinda masih belum ada kesepakatan yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran dan perbedaan peta dasar pada segment patung lembuswana. Tim PBD Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan kajian berdasarkan peta lampiran PP 21 tahun 1987, sedangkan Tim PBD Kota Samarinda berdasarkan peta lampiran PERDA Kota Samarinda. Tim PBD Kutai Kartanegara meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda agar mencabut pilar batas yang dipasang oleh Pemkot Samarinda diluar kesepakatan, karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2006.
- Pelacakan titik koordinat batas Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda pada tanggal 10 - 14 Nopember 2009 dilakukan pada trayek sekitar gunung Batuputang, menghasilkan 5 titik koordinat dan tarikan garis batas kesepakatan sepanjang \pm 13 km.

2. Pelacakan dan penetapan batas wilayah antar kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara :

Kegiatan pelacakan batas wilayah yang dilacak dilapangan diarahkan pada segment-segment batas yang belum pernah dilakukan pelacakan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dengan mengacu pada Tabel Segment Batas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2008, dari total panjang keseluruhan segment batas antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang 1.015,76 Kilometer, yang telah dilakukan pelacakan dilapangan baru sepanjang 414,96 Kilometer. Sehingga masih ada sepanjang 600,80 Kilometer garis batas yang harus dilakukan pelacakan oleh Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan. Untuk tahun 2009, Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan merencanakan pelacakan batas antar kecamatan sepanjang 308,50 Kilometer dan pemasangan Pilar Batas Utama sebanyak 13 (tigabelas) unit, Segment Batas Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2009 Sesuai dengan rencana pelacakan batas wilayah antar kecamatan, Tim Penataan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Dalam Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan pelacakan segment batas antar kecamatan dengan hasil rincian sebagai berikut :

1. Tabang - Kembang Janggut.

Segment batas antara Kecamatan Tabang dengan Kecamatan Kembang Janggut yang telah dilacak dilapangan sepanjang \pm 54,6 Km, meliputi :

- Desa Long Lalang Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut.

- Desa Muara Ritan (Ritan Lama) Kecamatan Tabang dan Desa Long Beleh Haloq Kecamatan Kembang Janggut.

2. Muara Wis - Kota Bangun

Segment batas antara Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Kota Bangun yang telah dilacak dilapangan sepanjang $\pm 13,4$ Km Dari pelacakan titik koordinat batas diatas terdapat kesepakatan garis batas dilapangan antara Desa Melintang Kecamatan Muara Wis dengan Desa Pela Kecamatan Kota Bangun

3. Muara Wis - Muara Muntai

Segment batas antara Kecamatan Muara Wis dengan Kecamatan Muara Muntai yang telah dilacak dilapangan sepanjang $\pm 14,9$ Km

4. Muara Badak - Tenggarong Seberang

Segment batas antara Kecamatan Muara Badak dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah dilacak dilapangan sepanjang $\pm 12,20$ Km

5. Marangkayu - Tenggarong Seberang

Segment batas antara Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang dilacak dilapangan sepanjang $\pm 10,3$ Km

6. Sebulu - Tenggarong Seberang

Segment batas antara Kecamatan Sebulu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang telah dilacak dilapangan sepanjang ± 14 Km, Pada pelacakan batas antara Desa Giri Agung Kecamatan Sebulu dan Desa Suka Maju Kecamatan Tenggarong Seberang

7. Sebulu - Tenggarong

Segment batas antara Kecamatan Marangkayu dengan Kecamatan Tenggarong Seberang yang dilacak dilapangan

sepanjang $\pm 9,1$ Km, segment batas antara Desa Loa Tebu Kecamatan Tenggarong dengan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu sepanjang $\pm 6,5$ Km, segment batas antara Desa Beloro Kecamatan Sebulu dengan Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong sepanjang $\pm 2,6$ Km

8. Loa Kulu - Tenggarong

Segment batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Tenggarong yang telah dilacak dilapangan sepanjang $\pm 9,5$ Km, segment Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu dan Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong

9. Loa Kulu - Loa Janan

Segment batas antara Kecamatan Loa Kulu dengan Kecamatan Loa Janan yang dilacak dilapangan sepanjang $\pm 11,8$ Km, segment batas antara Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan sepanjang $\pm 4,6$ Km, segment batas antara Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu dengan Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan sepanjang $\pm 7,2$ Km

10. Muara Jawa - Samboja

Segment batas antara Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Samboja yang dilacak dilapangan sepanjang $\pm 16,1$ Km

segment batas antara Kelurahan Muara Jawa Ilir dan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa dengan Kelurahan Muara Sembilang dan Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja segment batas antara Kelurahan Muara Jawa Ilir Kecamatan Muara Jawa dengan Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja (dari Jalan Poros Handil - Muara Jawa kearah Timur) sepanjang $\pm 5,8$ Km.

3. Pemasangan pilar batas Batas Utama (PBU).

Mengacu Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-86/2006 tentang Penetapan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sanga-Sanga, untuk menindaklanjuti hasil pelacakan dan penetapan batas wilayah kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, pada Tahun 2009 telah dilakukan pemasangan Pilar Batas Utama (PBU) sebanyak 5 (lima) unit pada segment batas antara Kecamatan Muara Jawa dengan Kecamatan Sanga-Sanga yang dipasang pada titik koordinat dan garis batas.

4. Pelatihan Penegasan Batas Daerah

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pelacakan dan penegasan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan dana untuk mengirim dan mengikutsertakan pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansi terkait dalam penyelesaian masalah batas dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Geodesi UGM Yogyakarta.

Adapun pegawai yang mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan : 6 orang
- b. Bapemas dan Pemdes Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang
- c. Kantor BPN Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang

D.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian tabal batas antara kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan penyelesaian tapal batas antar kabupaten/kota yaitu :

1. Faktor pendanaan
2. Tidak adanya kesepakatan obyek titik tapal batas oleh kedua belah pihak, baik itu tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan serta kelurahan/desa.

Untuk penyelesaian tabal batas, khususnya batas antar kabupaten/ kota, dengan difasilitasi pihak Pemerintah Provinsi setiap tahun agar daerah kabupaten/kota yang berbatasan menggunkan biaya untuk kegiatan pelacakan dan penetapan serta pemasangan PBU pada daerah titik batas yang disepakati oleh kedua belah pihak.

D.4. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi

Sengketa batas dengan Kabupaten/kota berbatasan maupun antar kecamatan yang terjadi pada tahun 2009 tidak ada yang cukup menonjol. Perbedaan persepsi dalam penetapan batas wilayah yang terjadi adalah akibat perbedaan referensi. Khusus beberapa permasalahan batas antar kecamatan yang terjadi, hampir seluruhnya diakibatkan karena masih relatif kurangnya pemahaman aparat kecamatan/desa/kelurahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pada tahun 2009 secara bersamaan dilaksanakan

kegiatan sosialisasi kepada para aparat kecamatan/ desa/kelurahan yang saling berbatasan antar kecamatan.

D.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah

SKPD penyelenggara pembinaan batas wilayah adalah Bagian Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara yang menangani penataan batas wilayah kabupaten dan antar kecamatan. Sedangkan penataan batas wilayah desa dan kelurahan ditangani melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah ini, berkoordinasi dengan Bagian Administrasi Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Secara umum, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2009 dapat diuraikan ke dalam beberapa jenis bencana. Bencana yang terjadi selama tahun 2009 menimbulkan kerugian yang relatif besar bagi sebagian korban bencana. Diantaranya yang tergolong dalam bencana alam berupa banjir dan tanah longsor, serta yang tergolong bencana akibat ulah/kelalaian manusia seperti diantaranya kebakaran serta kecelakaan.

E.1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Selama kurun waktu tahun 2009, terjadi bencana sebanyak 35 kali yang terdiri dari :

1. Bencana Banjir 3 kali Kejadian.
2. Bencana Kebakaran Gedung dan Rumah 30 kali kejadian.
3. Kecelakaan Angkutan Sungai 1 kali kejadian.

4. Tanah Longsor 1 kali kejadian.

Adapun penanggulangannya dengan cara bekerjasama dengan Tim Satlak Penanggulangan Bencana Kabupaten yang terdiri dari Instansi Terkait (Polres, Kodim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Pihak Kecamatan yang bersangkutan).

E.2. Sumber dan Jumlah Anggaran

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. APBD II Tahun 2009 | : Rp. 250.000.000,- |
| 2. Belanja Tidak Terduga | : Rp. 646.325.000,- |

E.3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana adalah sebagai berikut :

- Melakukan Rapat Koordinasi Satlak PB.
- Melakukan Sosialisasi pada Daerah Rawan Bencana.
- Membentuk Unit Operasional PB Kecamatan.
- Mengaktifkan Posko - posko Bencana di masing -masing Desa dan Kecamatan.
- Mengaktifkan sarana Komunikasi, HT dan HP.
- Mengadakan pelatihan dasar SAR Linmas Kabupaten dan Kecamatan.
- Menyiapkan Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana.
- Menyiagakan Pleton Inti Linmas di Kecamatan dan Kabupaten.
- Melatih Anggota Linmas Kabupaten dan Kecamatan dalam Penanggulangan Bencana.
- Melakukan Konsultasi dan Koordinasi Bidang penanggulangan bencana pada Badan penanggulangan bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

E.4. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi.

- Banjir
- Kebakaran Gedung/ Bangunan
- Kebakaran Hutan/Lahan
- Kecelakaan Lalu Lintas Air Sungai dan Laut
- Angin Puting Beliung
- Tanah Longsor
- Gulma

E.5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana.

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani bencana adalah Badan Kesbangpolinmas. Dalam penanganan bencana berkoordinasi dengan SKPD lainnya antara lain Dinas Sosial, Bagian Kesra, Kecamatan maupun Desa bersangkutan.

E.6. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana

Dalam rangka efektifitas penanganan serta penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemkab membentuk Satlak Penanggulangan Bencana, yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Nomor 180.188/HK-216/2005 Tanggal 28 Nopember 2005 Tentang Tim Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi.

F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum kondisi ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup baik. Hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban hanya terjadi secara sporadis dan dapat dikategorikan dalam skala yang kecil serta tidak menimbulkan dampak luas bagi wilayah lainnya.

F.1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)

Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2009 telah terdeteksi Indikasi konflik dan kerawanan sosial khususnya di sekitar areal Pertambangan Batu Bara dan Perkebunan. Namun secara umum, tidak terdapat gangguan atas ketenteraman dan ketertiban umum seperti konflik berbasis SARA, anarkisme ataupun separatisme yang memiliki dampak dengan skala yang cukup luas dan mengganggu jalannya pemerintahan, pembangunan serta sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum lebih terfokus pada upaya penciptaan ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah seperti halnya penertiban IMB, HO, atau razia pelajar.

F.2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua SKPD ini berperan dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

F.3. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pada tahun 2009 Dana penanganan/Penanggulangan Konflik belum teralokasi pada Badan Kesbang dan Linmas, dimasa akan datang perlu dianggarkan secara khusus biaya penanganan konflik ini

F.4. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbang dan Linmas sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Anggota Kominda Kab. Kukar dengan menganggarkan biaya Diklat Dasar dan Analisis Intelijen bagi 19 orang Anggota di Pusdiklat BIN Jakarta, namun terkendala karena pada saat pelaksanaan, dana dari pemkab belum bisa dicairkan.
- b. Mengintensifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai Peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 dalam penanganan sengketa Pendirian Tempat Ibadah dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama melalui Sosialisasi di 4 (empat) Kecamatan (Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Samboja).
- c. Mengintensifkan peran Forum Persaudaraan Masyarakat Kutai Kartanegara (FPMKK) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Memfasilitasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Sosialisasi Permendagri No.12 tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, di Kecamatan Loa Janan, Tenggarong Seberang dan Anggana.
- f. Telah Mengadakan Riset dan Survey Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan dalam rangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa di 18 Kecamatan.
- g. Sosialisasi UU NO 8 Th. 1985 tentang Organisasi Masyarakat di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Muara Kaman dan Tabang.

- h. Melaksanakan Forum Diskusi Politik di Kecamatan Kenohan, Marang Kayu dan Anggana.
- i. Melaksanakan Monitoring terhadap Eks. TAH. Napol G. 30 S/ PKI pada 12 Kecamatan.
- j. Melaksanakan Monitoring Deteksi Dini terhadap permasalahan IPOLEKSOSBUDKAM pada 18 Kecamatan.

Dengan terbentuknya berbagai lembaga tersebut diatas maka beberapa potensi konflik, bahkan Penanggulangan dan Penanganannya dapat diatasi secara dini.

Adapun Kendala yang dirasakan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, dan masalah Koordinasi yang masih lemah.

F.5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

- Badan Kesbang dan Linmas dalam penanganan Konflik selalu berkoordinasi dengan Aparat Keamanan dan Instansi terkait.
- Mengikut sertakan Aparat Keamanan dan Aparat Teritorial dalam merumuskan fasilitasi kebijakan penyelesaian Konflik.

BAB VII. PENUTUP

Berbagai prestasi dan kekurangan selama tahun 2009 yang telah dituangkan dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2009 ini diharapkan akan menjadi awal kesepahaman untuk mengarahkan cara pandang perbaikan-perbaikan ke depan, karena dalam siklus manajemen strategik, laporan pertanggungjawaban tidak dapat dipisahkan dengan penetapan perencanaan dan sebaliknya. Dengan demikian apabila semua pihak dapat memahami siklus manajemen strategik tersebut, maka laporan keterangan pertanggungjawaban ini dipandang bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan formalitas belaka.

Capaian Kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan Keterangan pertanggungjawaban ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalani bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, secara jujur dan sangat disadari bahwa masih terdapat kekurangan kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Tantangan terbesar adalah menyiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak termarginalisasi dan dapat memperoleh manfaat dari proses globalisasi serta dapat berkembang secara berkelanjutan menuju ke Visi Kabupaten Kutai Kartanegara ***“Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera”*** yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara di masa mendatang, yang dihadapkan pada percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa, adanya kelengahan sedikit saja akan terlibas oleh arus dinamika dengan mobilitas yang sangat tinggi.

Pada akhirnya, penilaian laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kutai Kartanegara tahun 2009 ini disampaikan sepenuhnya kepada Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat.

Atas segala perhatian Dewan yang terhormat, sejak awal hingga berakhirnya sidang, saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Tenggarong, 26 Maret 2010

Pj. Bupati Kutai Kartanegara



H. SULAIMAN GAFUR, SE

